

LURAH PATALAN

KAPANEWON JETIS KABUPATEN BANTUL

PERATURAN KALURAHAN PATALAN

NOMOR 4 TAHUN 2026

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH KALURAHAN

TAHUN 2027

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH PATALAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (5) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2027;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor

77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7169);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633)
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 262);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2025 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1151);
8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);
9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 77 Tahun 2025 tentang Pembentukan Produk Hukum Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 Nomor 80);
10. Peraturan Kalurahan Patalan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Patalan Tahun 2020 Nomor 9);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN PATALAN
dan
LURAH PATALAN

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN PATALAN TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH KALURAHAN TAHUN 2027

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kalurahan ini yang dimaksud:

1. Kalurahan adalah adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Perdesaan adalah kawasan kerja sama antar kalurahan untuk pengembangan usaha, kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, keamanan, dan ketertiban.
3. Pembangunan kalurahan adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat kalurahan.
4. Pembangunan Perdesaan adalah pembangunan yang dilaksanakan antar Desa dalam bidang pengembangan usaha, kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, keamanan, dan ketertiban.
5. Pemberdayaan masyarakat kalurahan adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat kalurahan.
6. Kewenangan kalurahan adalah kewenangan yang dimiliki kalurahan meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan kalurahan, pelaksanaan pembangunan kalurahan, pembinaan kemasyarakatan

kalurahan, dan pemberdayaan masyarakat kalurahan berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat kalurahan.

7. Pemerintahan kalurahan adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah kalurahan adalah Lurah atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat kalurahan sebagai unsur penyelenggaran pemerintahan kalurahan.
9. Badan Permusyawaratan kalurahan yang selanjutnya disingkat Bamuskal adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk kalurahan berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Musyawarah kalurahan adalah musyawarah antara Bamuskal, pemerintah kalurahan, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Bamuskal untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
11. Musyawarah perencanaan pembangunan kalurahan yang selanjutnya disebut Musrenbangkal adalah musyawarah antara Bamuskal, pemerintah kalurahan, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh pemerintah kalurahan untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan pembangunan kalurahan yang didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja kalurahan, swadaya masyarakat kalurahan, dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten.
12. Peraturan kalurahan adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Lurah setelah dibahas dan disepakati bersama Bamuskal.
13. Perencanaan pembangunan kalurahan adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah kalurahan dengan melibatkan Bamuskal dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya kalurahan dalam rangka peningkatan kualitas hidup manusia dan penanggulangan kemiskinan.
14. Sistem Informasi kalurahan adalah sistem pengolahan data kewilayahan dan data kewargaan di kalurahan yang disediakan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi serta dilakukan secara terpadu dengan mendayagunakan fasilitas perangkat lunak dan perangkat keras, jaringan, dan sumber daya manusia untuk disajikan menjadi informasi yang berguna dalam peningkatan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik serta dasar perumusan kebijakan strategis pembangunan kalurahan.

15. Rencana Pembangunan Jangka Menengah kalurahan yang selanjutnya disebut RPJMKal adalah dokumen perencanaan kegiatan pembangunan kalurahan untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
16. Rencana Kerja Pemerintah kalurahan yang selanjutnya disebut RKPKal adalah dokumen penjabaran dari RPJMKal untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
17. Daftar Usulan RKPKal adalah penjabaran RPJMKal yang menjadi bagian dari RKPKal untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan pemerintah kalurahan kepada pemerintah daerah kabupaten melalui mekanisme perencanaan pembangunan daerah.
18. Aset kalurahan adalah barang milik kalurahan yang berasal dari kekayaan asli kalurahan, dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja kalurahan, atau perolehan hak lain yang sah.
19. Potensi Aset kalurahan adalah segala potensi kalurahan yang meliputi sumber daya alam dan lingkungan hidup, sumber daya manusia, sumber daya sosial dan budaya, sumber daya ekonomi, dan sumber daya lainnya yang dapat diakses, dikembangkan, dan/atau diubah oleh kalurahan menjadi sumber daya pembangunan yang dimiliki atau menjadi Aset kalurahan, dikelola, diolah, dimanfaatkan, dan dipergunakan bagi kesejahteraan bersama masyarakat kalurahan.
20. Anggaran Pendapatan dan Belanja kalurahan yang selanjutnya disebut APBKal adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan kalurahan.
21. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi kalurahan yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan kalurahan, pembinaan kemasyarakatan kalurahan, dan Pemberdayaan Masyarakat kalurahan.
22. Alokasi Dana Desa adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten setelah dikurangi dana alokasi khusus.
23. Lembaga Kemasyarakatan kalurahan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah kalurahan dalam memberdayakan masyarakat kalurahan.
24. Pelaksana kegiatan adalah pelaksana kegiatan Pembangunan kalurahan dan Pemberdayaan Masyarakat kalurahan, terdiri dari unsur perangkat kalurahan, Lembaga Kemasyarakatan kalurahan, dan unsur masyarakat.

25. Pendampingan kalurahan adalah upaya meningkatkan kapasitas, efektivitas, dan akuntabilitas pemerintahan kalurahan, Pembangunan kalurahan, Pemberdayaan Masyarakat kalurahan, pembentukan dan pengembangan badan usaha milik kalurahan dan/atau badan usaha milik kalurahan bersama, peningkatan sinergitas program dan kegiatan kalurahan, dan kerja sama kalurahan untuk mendukung pencapaian SDGs Desa.
26. Kader Pemberdayaan Masyarakat kalurahan adalah anggota masyarakat kalurahan yang memiliki prakarsa dan/atau yang dipilih oleh kalurahan untuk menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya, dan gotong royong di kalangan masyarakat kalurahan.
27. Badan Usaha Milik kalurahan, yang selanjutnya disebut BUMKal adalah badan hukum yang didirikan oleh kalurahan guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesarbesarnya kesejahteraan masyarakat kalurahan.
28. Pihak Ketiga adalah lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan, atau perusahaan, yang sumber keuangan dan kegiatannya tidak berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi, anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten, dan/atau APBKal.

BAB II
SISTEMATIKA PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH KALURAHAN

Pasal 2

(1) RKP Kalurahan Tahun 2027 disusun dengan sistematika :

BAB I : PENDAHULUAN
- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Dasar Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Proses Penyusunan RKP Kalurahan
- 1.5. Sistematika

BAB II : GAMBARAN UMUM PEMERINTAHAN KALURAHAN
- 2.1. Visi – Misi Lurah
- 2.2. Gambaran Umum Sosial Budaya
- 2.3. Gambaran Umum Kemiskinan

2.4. Gambaran Umum Ekonomi
2.5. Gambaran Umum Insfrastruktur

BAB III : RUMUSAN PRIORITAS MASALAH
3.1. Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan pada RKP Kalurahan Tahun sebelumnya
3.2. Evaluasi laju pencapaian SDGsDesa
3.3. Identifikasi masalah berdasarkan RPJMKal
3.4. Identifikasi Masalah Berdasarkan Analisa Keadaan Darurat antara lain bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi dan atau kerusahan sosial yang berkepanjangan
3.5. Identifikasi Masalah berdasarkan Prioritas Kebijakan Pembangunan Daerah

BAB IV : RUMUSAN PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN KALURAHAN
4.1. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Skala Kalurahan Tahun Anggaran 2027
4.2. Berdasarkan Kewenangan Hak asal usul
4.3. Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala kalurahan
4.4. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2027
4.5. Kebijakan Keuangan kalurahan

BAB V : PENUTUP

LAMPIRAN
1. Berita Acara Musyawarah Pembentukan Tim Penyusun RKP Kalurahan, risalah dan Daftar Hadir
2. Keputusan Lurah Nomor 112 Tahun 2026 tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2027 Kalurahan Patalan Kapanewon Jetis Kabupaten Bantul
3. Rencana Kerja dan Tindak Lanjut
4. Data dan informasi tentang rencana pembiayaan pembangunan kalurahan
5. Daftar Prioritas Usulan Rencana Program dan/atau Kegiatan Pembangunan Desa untuk 1 (satu) tahun anggaran berikutnya

6. Daftar Usulan Masyarakat kalurahan yang Dipilah Berdasarkan Tujuan SDGs Desa
7. Rancangan RKP Kalurahan Tahun 2027
8. Evaluasi pelaksanaan RKP Kalurahan Tahun 2026
9. Rencana Pendapatan
10. Rencana Anggaran dan Biaya (RAB)
11. Rencana Pembiayaan
12. Dokumen DU-RKPKal Tahun 2028
13. Berita acara hasil penyusunan rancangan RKP Kalurahan
14. Tata tertib Musrenbangkal RKP Kalurahan
15. Penyusunan Prioritas Program dan Kegiatan RKP Kalurahan tahun 2027
16. Berita Acara Musrenbangkal RKP Kalurahan tahun 2027, risalah dan Daftar Hadir
17. Berita Acara Prioritas Dana Desa Tahun 2027
18. Berita Acara Rembug Stunting Tahun 2027
19. Keputusan Bamuskal Nomor 13 Tahun 2026 tentang Pembentukan Tim Verifikasi Terhadap Usulan Dan Kegiatan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2027 Kalurahan Patalan Kapanewon Jetis Kabupaten Bantul
20. Dokumen Verifikasi Rancangan RKP Kalurahan Tahun 2027 oleh Tim Verifikasi (Bamuskal)
21. Keputusan Bamuskal Nomor 14 Tahun 2026 tentang Pembentukan Panitia Musyawarah Kalurahan Tentang Perencanaan Kalurahan Dalam Rangka Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2027 Kalurahan Patalan Kapanewon Jetis Kabupaten Bantul
22. Berita Acara Uji Publik Dalam Rangka Penyusunan RKP Kalurahan Tahun Anggaran 2027
23. Berita Acara Musyawarah kalurahan tentang pembahasan, penyepakatan dan pengesahanan rancangan RKP Kalurahan tahun 2027, risalah dan Daftar Hadir
24. Dokumen Pandangan Resmi Bamuskal
25. Dokumentasi Foto Kegiatan

(2) Penjabaran sistematika RKP Kalurahan Tahun 2027 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 3

RKP Kalurahan Tahun 2027 merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintahan kalurahan, Lembaga Kemasyarakatan kalurahan dan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan kalurahan Tahun 2027.

Pasal 4

Pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilaksanakan secara transparan, partisipatif dan akuntabel oleh pelaksana kegiatan pembangunan dengan menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA), serta dipertanggungjawabkan oleh Pelaksana Kegiatan dalam Forum Musyawarah kalurahan.

Pasal 5

RKP Kalurahan dapat diubah dalam hal :

a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten.

Pasal 6

Perubahan RKP Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dibahas dan disepakati bersama dengan Bamuskal dalam Musrenbangkal dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

(1) Berdasarkan Peraturan Kalurahan ini selanjutnya disusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2027.
(2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Kalurahan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Lurah.

Pasal 8

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dengan penempatannya dalam Lembaran kalurahan.

Ditetapkan di Patalan
pada tanggal, 13 Oktober 2026
LURAH PATALAN,

ttd.

SAYUDI

Diundangkan di Patalan
pada tanggal, 13 Oktober 2026
CARIK PATALAN,

ttd.

EFFENDI DHARMAWAN PRASETIO

LEMBARAN KALURAHAN PATALAN TAHUN 2026 NOMOR 4
NOREG. PERATURAN KALURAHAN PATALAN, KAPANEWON JETIS, KABUPATEN BANTUL : (04/PATALAN/2026);

Salinan Sesuai dengan aslinya,
An. Carik Patalan
Kepala Urusan Pangipta

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL KALURAHAN PATALAN KAPANEWON JETIS

RINA KURNIAWATI

LAMPIRAN I
PERATURAN KALURAHAN
NOMOR 4 TAHUN 2026
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH KALURAHAN
TAHUN 2027

RENCANA KERJA PEMERINTAH KALURAHAN TAHUN 2027

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan Puji dan Syukur kehadirat Allah SWT, atas Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga kami dapat menyusun Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKP Kalurahan) Tahun 2027 Kalurahan Patalan, Kapanewon Jetis, Kabupaten Bantul.

Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan, Kalurahan Patalan, Kapanewon Jetis, Kabupaten Bantul ini disusun melalui tahapan yang melibatkan partisipasi warga, mulai dari pembentukan Tim Penyusun RKP Kalurahan, Pencermatan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan (RPJM Kal), Pencermatan Pagu Indikatif Kalurahan, Penyelarasan Program Kegiatan Pemerintah dan Pemerintah Daerah, Penyusunan Rancangan RKP Kal, Verifikasi Usulan Kegiatan RKP Kalurahan, Musyawarah Rencana Pembangunan Kalurahan (Musrenbangkal) Penyusunan RKP Kalurahan, Musyawarah Kalurahan Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (Muskal RKP Kalurahan), dan Penetapan RKP Kalurahan.

Penyusunan perencanaan pembangunan kalurahan melibatkan partisipasi masyarakat, bertujuan agar kegiatan yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKal) sesuai kebutuhan masyarakat, karena prinsip dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan adalah dari masyarakat oleh masyarakat untuk masyarakat. Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan ini sebagai dasar dalam penyusunan APBKal.

Ucapan terima kasih serta penghargaan yang setinggi-tingginya kami haturkan kepada semua pihak, baik yang secara langsung maupun tidak langsung telah membantu, sehingga penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2027.

Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melimpahkan Petunjuk dan bimbingan-Nya kepada kita semua dalam mewujudkan rencana, harapan dan keinginan meraih kemajuan dan perkembangan yang lebih baik.

Patalan, 13 Oktober 2026
Lurah Patalan
Ttd.

Sayudi

DAFTAR ISI

Cover i

Peraturan Kalurahan 1

Kata Pengantar 12

Daftar Isi 13

Daftar Tabel 16

Daftar Gambar 17

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang 18

1.2. Dasar Hukum 20

1.3. Maksud dan Tujuan 21

1.4. Proses Penyusunan RKP Kalurahan 21

1.5. Sistematika 22

BAB II GAMBARAN UMUM PEMERINTAH KALURAHAN

2.1. Visi – Misi Lurah 24

2.2. Gambaran Umum Sosial Budaya 30

2.3. Gambaran Umum Sosial Kemiskinan..... 35

2.4. Gambaran Umum Sosial Ekonomi 44

2.5. Gambaran Umum Sosial Insfrastruktur 47

BAB III RUMUSAN PRIORITAS MASALAH

3.1. Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan pada RKP Kalurahan Tahun sebelumnya 51

3.2. Evaluasi laju pencapaian SDGsDesa 62

3.3. Identifikasi masalah berdasarkan RPJMKal 92

3.4. Identifikasi Masalah Berdasarkan Analisa Keadaan Darurat antara lain bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi dan atau kerusahan sosial yang berkepanjangan 95

3.5. Identifikasi Masalah berdasarkan Prioritas Kebijakan Pembangunan Daerah..... 98

BAB IV RUMUSAN PRIORITAS KEBIJAKAN PROGRAM PEMBANGUNAN KALURAHAN TAHUN 2027

4.1. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Skala kalurahan Tahun Anggaran 2027 102
4.2. Berdasarkan Kewenangan Hak asal usul 103
4.3. Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala kalurahan 104
4.4. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2027 112
4.5. Kebijakan Keuangan Kalurahan 116

BAB V PENUTUP 127

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Berita Acara Musyawarah Pembentukan Tim Penyusun RKP Kalurahan, risalah dan Daftar Hadir 128
2. Keputusan Lurah Nomor 112 Tahun 2026 tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2027 Kalurahan Patalan Kapanewon Jetis Kabupaten Bantul 129
3. Rencana Kerja dan Tindak Lanjut 130
4. Data dan informasi tentang rencana pembiayaan pembangunan kalurahan 131
5. Daftar Prioritas Usulan Rencana Program dan/atau Kegiatan Pembangunan Desa untuk 1 (satu) tahun anggaran berikutnya . 132
6. Daftar Usulan Masyarakat kalurahan yang Dipilah Berdasarkan Tujuan SDGs Desa 133
7. Rancangan RKP Kalurahan Tahun 2027 134
8. Evaluasi pelaksanaan RKP Kalurahan tahun 2026..... 135
9. Rencana Pendapatan 137
10. Rencana Anggaran dan Biaya (RAB) 138
11. Rencana Pembiayaan 139
12. Dokumen DU-RKPKal Tahun 2028 140
13. Berita acara hasil penyusunan rancangan RKP Kalurahan 141
14. Tata tertib Musrenbangkal RKPKal 142
15. Penyusunan Prioritas Program dan Kegiatan 143
16. Berita Acara Musrenbangkal RKP Kalurahan tahun 2027, risalah dan Daftar Hadir 144
17. Berita Acara Prioritas Dana Desa Tahun 2027..... 145

18. Berita Acara Rembug Stunting Tahun 2027 146
19. Keputusan Bamuskal Nomor 13 Tahun 2026 tentang Pembentukan Tim Verifikasi Terhadap Usulan Dan Kegiatan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKP Kalurahan) Tahun Anggaran 2027 Kalurahan Patalan Kapanewon Jetis Kabupaten Bantul 147
20. Dokumen Verifikasi Rancangan RKP Kalurahan Tahun 2027 oleh Tim Verifikasi (Bamuskal) 148
21. Keputusan Bamuskal Nomor 14 Tahun 2026 tentang Pembentukan Panitia Musyawarah Kalurahan Tentang Perencanaan Kalurahan Dalam Rangka Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun Anggaran 2027 Kalurahan Patalan Kapanewon Jetis Kabupaten Bantul 149
22. Berita Acara Uji Publik Dalam Rangka Penyusunan RKP Kalurahan Tahun Anggaran 2027..... 150
23. Berita Acara Musyawarah kalurahan tentang pembahasan, penyepakatan dan pengesahanan rancangan RKP Kalurahan tahun 2027, risalah dan Daftar Hadir 151
24. Dokumen Pandangan Resmi Bamuskal 152
25. Dokumentasi Foto Kegiatan 153

Keputusan Bamuskal 154
Kesepakatan Bersama 155
Nomor Register 156

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Jumlah Penduduk Kalurahan Patalan 30
Tabel 2.2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Agama 32
Tabel 2.3 Data Penyandang Disabilitas Kalurahan Patalan 32
Tabel 2.4 Kategori Penduduk Kalurahan Patalan Berdasarkan Sidamesra 36
Tabel 2.5 Data Stunting di Kalurahan Patalan per September 2026 ... 38
Tabel 2.6 Jenis Pekerjaan Penduduk Kalurahan Patalan Semester 1 Tahun 2026 45
Tabel 3.1 Evaluasi Rencana Kerja Pemerintahan Kalurahan Tahun 2026 56
Tabel 3.2 Indeks Kalurahan Patalan Tahun 2026 65
Tabel 3.3 Sikronisasi Kegiatan Tahun 2027 98
Tabel 4.1 Pendapatan Kalurahan Patalan Tahun 2027 115
Tabel 4.2 Belanja Kalurahan Patalan Tahun 2027 116
Tabel 4.3 Kegiatan Penanganan kemiskinan ekstrem..... 122
Tabel 4.4 Kegiatan Penguatan Desa Berketahanan Iklim dan Tangguh Bencana 122
Tabel 4.5 Peningkatan Promosi Dan Penyediaan Layanan Dasar Kesehatan Skala Desa 123
Tabel 4.6 Kegiatan Program Ketahanan Pangan atau Lumbung Pangan, Energi, dan Lembaga Ekonomi Desa lainnya..... 123
Tabel 4.7 Kegiatan Dukungan Implementasi Koperasi Desa Merah Putih..... 124
Tabel 4.8 Kegiatan Padat Karya Tunai dan penggunaan bahan baku lokal 124
Tabel 4.9 Kegiatan Pembangunan Infrastruktur Digital dan Teknologi di Desa 125
Tabel 4.10 Pembiayaan Kalurahan Patalan Tahun 2027 125

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur 31
Gambar 2.2 Tingkat Kemiskinan di D.I. Yogyakarta, Maret 2019 - Maret 2026 34
Gambar 2.3 Rekap DTSEN Patalan Tahun 2026 38
Gambar 2.4 Jumlah Penduduk Menurut Jenjang Pendidikan..... 42
Gambar 2.5 Pertumbuhan PDRB Beberapa Lapangan Usaha (Q-to-Q) (persen), Triwulan II-2025, Triwulan I-2026, dan Triwulan II-2026..... 44
Gambar 2.6 Peta Sarpras Kalurahan Patalan 47
Gambar 2.7 Peta wilayah Kalurahan Patalan 48
Gambar 2.8 Peta Jaringan Drainase Kalurahan Patalan 49
Gambar 3.1. Peta Rawan Banjir 95

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Bahwa berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah Desa dan Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Rrepublik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika. Adapun Pengaturan Kalurahan berdasarkan pada asas:

a. rekognisi;
b. subsidiaritas;
c. keberagaman;
d. kebersamaan;
e. kegotongroyongan;
f. kekeluargaan;
g. musyawarah;
h. demokrasi;
i. kemandirian;
j. partisipasi;
k. kesetaraan;
l. pemberdayaan; dan
m. keberlanjutan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang mengubah masa jabatan Lurah dari 6 (enam) tahun menjadi 8 (delapan) tahun, maka Pemerintah Kalurahan diwajibkan menyusun dokumen rencana pembangunan Kalurahan yang terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan (RPJMKal) untuk jangka waktu 8 (enam) tahun dan

rencana pembangunan tahunan Kalurahan atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKP Kalurahan). Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKP Kalurahan) merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan (RPJMKal) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

RKP Kalurahan disusun oleh Pemerintah Kalurahan sesuai dengan memperhatikan siklus perencanan pembangunan kalurahan dan informasi dari pagu indikatif Kalurahan serta rencana kegiatan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota. Penyusunan RKP Kalurahan berpedoman kepada :

a. hasil kesepakatan musyawarah Kalurahan;
b. pagu indikatif Kalurahan;
c. pendapatan asli Kalurahan;
d. rencana kegiatan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota;
e. jaring aspirasi masyarakat yang dilakukan oleh DPRD kabupaten/kota;
f. hasil pencermatan ulang dokumen RPJMKal;
g. hasil kesepakatan kerjasama antar Kalurahan; dan
h. hasil kesepakatan kerjasama Kalurahan dengan pihak ketiga.

Rancangan RKP Kalurahan memuat rencana kegiatan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan, Pelaksanaan Pembangunan Kalurahan, Pembinaan Kemasyarakatan Kalurahan, dan pemberdayaan masyarakat Kalurahan serta Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Kalurahan. Dalam RKP Kalurahan terdapat prioritas program dan kegiatan yang dirumuskan berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat Kalurahan yang meliputi:

a. peningkatan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan;
b. peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar;
c. pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan
d. berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia;
e. pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif;
f. pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi;
g. pendayagunaan sumber daya alam;
h. pelestarian adat istiadat dan sosial budaya Kalurahan;

i. peningkatan kualitas ketertiban dan ketenteraman masyarakat Kalurahan berdasarkan kebutuhan masyarakat Kalurahan; dan
j. peningkatan kapasitas masyarakat dan lembaga kemasyarakatan Kalurahan.

1.2. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7169);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633)
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 262);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2025 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1151);

8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);
9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 77 Tahun 2025 tentang Pembentukan Produk Hukum Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 Nomor 80);
10. Peraturan Kalurahan Patalan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Patalan Tahun 2020 Nomor 9);

1.3. Maksud dan Tujuan

RKP Kalurahan disusun sebagai acuan bagi Pemerintah Kalurahan dalam menyusun anggaran pendapatan dan belanja tahun berikutnya untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dalam RPJMKal. Keberadaan dokumen RKP Kalurahan juga menjadi instrumen penilaian kinerja perangkat kalurahan dalam mengukur efektivitas pelaksanaan tugasnya, sekaligus menjadi instrumen akuntabilitas dan transparansi manajemen pemerintah kalurahan, baik bagi pemerintah kalurahan maupun masyarakat. Dari sisi materi, keberadaan dokumen RKP Kalurahan dapat digunakan untuk mengukur tingkat pencapaian pemanfaatan potensi kalurahan dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.

1.4. Proses Penyusunan RKP Kalurahan

Pada Pasal 22 ayat (4) Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, RKP Kalurahan disusun mulai bulan Juli sampai dengan bulan September tahun berjalan. Lebih lanjut diatur tentang tahapan penyusunan RKP Kalurahan di dalam Pasal 34 sebagai berikut:

1. Pembentukan tim penyusun RKP Kalurahan;
2. Pencermatan dan penyelarasan rencana kegiatan dan pembiayaan Pembangunan Kalurahan;
3. Pencermatan ulang RPJMKal;
4. Penyusunan rancangan RKP Kalurahan dan daftar usulan RKP Kalurahan;

5. Musyawarah perencanaan pembangunan kalurahan (Musrenbangkal) yang membahas rancangan RKP Kalurahan dan daftar usulan RKP Kalurahan; dan
6. Musyawarah Kalurahan yang membahas dan mengesahankan RKP Kalurahan dan daftar usulan RKP Kalurahan.

1.5. Sistematika

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang
1.2. Dasar Hukum
1.3. Maksud dan Tujuan
1.4. Proses Penyusunan RKP Kalurahan
1.5. Sistematika

BAB II GAMBARAN UMUM PEMERINTAH KALURAHAN

2.1. Visi – Misi Lurah
2.2. Gambaran Umum Sosial Budaya
2.3. Gambaran Umum Sosial Kemiskinan
2.4. Gambaran Umum Sosial Ekonomi
2.5. Gambaran Umum Sosial Insfrastruktur

BAB III RUMUSAN PRIORITAS MASALAH

3.1. Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan pada RKP Kalurahan Tahun sebelumnya
3.2. Evaluasi laju pencapaian SDGsDesa
3.3. Identifikasi masalah berdasarkan RPJMKal
3.4. Identifikasi Masalah Berdasarkan Analisa Keadaan Darurat antara lain bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi dan atau kerusahan sosial yang berkepanjangan
3.5. Identifikasi Masalah berdasarkan Prioritas Kebijakan Pembangunan Daerah

BAB IV RUMUSAN PRIORITAS KEBIJAKAN PROGRAM PEMBANGUNAN KALURAHAN TAHUN 2027

4.1. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Skala kalurahan Tahun Anggaran 2027
4.2. Berdasarkan Kewenangan Hak asal usul
4.3. Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala kalurahan
4.4. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2027
4.5. Kebijakan Keuangan kalurahan.

BAB V PENUTUP
LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB II

GAMBARAN UMUM PEMERINTAHAN KALURAHAN

2.1. Visi – Misi Lurah

1. Visi

Sebagai dasar dalam pelaksanaan pembangunan Kalurahan yang menganut prinsip akuntabilitas, transparansi, partisipatif, demokratis, efisien dan efektif dengan harapan Kalurahan Patalan secara bertahap dapat mencapai tujuan menjadi Kalurahan yang maju, mandiri dan sejahtera, maka dirumuskan Visi sebagai berikut :

“ TERCIPTANYA KALURAHAN PATALAN YANG AMAN, SEHAT, CERDAS DAN BERAKHLAK MULIA SERTA BERBUDAYA”

Rumusan Visi tersebut merupakan ungkapan dari suatu niat luhur untuk memperbaiki dan menata penyelenggaraan pemerintahanan Kalurahan Patalan, baik secara individu maupun kelembagaan dengan harapan lebih maju di segala bidang yang dilandasi semangat kebersamaan.

a. Aman : diartikan bahwa masyarakat Kalurahan Patalan merasa nyaman dalam melakukan aktifitas kehidupan dan terhindar dari segala ancaman lahir maupun batin.

b. Sehat : diartikan bahwa masyarakat Kalurahan Patalan memiliki kesehatan yang menyeluruh baik secara lahir maupun batin.

c. Cerdas : diartikan bahwa masyarakat Kalurahan Patalan tidak cukup memiliki kecerdasan intelektual tetapi juga memiliki kecerdasan emosional dan spiritual serta kecerdasan finansial.

d. Berakhlak Mulia : diartikan bahwa masyarakat Kalurahan Patalan selalu menjunjung tinggi norma-norma agama, tunduk terhadap hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat.

e. Berbudaya : diartikan masyarakat Kalurahan Patalan selalu menjunjung tinggi nilai-nilai luhur adat istiadat setempat dan mampu menerapkan sikap yang mencerminkan budaya adiluhung.

Visi Kalurahan Patalan mendukung Visi Pemerintah Kabupaten Bantul yaitu "Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang harmonis, sejahtera dan berkeadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam bingkai NKRI yang ber-Bhinneka Tunggal Ika".

2. Misi

Dalam mewujudkan visi diatas maka disusun misi, sebagai pedoman kerja untuk menuju kesejahteraan. Adapun misi dimaksud adalah sebagai berikut :

a. mengembangkan sikap disiplin dan ketertiban umum dalam kehidupan masyarakat yang bertujuan untuk :
   1). Menanamkan sikap disiplin bagi perangkat kalurahan.
   2). Menumbuhkan sikap disiplin dalam kehidupan masyarakat.
   3). Mewujudkan ketertiban umum untuk meningkatkan rasa aman dan damai.
   4). Mewujudkan sistem pemerintahan melalui peningkatan tanggungjawab dan daya tanggap Pemerintah, seluruh lapisan masyarakat dalam suatu kerangka menciptakan Pemerintahan yang efektif, efisien, bersih dan bebas KKN.

   Sedangkan yang menjadi sasaran dari misi ini adalah sebagai berikut :

   1). meningkatnya sikap disiplin bagi perangkat kalurahan dalam bekerja, sehingga bertujuan memberikan pelayanan yang berkualitas bagi masyarakat dapat terwujud.
   2). Meningkatnya kedisiplinan warga dalam kehidupan sehari-hari, sehingga ketaatan warga terhadap hukum maupun norma lainnya dapat terwujud.
   3). Terciptanya ketertiban dan kerukunan hidup dalam kehidupan bermasyarakat.
   4). Meningkatkan tata kelola pemerintahan kalurahan sehingga responsif terhadap kebutuhan masyarakat serta

dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka guna mewujudkan pelayanan yang profesional.

5). Meningkatkan kualitas layanan dengan memastikan terciptanya proses pelayanan prima dengan biaya yang terjangkau dengan mengacu kepada Standar Pelayanan Minimal (SPM) serta dengan menerapkan sistem manajemen mutu.

b. Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat baik secara lahir maupun batin juga kesehatan lingkungan yang bertujuan untuk:

1). Masyarakat yang sehat lahir dan batin sehingga dapat menjalani kehidupan yang berkualitas
2). Kesehatan lingkungan yang terjaga

Adapun yang menjadi sasaran dari misi kedua tersebut adalah sebagai berikut :

1). Menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk senantiasa menerapkan pola hidup sehat
2). Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk selalu menjaga lingkungan yang bersih dan sehat
3). Meningkatkan akses layanan kesehatan masyarakat dan kegiatan kegiatan di bidang pembinaan kesehatan
4). Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana kesehatan

c. Mengembangkan sumber daya manusia yang bermutu dengan berbasis pada nilai-nilai agama, ilmu pengetahuan, teknologi dan budaya serta mendorong majunya bidang pendidikan baik formal maupun non-formal yang mudah diakses dan dinikmati seluruh warga masyarakat yang bertujuan untuk:

1). Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan taraf pendidikan dan penguasaan teknologi.
2). Menumbuhkan sikap kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana dan kondisi kegawat daruratan yang lain.
3). Memantapkan fungsi dan peran agama dalam pembangunan.
4). Memantapkan program pendidikan formal maupun non-formal.

5). Memantapkan fungsi perempuan dalam pembangunan desa terkait peran pentingnya dalam kehidupan sebagai ujung tombak terhadap pemahaman tentang kebutuhan sosial dasar meliputi kegiatan di bidang ekonomi, kesehatan dan pendidikan
6). Memantapkan fungsi pemuda dalam pembangunan desa terkait peran pentingnya dalam kehidupan sebagai ujung tombak terhadap pemahaman tentang pembangunan sesuai perkembangan teknologi

Adapun yang menjadi sasaran dari misi tersebut adalah sebagai berikut:

1). Meningkatnya akses masyarakat terhadap layanan pendidikan yang berkualitas serta meningkatnya penguasaan masyarakat atas teknologi tepat guna.
2). Terselenggaranya sistem jaring pengaman sosial bagi masyarakat yang rentan secara ekonomi, sehingga ketahanan pangan, kesehatan dan pendidikannya tidak terancam.
3). Meningkatnya respon pemerintah dan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana dan kondisi kegawatdaruratan yang lain.
4). Meningkatnya kesadaran beragama untuk mewujudkan kerukunan antar umat beragama.
5). Memberikan akses bagi terselenggaranya pendidikan formal dan non-formal.
6). Memberikan akses bagi Organisasi Karang Taruna dan PKK atau organisasi perempuan lain untuk berperan dalam pembangunan kalurahan.

d. Meningkatkan perekonomian masyarakat dengan optimalisasi sektor pertanian, perikanan dan perdagangan yang bertujuan untuk :

1). Meningkatkan peran serta petani dan pengembangan program usaha tani untuk mencapai mutu produksi pangan dan ketersediaan pangan yang optimal.
2). Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan dan pengelolaan sektor jasa perdagangan.
3). Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendukung ekonomi.
4). Mewujudkan jaring pengaman sosial bagi warga masyarakat yang rentan secara ekonomi.

Adapun yang menjadi sasaran dari misi tersebut adalah sebagai berikut :

1). Meningkatkan produksi bahan pangan, pertanian dan perikanan serta meningkatkan akses atas sarana dan prasarana produksi pertanian.
2). Pemberian modal bagi para pelaku usaha kecil.
3). Meningkatnya sarana dan prasarana ekonomi antara lain pasar, kios, jalan dan lain-lain sehingga terwujudnya kawasan strategis sebagai tempat pertumbuhan ekonomi baru.
4). Terselenggaranya sistem jaring pengaman sosial bagi masyarakat yang rentan secara ekonomi, sehingga ketahanan pangan, kesehatan dan pendidikannya tidak terancam.

e. Membangun solidaritas dan komunikasi yang baik antar tokoh masyarakat dan semua komponen masyarakat dalam partisipasi membangun desa yang berlandaskan moral, serta menjunjung tinggi gotong royong dan nilai-nilai adat istiadat yang bertujuan untuk :
   1). Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kelestarian seni budaya dan tradisi lokal yang lainnya.
   2). Mewujudkan kerjasama dengan lembaga non pemerintah baik lembaga swadaya masyarakat maupun swasta.

Adapun yang menjadi sasaran dari misi tersebut adalah :

1). Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk melestarikan budaya setempat.

2). Terselenggarannya event-event seni budaya dan tradisi lokal lainnya.
3). Terwujudnya kerjasama yang strategis dengan seluruh LKD dan tokoh masyarakat, guna terwujudnya program pembangunan di segala bidang.
4). Terwujudnya kerjasama program pemberdayaan dengan lembaga- lembaga non pemerintah/LSM.
5). Terwujudnya kerjasama yang strategis dengan lembaga swasta untuk meningkatkan akses masyarakat atas modal ataupun pasar.

Untuk mencapai misi Kalurahan Patalan, maka nilai-nilai yang harus di junjung tinggi adalah akuntabilitas, partisipatif, transparan, demokratis, efektif dan efisien, dengan penjelasan sebagai berikut :

a. Akuntabilitas
   Kewajiban Pemerintah Kalurahan Patalan dalam setiap program kegiatan yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan dapat dilaksanakan tepat waktu tepat sasaran dandapat dipertanggungjawabkan.
b. Partisipatif
   Setiap anggota masyarakat Patalan mempunyai hak untuk berperan aktif dalam pembangunan dengan prinsip dari, oleh dan untuk masyarakat. Oleh karenanya setiap proses pembangunan masyarakat harus dilibatkan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan sampai pada pemeliharaan.
c. Transparan
   Adanya sifat keterbukaan Pemerintah Kalurahan Patalan dengan batas-batas kewajaran dalam rangka meningkatkan kepercayaan masyarakat.

d. Demokratis

Masyarakat diberi kebebasan dalam mengemukakan pendapat dan menghargai setiap pendapat sehingga roh dari demokrasi di Kalurahan Patalan bisa terwujud.

e. Efektif dan efisien

Mengedepankan hasil yang optimal dengan mekanisme yang efektif dan efisien sehingga berhasil guna dan berdaya guna.

2.2. Gambaran Umum Sosial Budaya

Kalurahan Patalan adalah Kalurahan yang berada dalam wilayah Kapanewon Jetis, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Patalan memiliki luas wilayah 565,040 Ha yang dibagi menjadi 20 Padukuhan, yaitu :

1. Bakulan Kulon
2. Bakulan Wetan
3. Ngaglik
4. Tanjung Lor
5. Jetis
6. Tanjung karang
7. Gelangan
8. Gaduh
9. Patalan
10. Karangasem
11. Panjangjiwo
12. Gerselo
13. Sulang Lor
14. Sulang Kidul
15. Kategan
16. Dukuh Sukun
17. Bobok
18. Boto
19. Butuh
20. Ketandan

Penduduk Kalurahan Patalan pada Tahun 2025 mencapai berjumlah 12.396 jiwa yang terdiri dari penduduk laki-laki berjumlah 6.173 jiwa dan penduduk perempuan berjumlah 6.223 jiwa. Pada tahun 2026 Semester 1 ini mengalami peningkatan jumlah penduduk sebanyak 12.379 jiwa yang terdiri dari penduduk laki-laki berjumlah 6.163 jiwa dan penduduk perempuan berjumlah 6.216 jiwa. Dari keseluruhan jumlah penduduk tersebut, Kalurahan Patalan memiliki 4.613 kepala keluarga dengan sebanyak 3.553 keluarga dikepalai oleh laki-laki dan sebanyak 1.060 keluarga dikepalai oleh perempuan.

Tabel 2.1 Jumlah Penduduk Kalurahan Patalan

Tahun	Laki-laki (Jiwa)	Perempuan (Jiwa)	Jumlah (Jiwa)
2025	6.173	6.223	12.396
2026	6.163	6.216	12.379

Sumber : Data Bagian Jagabaya diolah 2026.

Dari data di atas dapat dilihat bahwa Kalurahan Patalan mengalami peningkatan kepadatan penduduk sebesar 2.190,82 jiwa/km^2. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk faktor demografi (kelahiran, kematian, dan migrasi), faktor ekonomi (tingkat upah dan ketersediaan pekerjaan), serta faktor fisiografis dan sosial budaya.

Dampak dari kepadatan penduduk ini antara lain meningkatnya alih fungsi lahan, meningkatnya pengangguran, persaingan yang ketat di dunia kerja, penurunan kualitas lingkungan, dan gangguan stabilitas keamanan. Alih fungsi lahan pertanian terjadi karena semakin pesatnya pertambahan penduduk yang menyebabkan masalah daya dukung lingkungan menjadi semakin terbatas, dan akan berdampak pada peningkatan alih fungsi lahan pertanian menjadi permukiman. Kebijakan kependudukan perlu mempertimbangkan komposisi penduduk menurut kelompok usia, di mana ada perbedaan perlakuan terhadap kelompok usia produktif dan non produktif. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), kelompok usia produktif dalam rentang usia 15-64 tahun sedangkan non produktif dalam rentang usia 0-14 tahun dan 65 keatas.

Gambar 2.1 Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur

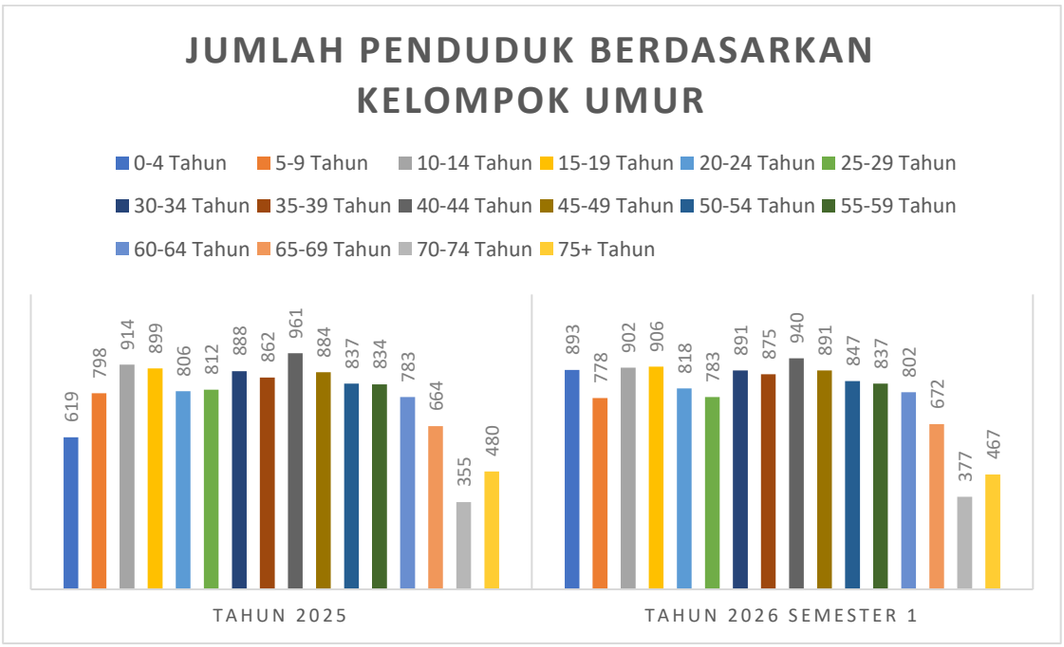

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2026

Berdasarkan data diatas kelompok usia produktif di Kalurahan Patalan di tahun 2025 sebanyak 8.566 jiwa mengalami kenaikan di semester 1 tahun 2026 menjadi 8.590 jiwa. Meningkatnya jumlah penduduk usia produktif ini dapat menjadi peluang dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi, inovasi dan kewirausahaan di masyarakat. Dampak negatifnya tingkat pengangguran naik, kesenjangan sosial dan ekonomi, peningkatan kriminalitas dan infraktruktur.

Kalurahan Patalan berupaya menurunkan jumlah pengangguran di wilayah Kalurahan Patalan dan meningkatkan daya saing masyarakat di dunia kerja dengan cara membuat pelatihan keterampilan, bekerjasama dengan Dinas Ketenagakerjaan untuk untuk memberikan sosialisasi dan pengarahan karier dan pihak swasta yang sedang membutuhkan tenaga kerja sehingga kesejahteraan masyarakat meningkat. Kalurahan juga membentuk jaga warga dusun dan kalurahan bekerjasama dengan Babinsa dan Babinkamtibnas Kalurahan untuk menjaga keamanan masyarakat serta meminimalisir tindakan kriminalitas.

Tabel 2.2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Agama

No	Jenis Agama	Jenis Kelamin		Jumlah (Jiwa)
		Laki-laki	Perempuan	
1	Islam	6.016	6059	12.075
2	Kristen	98	106	204
3	Katholik	48	51	99
4	Hindu	0	0	0
5	Bunda	0	0	0
6	Khonghucu	0	0	0
7	Kepercayaan	1	0	1
Jumlah		6.163	6.216	12.379

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2026

Berdasarkan data diatas Mayoritas penduduk Kalurahan Patalan memeluk agama Islam dan secara konsisten menjunjung tinggi nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari, merayakan hari-hari besar sesuai dengan syariat Islam. Di samping itu, masyarakat Patalan dikenal memiliki toleransi tinggi, menghormati kepentingan serta hari-hari besar agama lain, menciptakan kerukunan antar umat beragama yang harmonis.

Kalurahan Patalan memberikan perlindungan dan pemberdayaan untuk masyarakatnya penyandang disabilitas. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Ketika hambatan dihilangkan, mereka mampu memberikan kontribusi signifikan dalam berbagai bidang seni, olahraga, teknologi, pendidikan, hingga dunia kerja. Dalam tabel dibawah ini, penyandang disabilitas di tahun 2026 berjumlah 69 orang.

Tabel 2.3 Data Penyandang Disabilitas Kalurahan Patalan

No	Jenis Disabilitas	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	Disabilitas Fisik	5	4	9
2	Disabilitas Netra/Buta	2	1	3
3	Disabilitas Rungu/Wicara	6	5	11

No	Jenis Disabilitas	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
4	Disabilitas Mental/Jiwa	18	16	34
5	Disabilitas Mental dan Jiwa	2	3	5
6	Disabilitas Lainnya	3	4	7
Jumlah		36	33	69

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, diolah 2026

Dalam mewujudkan kesamaan hak dan kesempatan bagi Penyandang Disabilitas untuk hidup maju dan berkembang secara adil dan bermartabat, dan tanpa diskriminasi, diperlukan peraturan yang menjamin pelindungan dan pemberdayaan Penyandang Disabilitas, melalui program pembangunan yang inklusif, Kalurahan Patalan menyediakan fasilitas dan dukungan yang dibutuhkan oleh warga disabilitas untuk berpartisipasi aktif dalam masyarakat. Kalurahan Patalan menetapkan Peraturan Kalurahan Patalan Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Perlindungan Disabilitas dan membentuk Kelompok Difabel Kalurahan (KDK) Yuda Karsa yang berperan sebagai pendorong dan membangun inklusifitas difabel di semua sektor kehidupan, mendorong penguatan pemenuhan hak-hak difabel, mendorong dan membangun terwujudnya kemandirian dan kesejahteraan difabel dan sarana difabel terlibat dalam perencanaan pembangunan. Kalurahan Patalan juga Membangun akses ramah disabilitas di kantor Kalurahan Patalan dan mengalokasikan anggaran untuk kegiatan KDK dalam APBKal Patalan setiap tahunnya.

Dari segi budaya, masyarakat kalurahan Patalan secara turun-temurun berpegang teguh pada adat dan budaya Jawa yang adiluhung. Hal terlepas dari pengaruh adat dan budaya Jawa Kraton Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat yang masih melekat kuat di masyarakat. Masyarakat menjunjung tinggi kelestarian lingkungan, yang terlihat dari berbagai tradisi dan kegiatan yang berkaitan dengan alam. Pentingnya menjaga hubungan harmonis antara manusia dan alam menjadi landasan utama dalam budaya DIY, tercermin dalam berbagai ritual, pengelolaan sampah, dan upaya penghijauan. Rasa kekelurgaan dan sifat kegotong-royongan

begitu kental dalam kehidupan sehari-hari. Saling tolong menolong antara sesama warga terlihat secara langsung terutama pada saat ada warga yang melakukan hajatan. Maka tetangga turun tangan membantu tanpa dimintai bantuan, tanpa bayaran dan semua dilakukan secara sukarela.

Budaya dan tradisi yang terus dilestarikan dari generasi ke generasi yakni upacara ritual tradisional sebagai sarana mengungkapkan rasa syukur atas limpahan rejeki dari Tuhan dan juga sebagai penghormatan kepada leluhur. Upacara ritual yang diselenggarakan dikenal dengan upacara Merti Dusun di Dusun Kategan, Sulang Kidul dan Gelangan. Upacara ini diadakan sebagai simbol rasa syukur masyarakat kepada sang Pencipta atas apa yang telah diberikan. Karunia tersebut dapat berupa rejeki yang melimpah, keselamatan, ketentraman, serta keselarasan hidup di dunia. Kesenian tradisional seperti wayang di Dusun Panjangjiwo, jathilan di Dusun Bakulan Kulon dan Tanjung Lor, seni musik tradisional dari Gejlog Lesung di Dusun Gelangan, karawitan, tari-tarian masih terus dilestarikan oleh masyarakat Kalurahan Patalan.

2.3. Gambaran Umum Kemiskinan

Kemiskinan merupakan permasalahan kompleks dan krusial dalam pembangunan di Kabupaten Bantul. Kemiskinan adalah keadaan dimana terjadi ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan dan kesehatan.

Gambar 2.2 Tingkat Kemiskinan di D.I. Yogyakarta, Maret 2019 - Maret 2026

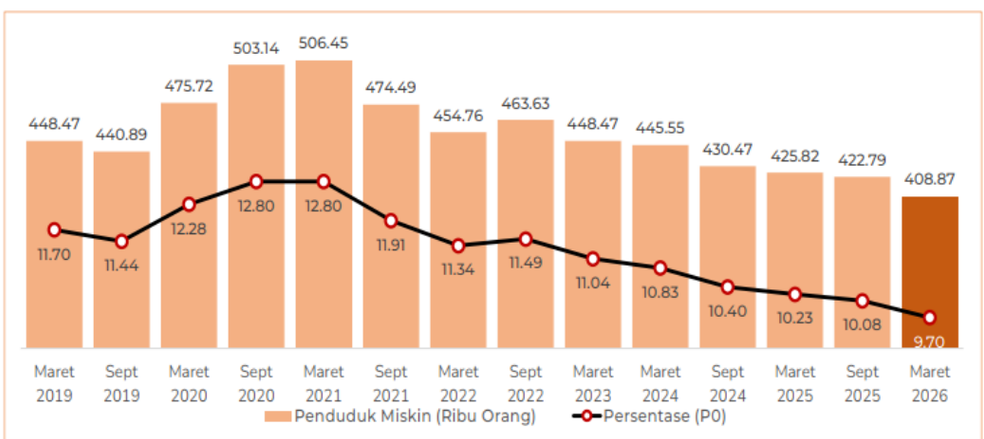

Sumber: Diolah dari data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2019–Maret 2026

Pada Gambar diatas persentase penduduk miskin pada Maret 2026 sebesar 9,70 persen dan turun 0,38 persen poin dibandingkan September 2025. Jumlah penduduk miskin pada Maret 2026 mencapai 408,87 ribu orang, berkurang sebanyak 13,9 ribu orang dibandingkan September 2025. Jika dibandingkan dengan Maret 2025, jumlah penduduk miskin pada Maret 2026 berkurang sebesar 16,9 ribu orang. Persentase penduduk miskin perkotaan pada Maret 2026 sebesar 9,55 persen dan turun 0,44 persen poin dibandingkan September 2025. Persentase penduduk miskin perdesaan pada Maret 2026 sebesar 10,18 persen dan turun 0,19 persen poin dibandingkan September 2025. Jumlah penduduk miskin di perkotaan pada Maret 2026 sebanyak 307,30 ribu orang, berkurang sebanyak 11,8 ribu orang dibandingkan September 2025. Sementara itu, jumlah penduduk miskin perdesaan pada Maret 2026 sebanyak 101,57 ribu orang atau berkurang 2,1 ribu orang dibandingkan September 2025. Garis Kemiskinan pada Maret 2026 tercatat sebesar Rp672.756,00/kapita/bulan dengan komposisi Garis Kemiskinan Makanan sebesar Rp491.327,00 (73,03 persen) dan Garis Kemiskinan Non Makanan sebesar Rp181.429,00 (26,97 persen). Pada Maret 2026, secara rata-rata rumah tangga miskin di D.I. Yogyakarta memiliki 4,15 orang anggota rumah tangga. Apabila ditinjau secara rumah tangga, maka Garis Kemiskinan rumah tangga mencapai Rp2.791.937,00/rumah tangga/bulan.

Beberapa faktor yang berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan selama periode September 2025–Maret 2026 antara lain adalah:

1. Pertumbuhan ekonomi D.I. Yogyakarta pada triwulan I-2026 terhadap triwulan I-2025 sebesar 5,84 persen (y-on-y). Ekonomi D.I. Yogyakarta tumbuh positif dan merupakan pertumbuhan ekonomi tertinggi ke-tiga di Pulau Jawa.
2. Inflasi Maret 2025 relatif terkendali yaitu sebesar 4,08 persen (y-on-y).
3. Nilai Tukar Petani (NTP) pada Maret 2026 sebesar 109,70 persen yang menunjukkan indeks harga yang diterima oleh petani lebih tinggi dibandingkan indeks harga yang dibayar oleh petani.
4. Pertumbuhan pengeluaran konsumsi rumah tangga tumbuh sebesar 5,02 persen pada Triwulan I-2026 (y-on-y).

5. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada Februari 2026 sebesar 3,05 persen menunjukkan adanya penurunan sebesar 0,13 persen poin dibandingkan Februari 2025 (3,18 persen).
6. Berbagai program bantuan sosial telah dikucurkan oleh Pemerintah Pusat selama periode Januari-Maret 2026, antara lain Bantuan Pangan Beras, BPNT, PKH, PIP, MBG, dan BLT Dana Desa. Berbagai program pengentasan kemiskinan juga dikucurkan oleh Pemerintah Daerah D.I. Yogyakarta, seperti Jaminan Sosial Lanjut Usia/JSLU dll.

Berdasarkan data Sidamesra, Penduduk Kalurahan Patalan sudah terdaftar sebanyak 3.797 Kepala Keluarga dan 10.517 Jiwa yang dibagi menjadi :

Tabel 2.4 Kategori Penduduk Kalurahan Patalan Berdasarkan Sidamesra

No	Kategori	Kepala Keluarga	Jiwa
1	Sangat Miskin	7	10
2	Miskin	869	1.980
3	Rentan Miskin	2.621	7.579
4	Mampu	292	938
5	Kosong	8	10
Jumlah		3.797	10.517

Sumber : Aplikasi Sidamesra diolah 2026.

Sidamesra atau Sistem Informasi Data Kemiskinan dan Kesejahteraan merupakan sistem informasi tingkat Kabupaten Bantul yang berfokus pada upaya ketepatan pemberian program dan bantuan sosial dan ekonomi. Aplikasi ini berfungsi untuk mengukur kondisi sosial ekonomi secara individu atau Kepala Keluarga. Dalam data diatas baru terdata 3.797 Kepala Keluarga, masih ada 798 Kepala Keluarga dan 18 pendataan yang belum selesai karena pendataan dari petugas yang masih berjalan. Diharapkan diakhir tahun 2026, pendataan sudah selesai.

Dalam tabel diatas, mayoritas penduduk Kalurahan Patalan masuk di kategori Rentan Miskin. Rentan Miskin merujuk pada keluarga atau individu yang berada di atas garis kemiskinan, namun memiliki risiko tinggi untuk jatuh miskin. Mereka memiliki

penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar, tetapi kondisi ekonomi mereka rentan terhadap fluktuasi harga kebutuhan pokok, kehilangan pekerjaan, atau kejadian tak terduga lainnya. Sedangkan 7 Kepala Keluarga masuk di kategori sangat miskin yang merujuk pada keluarga atau individu yang berada pada kondisi paling rendah dalam hal pemenuhan kebutuhan dasar dan 868 Kepala Keluarga masuk kategori miskin, yaitu keluarga atau individu yang berada di bawah garis kemiskinan. Mereka masih dapat memenuhi sebagian kebutuhan dasar, namun masih menghadapi kesulitan dalam pemenuhan kebutuhan secara keseluruhan.

Dalam data rekap DTSEN (Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional) Kalurahan Patalan tahun 2026 sudah terdaftar 4.650 Kepala Keluarga dengan 12.473 jiwa anggota keluarga, dibagi menjadi 10 kelompok Desil 1 sampai dengan Desil 10. Desil adalah pembagian kelompok masyarakat berdasarkan tingkat kesejahteraan, dimulai dari yang paling miskin hingga paling sejahtera. DESIL terbagi menjadi 10 tingkat, dengan rincian sebagai berikut:

1. Desil 1: rumah tangga dalam kelompok 10% terendah. Kelompok ini memiliki tingkat ekonomi yang paling tidak sejahtera atau fakir miskin.
3. Desil 2: rumah tangga dalam kelompok antara 10-20% terendah. Kelompok ini mempunyai tingkat ekonomi kurang sejahtera atau miskin.
4. Desil 3: rumah tangga dalam kelompok antara 20-30% terendah dan seterusnya. Kelompok ini masuk dalam daftar masyarakat hampir miskin
5. Desil 4: rumah tangga dalam kelompok 31-40% dengan tingkat kesejahteraan rentan miskin.
6. Desil 5 : rumah tangga dalam kelompok 41-50% dengan tingkat kesejahteraan pas-pasan atau berada di batas bawah kelas menengah/menengah ke bawah.
7. Desil 6-10 : rumah tangga dalam kelompok masyarakat kelas menengah hingga atas yang dinilai sudah lebih mandiri secara ekonomi. Desil 10 sendiri berada di posisi 10% masyarakat yang paling sejahtera.

Gambar 2.3 Rekap DTSEN Patalan Tahun 2026

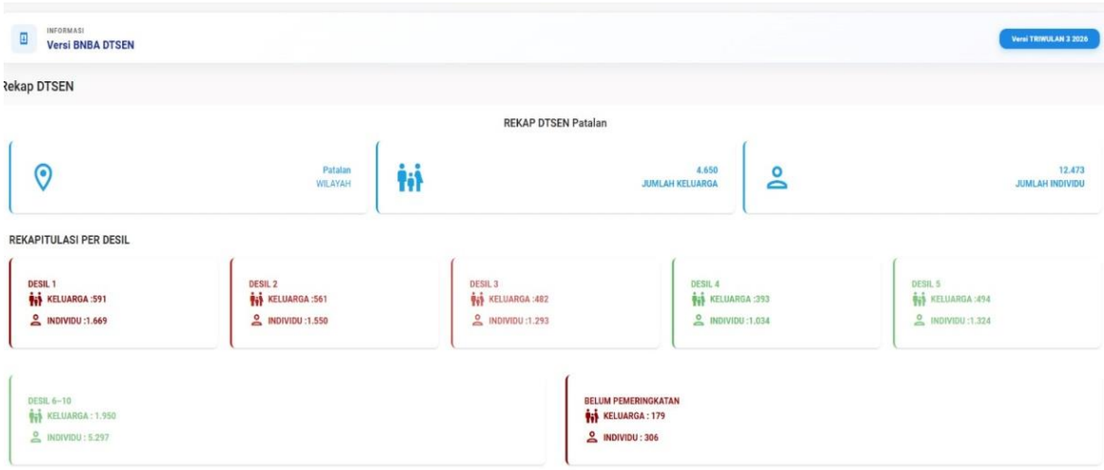

Sumber : https://siks.kemensos.go.id/diolah 2026.

Pemantauan status gizi balita merupakan indikator vital dalam evaluasi kesehatan masyarakat di tingkat lokal. Berdasarkan hasil validasi dan pendataan yang dilaksanakan pada bulan Juli 2026 di Kalurahan Patalan, teridentifikasi secara akumulatif sebanyak 40 anak yang mengalami kondisi stunting. Temuan data kuantitatif ini menjadi basis bukti empiris untuk mengevaluasi efektivitas program intervensi gizi yang telah berjalan serta merumuskan langkah penanganan spesifik guna menurunkan prevalensi stunting di Kalurahan Patalan.

Tabel 2.5 Data Stunting di Kalurahan Patalan per September 2026

No	Nama	Posyandu	Usia Saat Ukur	Tanggal Pengukuran	Berat (Kg)	Tinggi (cm)	BB/U	TB/U	BB/TB
1	Arfan Fayyaz Aryasetya	Mawar Merah Gerselo	**4** Tahun - **9** Bulan - **30** Hari	9/8/2026	12,1	99	Sangat Kurang	Pendek	Gizi Kurang
2	Aldo Aji Santoso	Kemuning Bobok	**4** Tahun - **9** Bulan - **23** Hari	9/15/2026	13	97	Kurang	Pendek	Gizi Baik
3	Fauzan Setyanto	Melati Sulang Lor	**4** Tahun - **9** Bulan - **22** Hari	9/22/2026	13,4	99	Kurang	Pendek	Gizi Baik
4	Aretha Nian Az Zaida	Mawar Dukuh Sukun	**4** Tahun - **8** Bulan - **27** Hari	9/22/2026	13	94,5	Kurang	Pendek	Gizi Baik
5	Elshanum Almahyra Mecca	Melati Sulang Lor	**4** Tahun - **4** Bulan - **28** Hari	9/22/2026	12,8	94	Kurang	Pendek	Gizi Baik
6	Al-Kahfi Dio Putra Yudistira	Seroja Jetis	**4** Tahun - **3** Bulan - **17** Hari	9/3/2026	11,4	92,5	Sangat Kurang	Pendek	Gizi Kurang
7	Aliyana Zulfani Afifah	Teratai Putih Gaduh	**4** Tahun - **3** Bulan - **15** Hari	9/10/2026	11,3	88,5	Kurang	Sangat Pendek	Gizi Baik
8	Ahmad Fadil Al-Fathoni	Anggrek Bulan Kategan	**4** Tahun - **11** Bulan - **30** Hari	9/19/2026	14,2	97	Normal	Pendek	Gizi Baik

No	Nama	Posyandu	Usia Saat Ukur	Tanggal Pengukuran	Berat (Kg)	Tinggi (cm)	BB/U	TB/U	BB/TB
9	Christian Marshelino Anggoro	Camelia Ngaglik	**4** Tahun - **1** Bulan - **8** Hari	9/17/2026	12,85	93	Kurang	Pendek	Gizi Baik
10	Ramanditya Wijaya	Cempaka Sulang Kidul	**4** Tahun - **0** Bulan - **27** Hari	9/8/2026	11,95	95	Kurang	Pendek	Gizi Kurang
11	Nayla Putri Nur Afifah	Camelia Ngaglik	**4** Tahun - **0** Bulan - **2** Hari	9/17/2026	13,4	91	Normal	Pendek	Gizi Baik
12	Rafisqy Husein Najib	Citra Ngupit	**4** Tahun - **0** Bulan - **11** Hari	9/11/2026	10,8	93	Sangat Kurang	Pendek	Gizi Kurang
13	Rafasya Hasan Najib	Citra Ngupit	**4** Tahun - **0** Bulan - **11** Hari	9/11/2026	11,8	94,5	Kurang	Pendek	Gizi Kurang
14	Adeeva Khairunissa	Kemuning Bobok	**3** Tahun - **9** Bulan - **25** Hari	9/9/2026	10,7	92	Kurang	Pendek	Gizi Kurang
15	Naufal Maulana Labib Zain	Melati Sulang Lor	**3** Tahun - **9** Bulan - **19** Hari	9/22/2026	11,55	86	Kurang	Sangat Pendek	Gizi Baik
16	Muhammad Hafy Elramdan	Kemuning Bobok	**3** Tahun - **5** Bulan - **23** Hari	9/15/2026	11,4	91	Kurang	Pendek	Gizi Baik
17	Hamizan Ghani Khaizuran	Citra Ngupit	**3** Tahun - **5** Bulan - **19** Hari	9/29/2026	10,7	90,5	Kurang	Pendek	Gizi Kurang
18	Bintang Danindra Abhinara	Edelweis Bakulan Wetan	**3** Tahun - **4** Bulan - **9** Hari	9/7/2026	12,1	91	Normal	Pendek	Gizi Baik
19	Fany Dwi Rahmawati	Cempaka Sulang Kidul	**3** Tahun - **3** Bulan - **25** Hari	9/29/2026	11,6	89	Normal	Pendek	Gizi Baik
20	Myesha Arundaya Mughnii	Teratai Putih Gaduh	**3** Tahun - **3** Bulan - **14** Hari	9/10/2026	10,8	88	Kurang	Pendek	Gizi Baik
21	Auliaa Faizah	Cempaka Sulang Kidul	**3** Tahun - **10** Bulan - **26** Hari	9/11/2026	12,1	93	Kurang	Pendek	Gizi Baik
22	Aisyah Ummu Abdillah	Teratai Putih Gaduh	**3** Tahun - **10** Bulan - **17** Hari	9/1/2026	10,95	92,5	Kurang	Pendek	Gizi Kurang
23	Inara Ayunadira	Sakura Bakulan Kulon	**2** Tahun - **9** Bulan - **28** Hari	9/7/2026	9,7	84,5	Kurang	Pendek	Gizi Baik
24	Digdaya Asgara Mujadi Rustavano	Anggrek Bulan Kategan	**2** Tahun - **7** Bulan - **9** Hari	9/3/2026	9,2	80	Sangat Kurang	Sangat Pendek	Gizi Baik
25	Alfarisqi Shareef Hidayat	Kemuning Bobok	**2** Tahun - **7** Bulan - **20** Hari	9/15/2026	10,2	84	Kurang	Pendek	Gizi Baik
26	Kaivandra Garrel Arshaka	Wijaya Kusuma Panjangjiwo	**2** Tahun - **5** Bulan - **11** Hari	9/14/2026	10,5	82,5	Normal	Pendek	Gizi Baik
27	Muhammad Ubaidillah Ibrahim	Teratai Putih Gaduh	**2** Tahun - **5** Bulan - **10** Hari	9/1/2026	10,1	84,5	Kurang	Pendek	Gizi Baik
28	Grisella Maura Nandita	Melati Sulang Lor	**2** Tahun - **4** Bulan - **5** Hari	9/22/2026	9,2	78,5	Kurang	Sangat Pendek	Gizi Baik
29	Alfandy Riski Ramadhan	Seroja Jetis	**2** Tahun - **4** Bulan - **29** Hari	9/3/2026	9,5	83	Kurang	Pendek	Gizi Kurang
30	Ilham Pangestune Widodo	Teratai Putih Gaduh	**2** Tahun - **3** Bulan - **18** Hari	9/10/2026	10,35	82	Normal	Pendek	Gizi Baik
31	Arsyila Mecca Queenara	Edelweis Bakulan Wetan	**2** Tahun - **10** Bulan - **30** Hari	9/7/2026	10,65	85	Kurang	Pendek	Gizi Baik
32	Nayla Aulia Az Zahra	Mawar Merah Gerselo	**2** Tahun - **1** Bulan - **15** Hari	9/11/2026	8,45	78,5	Kurang	Pendek	Gizi Baik

No	Nama	Posyandu	Usia Saat Ukur	Tanggal Pengukuran	Berat (Kg)	Tinggi (cm)	BB/U	TB/U	BB/TB
33	Jeni Arianadewi	Kemuning Bobok	**1** Tahun - **8** Bulan - **9** Hari	9/15/2026	8,3	76	Kurang	Pendek	Gizi Baik
34	Zellora Ziva Elnaura	Melati Sulang Lor	**1** Tahun - **8** Bulan - **5** Hari	9/22/2026	7,8	74,5	Kurang	Pendek	Gizi Baik
35	Devanka Arsya Nendra Shankara	Edelweis Bakulan Wetan	**1** Tahun - **8** Bulan - **14** Hari	9/7/2026	8,45	78	Kurang	Pendek	Gizi Kurang
36	Cantika Aulia Putri Rahmadhani	Seroja Jetis	**1** Tahun - **5** Bulan - **22** Hari	9/3/2026	7,9	74,5	Kurang	Pendek	Gizi Baik
37	Nando Ravi Nasuha	Seroja Jetis	**1** Tahun - **2** Bulan - **23** Hari	9/3/2026	7,56	72	Kurang	Pendek	Gizi Baik
38	Kalandra Rahul Samudra Ahsan	Teratai Putih Gaduh	**1** Tahun - **11** Bulan - **25** Hari	9/10/2026	8,27	79	Kurang	Pendek	Gizi Kurang
39	Said Fatah	Kemuning Bobok	**1** Tahun - **10** Bulan - **12** Hari	9/15/2026	9	78	Kurang	Pendek	Gizi Baik
40	Aryan Azril Zafian	Teratai Putih Gaduh	**0** Tahun - **11** Bulan - **7** Hari	9/10/2026	7,9	69	Normal	Pendek	Gizi Baik
41	Iqbal Rayyan Malik	Anggrek Tanjung Lor	**0** Tahun - **11** Bulan - **11** Hari	9/16/2026	8,9	69,5	Normal	Pendek	Gizi Baik

Sumber : Kader Pembangunan Manusia Kalurahan Patalan diolah September 2026.

Pemerintah Kalurahan Patalan telah menyusun strategi anggaran yang sangat komprehensif dalam APBKalurahan sesuai hasil Rembug Stunting dengan fokus utama memperkuat intervensi kesehatan langsung (spesifik) dan fasilitas penunjangnya. Melalui penyelenggaraan Posyandu yang mencakup pemberian makanan tambahan, kelas ibu hamil, hingga penanganan khusus bagi balita gizi buruk, pemerintah desa berupaya memastikan kecukupan asupan nutrisi pada masa kritis pertumbuhan. Komitmen ini dipertegas dengan pengalokasian dana untuk pembangunan dan rehabilitasi sarana prasarana Posyandu serta Polindes, guna menjamin akses layanan kesehatan yang layak, nyaman, dan dekat bagi masyarakat.

Di sisi lain, anggaran ini juga menyasar akar masalah stunting melalui perbaikan pola asuh dan kesehatan lingkungan (intervensi sensitif). Program seperti Bina Keluarga Balita (BKB), penyuluhan kesehatan bagi kader dan warga, serta pembinaan Kampung KB dirancang untuk meningkatkan pemahaman orang tua mengenai pengasuhan yang tepat. Langkah preventif ini disempurnakan dengan gerakan kebersihan lingkungan, pengelolaan Rumah Kalurahan Sehat, dan Desa Siaga, yang bertujuan memutus mata

rantai penyakit infeksi akibat sanitasi buruk yang sering menjadi penyebab tidak langsung terhambatnya pertumbuhan anak.

Pemerintah Kalurahan Patalan merencanakan kegiatan untuk mengentaskan kemiskinan di Kalurahan Patalan setiap tahunnya, seperti meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan kesehatan, memberikan bantuan sosial yang tepat sasaran, mengembangkan program pemberdayaan masyarakat, dan memastikan ketersediaan infrastruktur dasar dan akses ke sumber daya.

Peningkatan kualitas SDM merupakan kunci keberhasilan pembangunan nasional dan daerah. Hal ini dapat disadari oleh karena manusia sebagai subyek dan obyek dalam pembangunan. Mengingat hal tersebut, maka pembangunan SDM diarahkan agar benar-benar mampu dan memiliki etos kerja yang produktif, terampil, kreatif, disiplin dan profesional. Disamping itu juga mampu memanfaatkan, mengembangkan dan menguasai ilmu dan teknologi yang inovatif dalam rangka memacu pelaksanaan pembangunan nasional. Kualitas sumberdaya manusia juga memiliki peranan penting dalam meningkatkan daya saing daerah dan perkembangan investasi di daerah. Pendidikan merupakan syarat utama yang harus ditempuh seseorang untuk dapat memasuki pasar kerja.

Pendidikan yang diperoleh baik dari sekolah maupun dari luar sekolah akan memberikan bekal pengetahuan dan ketrampilan, sehingga akan memudahkan penempatan seorang karyawan sesuai dengan kecakapannya. Tingkat pendidikan yang dimiliki seorang karyawan akan mempengaruhi pola pikir, sikap dan tindakan dalam menghadapi suatu permasalahan yang timbul khususnya dalam masalah pekerjaan. Orang yang mempunyai tingkat pendidikan yang lebih tinggi pada umumnya lebih cepat mengatasi masalah yang dihadapi, daripada orang yang tingkat pendidikannya lebih rendah. Pendidikan mempunyai fungsi untuk meningkatkan kualifikasi tenaga kerja agar dapat lebih produktif. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan produktivitas tenaga kerja karena pendidikan baik formal maupun non formal seseorang diharapkan memiliki kemampuan untuk lebih memahami dalam mengadaptasi perubahan-perubahan di lingkungan kerja dengan lebih cepat. Dari uraian di atas dapat

disimpulkan bahwa pendidikan baik formal maupun non formal akan berpengaruh positif terhadap peningkatan produktivitas kerja seorang karyawan dari segi kuantitas. Karyawan yang tingkat pendidikannya tinggi akan mempunyai ketrampilan dalam pelaksanaan kerja sehingga mengurangi kesalahan-kesalahan dalam pelaksanaan kerja.

Jumlah penduduk menurut jenjang Pendidikan di Kalurahan Patalan paling banyak adalah lulusan SLTA/Sederajat yaitu sebesar 3.872 jiwa atau 31%, kemudian tidak/belum sekolah menempati peringkat kedua sebesar 19% atau 2.321 jiwa, dari jumlah penduduk di Kalurahan Patalan.

Gambar 2.4 Jumlah Penduduk Menurut Jenjang Pendidikan

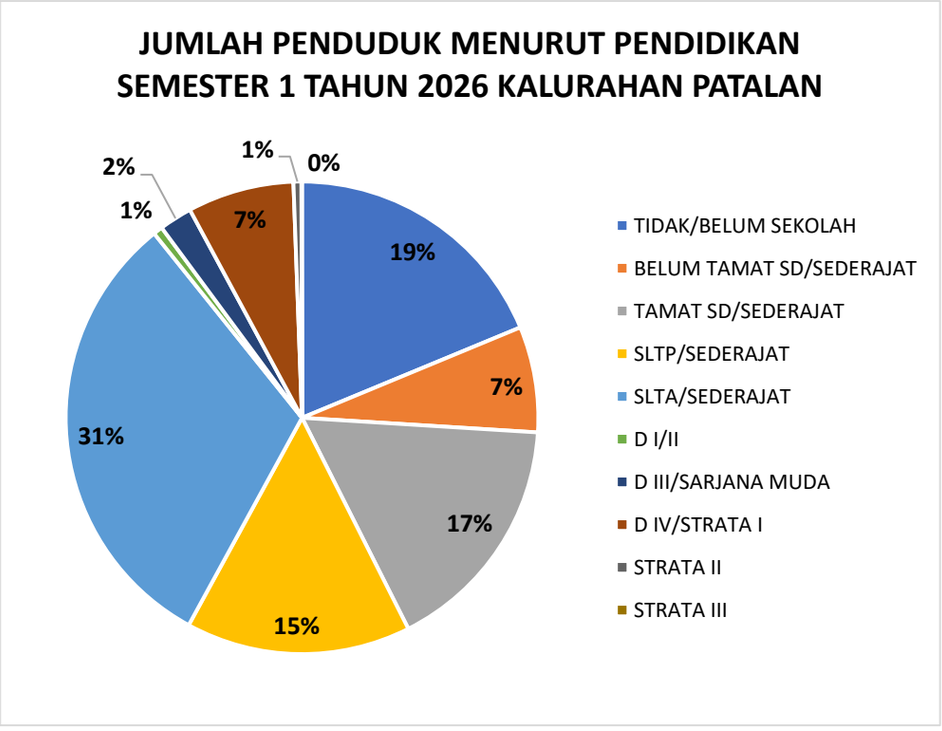

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2026

Peningkatan kualitas manusia tidak mungkin tercapai tanpa adanya jaminan hidup yang pasti untuk didapatkannya, dan peningkatan kualitas tenaga kerja serta perlindungan terhadap tenaga kerja harus disesuaikan dengan harkat dan martabat manusia.

Pemerintah Kalurahan Patalan mengalokasikan anggaran untuk penuntasan kemiskinan melalui kegiatan Rehab rumah tidak layak huni, Jambanisasi Keluarga Beresiko Stunting, Bantuan Langsung Tunai, Pemberian Makanan Tambah (PMT),

penyelenggaraan posyandu balita, remaja dan lansia, penyuluhan dan pelatihan bidang kesehatan, penyelenggaraan desa siaga, Kampung KB, penanganan stunting, Gerakan Kebersihan dan Kesehatan Lingkungan (PSN), Pengelolaan Rumah Kalurahan Sehat, Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB) beasiswa untuk keluarga miskin berprestasi dan pelatihan-pelatihan keahlian untuk meningkatkan kualitas SDM masyarakat Patalan serta pembangunan infrastruktur di Padukuhan.

2.4. Gambaran Umum Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator kemampuan suatu daerah dalam meningkatkan kapasitas produksi secara berkesinambungan. Perkembangan produksi barang dan jasa di suatu wilayah perekonomian pada tahun tertentu terhadap nilai tahun sebelumnya.

Pertumbuhan ekonomi yang positif juga menunjukkan bahwa kegiatan ekonomi di suatu daerah mengalami peningkatan. Hal ini secara tidak langsung mengindikasikan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut mengalami peningkatan pula.

Perekonomian Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku triwulan II-2026 mencapai Rp55,77triliun dan atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp34,52 triliun.

Ekonomi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) triwulan II-2026 (q-to-q) tumbuh sebesar 1,12 persen. Pertumbuhan terjadi pada hampir seluruh lapangan usaha, kecuali Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yang terkontraksi sebesar 18,16 persen. Lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan tertinggi adalah Konstruksi sebesar 9,24 persen; diikuti Jasa Perusahaan sebesar 7,26 persen; serta Jasa Lainnya sebesar 6,22 persen. Sementara itu, Industri Pengolahan dan Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum yang memiliki peran dominan tumbuh masing-masing sebesar 0,12 persen dan 1,94 persen.

Gambar 2.5 Pertumbuhan PDRB Beberapa Lapangan Usaha (Q-to-Q) (persen), Triwulan II-2025, Triwulan I-2026, dan Triwulan II-2026

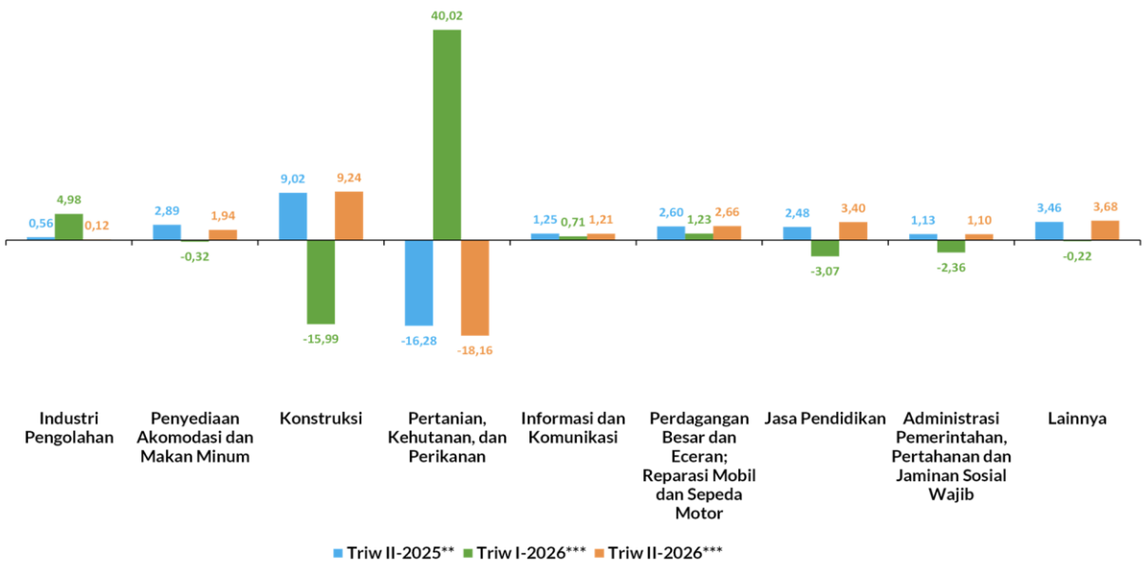

Sumber : BPS Provinsi D.I. Yogyakarta

Ekonomi DIY triwulan II-2026 terhadap triwulan II-2025 tumbuh sebesar 5,75 persen (*y-on-y*). Dari sisi produksi, Lapangan Usaha Pengadaan Listrik dan Gas mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 13,98 persen. Sementara dari sisi pengeluaran. Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P) mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 18,34 persen.

Ekonomi DIY semester I-2026 terhadap semester I-2025 mengalami pertumbuhan sebesar 5,80 persen (*c-to-c*). Dari sisi produksi, Lapangan Usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 11,07 persen. Sementara dari sisi pengeluaran, Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P) mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 19,18 persen.

Struktur ekonomi DIY triwulan II-2026 didominasi oleh Industri Pengolahan; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; serta Konstruksi dengan kontribusi masing-masing sebesar 11,76 persen; 11,48 persen; dan 9,73 persen. Sementara dari sisi pengeluaran, Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga masih mendominasi dengan kontribusi 62,29 persen, diikuti oleh Pembentukan Modal Tetap Bruto 35,80 persen, dan Pengeluaran Konsumsi Pemerintah 15,14 persen.

Kalurahan Patalan berdasarkan letak geografis berada di wilayah timur Kabupaten Bantul dan sebelah selatan pusat kota Yogyakarta. Jarak tempuh ke Ibu Kota Kapanewon Jetis sejauh 6 km dengan lama tempuh 25 menit. Jarak tempuh ke Ibu Kota Kabupaten Bantul sejauh 7 km dengan lama tempuh sekitar 30 menit. Jarak tempuh

ke Ibu Kota Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sejauh 18 km dengan waktu tempuh 60 menit.

Berdasarkan topografi Kalurahan Patalan terletak di ketinggian 8 mdpl dengan iklim tropis rata-rata suhu 28°C, suhu maksimum bisa mencapai 32°C. Warna sebagian besar tanah berwana kuning dan memiliki tekstur debuan dengan tingkat kemiringan tanah 535 derajat. Wilayah Kalurahan Patalan cocok untuk pertanian, perikanan, perternakan dengan luas sawah mencapai 320,76 Ha.

Tabel 2.6 Jenis Pekerjaan Penduduk Kalurahan Patalan Semester 1 Tahun 2026

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah	
		Laki-laki	Perempuan
1	Buruh Harian Lepas	1689	1219
2	Belum/Tidak Bekerja	1198	1274
3	Pelajar/Mahasiswa	1113	1054
4	Mengurus Rumah Tangga	1	996
5	Karyawan Swasta	780	499
6	Aparatur Sipil Negara (ASN)	122	137
7	Wiraswasta	561	427
8	Buruh Tani/Perkebunan	175	194
9	Pensiunan	136	86
10	Petani/Pekebun	79	61
11	Guru	25	80
12	Kepolisian RI (POLRI)	64	6
13	Pedagang	25	40
14	Anggota Lembaga Tinggi Lainnya	8	11
15	Tentara Nasional Indonesia (TNI)	48	2
16	Karyawan Honorer	16	23
17	Kepala Desa	1	0
18	Perangkat Desa	19	6
19	Perawat	6	19
20	Perdagangan	6	17
21	Karyawan BUMN	11	4
22	Karyawan BUMD	3	3
23	Konsultan	0	1
24	Seniman	10	2
25	Sopir	6	0
26	Dokter	4	7
27	Pembantu Rumah Tangga	0	8
28	Bidan	0	6
29	Mekanik	6	0
30	Apoteker	0	6
31	Peternak	5	1
32	Industri	3	0
33	Penata Rias	0	1
34	Dosen	2	1
35	Pendeta	2	0
36	Penerjemah	1	1
37	Transportasi	1	1
38	Ustadz/Mubaligh	1	0

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah	
		Laki-laki	Perempuan
39	Arsitek	0	1
40	Tukang Jahit	3	11
41	Tukang Kayu	2	0
42	Tukang Cukur	1	1
43	Tukang Listrik	1	0
44	Tukang Batu	17	0
45	Tukang Las/Pandai Besi	2	0
46	Pekerjaan Lainnya	10	10
Jumlah		6.163	6.216

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2026

Berdasarkan data diatas, mayoritas penduduk Kalurahan Patalan bekerja sebagai buruh harian lepas. Selain di sektor pertanian, masyarakat Kalurahan Patalan juga banyak yang berternak sapi, kambing, ayam kampung, dan bebek. Sebagian komoditas yang dihasilkan berupa daging dan telur. Kalurahan Patalan dilewati jalur wisata Pantai Parangtritis sehingga memiliki akses yang tinggi untuk mobilitasnya, oleh karena itu banyak masyarakat yang berdagang di sepanjang jalan parangtritis dan mendirikan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Namun, karena keterbatasan lapangan pekerjaan dengan persaingan yang ketat, membuat banyak masyarakat khususnya anak muda memilih merantu ke kota lainnya atau menjadi TKI ke luar negeri.

2.5. Gambaran Umum Infrastruktur

Salah satu strategi dalam pelaksanaan misi Asta Cita dan pencapaian sasaran Visi Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045 adalah membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Pembangunan Infrastruktur bertujuan untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian masyarakat.

Pengembangan kawasan industri menjadi sangat penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah dan penyerapan tenaga kerja. Percepatan perwujudan kawasan industri menjadi sangat mendesak dengan dukungan pembangunan infrastruktur penunjang kawasan seperti akses jalan.

Salah satu faktor yang dapat memicu perkembangan wilayah adalah konektivitas. Dengan adanya konektivitas suatu wilayah akan mudah untuk berinteraksi dengan wilayah tersebut maupun antar wilayah lainnya. Konektivitas dapat menghubungkan pusat-pusat sub wilayah dan pusat-pusat pertumbuhan guna meningkatkan perkembangan wilayah. Adanya konektivitas ini memerlukan dukungan infrastruktur strategis diantaranya jalan, jembatan dan TOD. Infrastruktur jalan dan konektivitas tidak dapat dipisahkan dalam perannya mempengaruhi perkembangan wilayah.

Gambar 2.6 Peta Sarpras Kalurahan Patalan

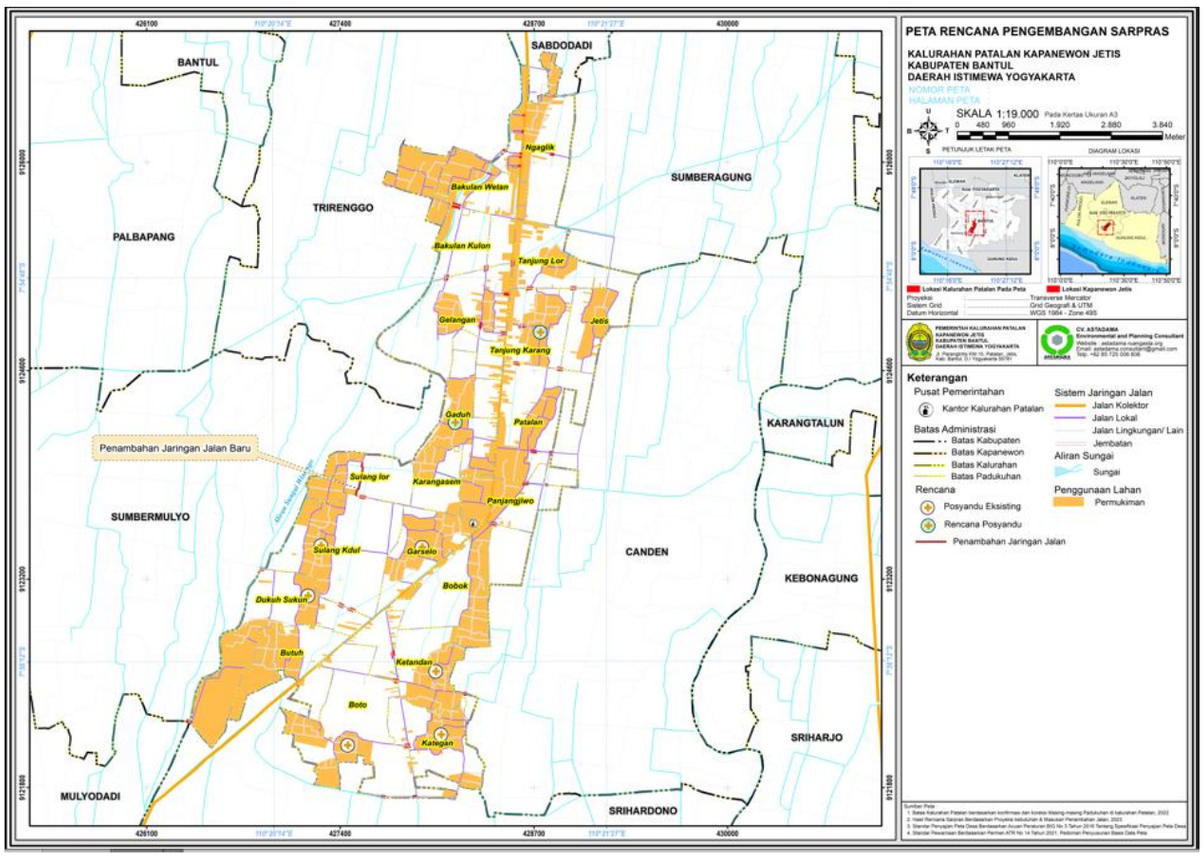

Sumber : Masterplan Kalurahan Patalan

Program pembangunan infrastruktur kalurahan yang memberikan peluang dalam mendukung kegiatan produksi, ekonomi, dan sosial yang merupakan faktor-faktor penting dalam pengembangan kalurahan. Kalurahan Patalan memiliki luas wilayah 565,040 Ha yang dibagi menjadi 20 Padukuhan dan dilewati Jalan Parangtitis.

Gambar 2.7 Peta wilayah Kalurahan Patalan

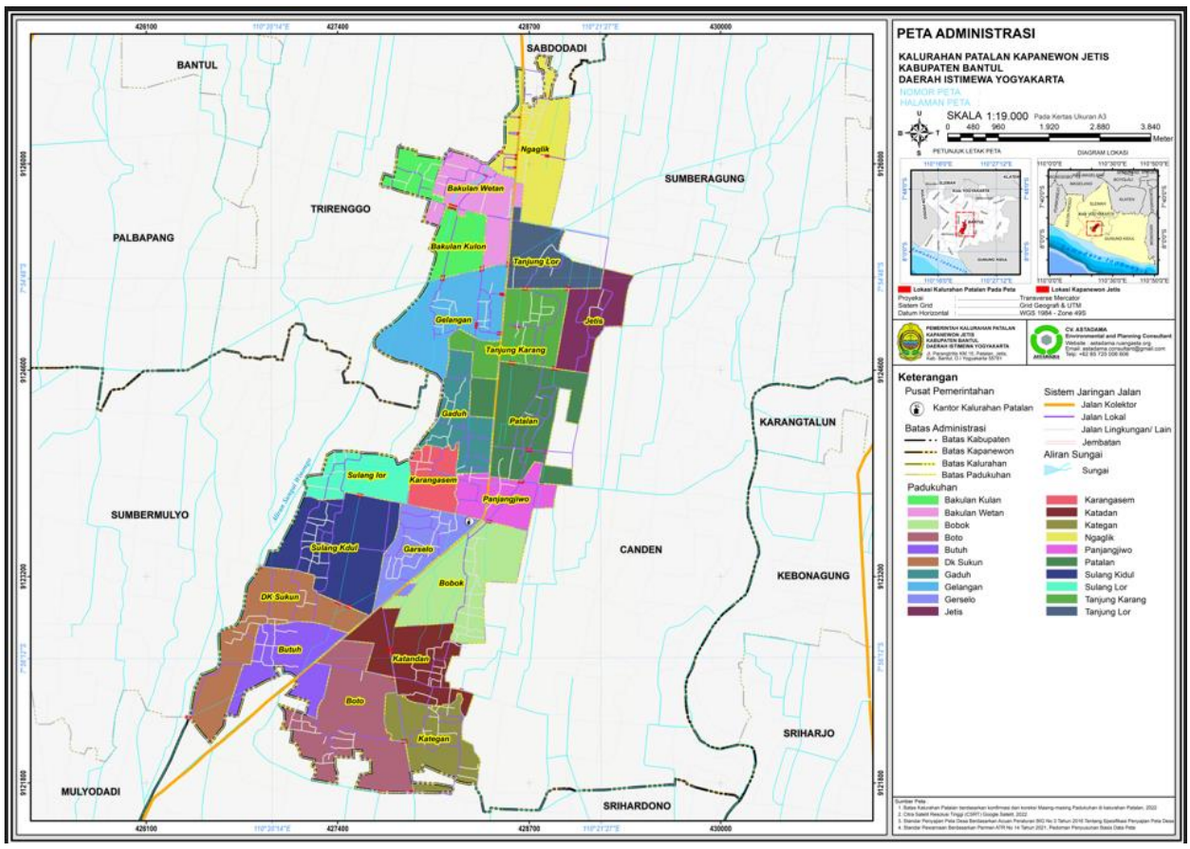

Sumber : Masterplan Kalurahan Patalan

Memiliki batas wilayah :

Sebelah Utara	:	Kalurahan Sabdodadi, Kapanewon Bantul
Sebelah Timur	:	Kalurahan Canden, Kapanewon Jetis
Sebelah Selatan	:	Kalurahan Srihardono, Kapanewon Pundong
Sebelah Barat	:	Kalurahan Sumbermulyo, Kapanewon Trirenggo

Infrastruktur di Kalurahan Patalan sudah cukup memadai. Beberapa potensi infrastruktur tersebut dapat dilihat dari sarana dan prasarana yang ada seperti Jalan provinsi, kabupaten dan lingkungan desa. Sebagian besar jalan kalurahan sudah di cor blok dan jalan kabupaten sudah diaspal. Setiap tahunnya Pemerintah Kalurahan Patalan mengalokasikan anggaran untuk angkat walet, pembangunan irigasi pertanian, rehab jalan dan mengusulkan perbaikan infastruktur ke Program Dinas Kabupaten dan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Dengan adanya konektivitas antar jalan di Kalurahan Patalan dapat mempermudah akses masyarakat menjangkau kawasan produksi dengan kawasan distribusi, kawasan wisata, fasilitas kesehatan dan pelayanan dasar sehingga mempercepat peningkatan perekonomian masyarakat.

Gambar 2.8 Peta Jaringan Drainase Kalurahan Patalan

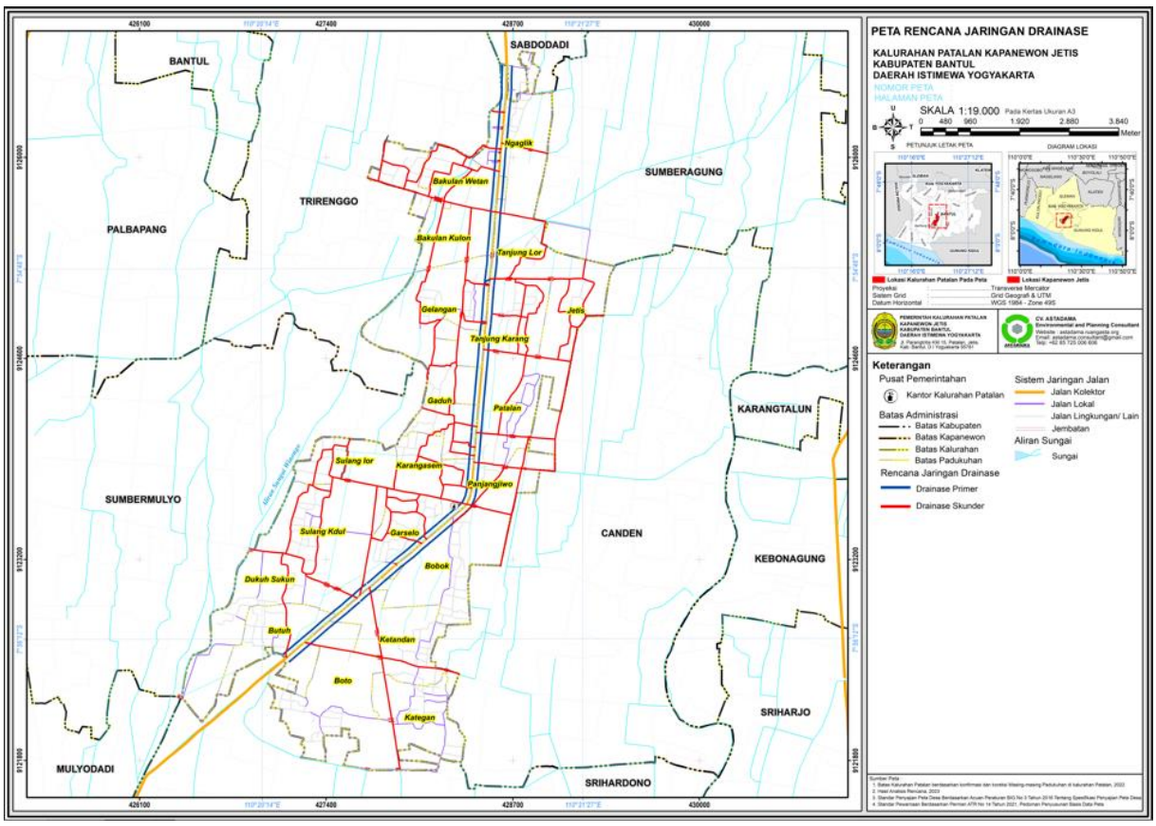

Sumber : Masterplan Kalurahan Patalan

Kalurahan Patalan memiliki sarana Pendidikan yang terdiri dari Sekolah tingkat Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), tingkat taman kanak-kanak (TK), tingkat menengah pertama (SMP), hingga tingkat sekolah menengah kejuruan (SMK). Sarana kesehatan seperti Puskesmas Jetis II dan Rumah Sakit Rachma Husada. Fasilitas tempat beribadah seperti masjid dan gereja, adapun fasilitas lainnya seperti Pasar Bakulan, Pasar Hewan, Gedung Serba Guna Grha Purba Buana, lapangan Sulang, lapangan tenis, *food court* Bakulan, Lembaga pemerintahan, dan sarana prasarana lainnya.

BAB III
RUMUSAN PRIORITAS MASALAH

Kendala dalam pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan sesuai dengan perencanaan bukan hanya dari internal Kalurahan saja, tetapi juga pengaruh secara makro dari kondisi dan penyelenggaraan pemerintahan diatasnya.

3.1. Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan pada RKP Kalurahan Tahun sebelumnya

Evaluasi pelaksanaan program RKP Kalurahan tahun sebelumnya dilakukan dengan mengukur capaian program dan kegiatan yang terdapat dalam RKP Kal dan APB Kal tahun 2026 berdasarkan hasil pelaksanaan pembangunan tahun 2026 sampai saat penyusunan RKP Kalurahan Tahun 2027. Evaluasi ini berdasarkan data siskeudes per tanggal 30 September 2026.

1. Belanja Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan

   Diproyeksikan sampai dengan akhir Desember 2026 dari 34 kegiatan di bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan bisa mencapai total 90,49%, penyerapan anggaran di bidang tersebut, berdasarkan pengelompokan evaluasi terhadap serapan anggaran dan output kegiatan sebagai berikut:

   a. Serapan anggaran ≥ 80% dan output 100%

      Terdapat 4 kegiatan dengan serapan ≥ 80% dan output kegiatan 100%, yaitu :

      1. Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW dengan serapan 85,40%
      2. Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa dengan serapan 88,93%
      3. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **) serapannya 100%.
      4. Pengembangan Sistem Informasi Kalurahan dengan serapan 83,64%.

   b. Serapan anggaran ≥ 80% dan output < 100%

      Kegiatan Penyediaan Tunjangan Hari Raya bagi Lurah, Pamong Kalurahan dan Bamuskal dengan serapannya 97,96%.

b. Serapan anggaran < 80% dan Output < 100%

Terdapat 23 kegiatan yang diproyeksikan dengan serapan < 80% karena kegiatan tersebut terdapat efisiensi dalam serapan anggaran maupun ada beberapa kegiatan yang tidak terlaksana karena telah dianggarkan dalam kegiatan lainnya. Adapun rincian sebagai berikut:

1) terdapat 9 kegiatan dengan serapan anggaran < 80% yang mencapai output kegiatan 100%
2) terdapat 14 kegiatan dengan serapan anggaran < 80% yang mencapai output kegiatan ≥ 80%

c. Serapan anggaran 0% dan output 100%

Terdapat 2 kegiatan dengan serapannya masih 0%, yaitu :

1) Penyediaan Tambahan Penghasilan Dari Tanah Pelungguh kegiatan belum dilaksanakan pada Triwulan ke empat.
2) Penyusunan Kebijakan Kalurahan (Peraturan Kalurahan/Peraturan Lurah selain Perencanaan/Keuangan) kegiatan baru akan dilaksanakan pada Triwulan ke empat.

d. Serapan anggaran 0% dan output 0%

Terdapat 2 kegiatan dengan serapannya masih 0%, yaitu :

1) Penyediaan Tunjangan Kinerja Bagi Lurah, Pamong Kalurahan, Dan Bamuskal tidak dilaksanakan karena efisiensi anggaran.
2) Penentuan/Penegasan Batas/patok Tanah Kas Desa tidak dilaksanakan karena anggaran dialokasikan untuk kegiatan lainnya.

Dapat disimpulkan bahwa dari hasil evaluasi kegiatan tersebut masih ada beberapa kegiatan yang perlu dioptimalkan. Perlu perencanaan yang lebih cermat dan optimalisasi pelaksanaan terhadap kegiatan dengan serapan < 80% dan output < 80% dan kegiatan dengan serapan anggaran 0%.

2. Belanja Bidang Pelaksanaan Pembangunan Kalurahan

Diproyeksikan sampai dengan akhir bulan Desember 2026 dari 27 kegiatan di bidang Pelaksanaan Pembangunan Kalurahan mampu menyerap anggaran sebesar 72,20%, berdasarkan pengelompokan

evaluasi terhadap serapan anggaran dan output kegiatan tersebut adalah sebagai berikut:

a. Serapan anggaran ≥ 80% dan Output 100%

   Terdapat 7 kegiatan dengan serapan ≥ 80% dan output kegiatan 100%, yaitu :

   1. Pemeliharaan Sarana Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Nonformal dengan serapan 96%
   2. Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi dengan serapannya 89,77%
   3. Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lansia, Insentif) dengan serapannya 98,73%.
   4. Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll) serapannya 100%.
   5. Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan serapannya 99,50%.
   6. Pengelolaan Rumah Kalurahan Sehat serapannya 95,92%.
   7. Penanganan / Pemulihan Balita Gizi Buruk / Stunting dengan serapan 87,01%.

b. Serapan anggaran < 80% dan Output < 100%

   Terdapat 14 kegiatan yang realisasinya < 80% karena kegiatan tersebut terdapat efisiensi dalam serapan anggaran maupun ada beberapa kegiatan yang tidak terlaksana karena telah dianggarkan dalam kegiatan lainnya. Adapun rincian sebagai berikut:

   1) terdapat 7 kegiatan dengan serapan anggaran 0% yang mencapai output kegiatan ≤100%
   2) terdapat 7 kegiatan dengan serapan anggaran < 80% yang mencapai output kegiatan ≥ 80%

c. terdapat Serapan anggaran 0% dan output 0%

   Terdapat 6 kegiatan dengan serapan 0% dan outputnya 0% karena anggaran kegiatan tersebut bersumber dana Dana Desa yang mengalami efisiensi anggaran sehingga tidak bisa dilaksanakan.

Dari hasil evaluasi diatas, banyak kegiatan belum dilaksanakan karena kegiatan tersebut bersumber dari PPBMP (Program Pemberdayaan Berbasis Masyarakat Padukuhan) yang baru dilaksanakan di semester 2. Perlu perencanaan yang lebih cermat

dan inovasi untuk optimalisasi pelaksanaan terhadap kegiatan dengan serapan < 80% dan output < 80% dan kegiatan dengan serapan anggaran 0%.

3. Belanja Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Kalurahan

Sampai akhir Desember 2026 dari 16 kegiatan di bidang Pembinaan Kemasyarakatan Kalurahan diproyeksikan mencapai penyerapan anggaran sebesar 36,88%, berdasarkan pengelompokan evaluasi terhadap serapan anggaran dan output kegiatan sebagai berikut:

a. Serapan anggaran ≥ 80% dan Output 100%

Terdapat 3 kegiatan yang diproyeksikan ≥ 80% dengan output kegiatan 100%, yaitu :

1. Pengiriman Kontingen Group Kesenian & Kebudayaan (Wakil Kalurahan tkt. Kec/Kab/Kot) serapannya 100%.
2. Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olaraga Tingkat Desa dengan serapan 91,14%.
3. Pembinaan PKK serapannya 92,75%.

b. Serapan anggaran < 80% dan Output < 100%

Terdapat 5 kegiatan yang realisasinya < 80% karena kegiatan tersebut terdapat efisiensi dalam serapan anggaran maupun ada beberapa kegiatan yang tidak terlaksana karena telah dianggarkan dalam kegiatan lainnya. Adapun rincian sebagai berikut:

1) terdapat 3 kegiatan dengan serapan anggaran <80% yang mencapai output kegiatan ≤100%
2) terdapat 2 kegiatan dengan serapan anggaran <80% yang mencapai output kegiatan ≥ 80%

c. Terdapat 8 kegiatan dengan serapan 0% dan outputnya 0% karena anggaran kegiatan tersebut bersumber dana Dana Desa yang mengalami efisiensi anggaran sehingga tidak bisa dilaksanakan.

Dapat disimpulkan proyeksi capaian sampai akhir Desember 2026 sudah optimal namun perlu perencanaan yang lebih cermat dan optimalisasi pelaksanaan yang telah direncanakan. Perlu perencanaan yang lebih cermat dan optimalisasi pelaksanaan

terhadap kegiatan dengan serapan < 80% dan output < 80% dan kegiatan dengan serapan anggaran 0%.

4. Belanja Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan

Sampai akhir Desember 2026 dari 12 kegiatan di bidang Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan diproyeksikan mencapai serapan sebesar 83,33%, berdasarkan pengelompokan evaluasi terhadap serapan anggaran dan output kegiatan sebagai berikut:

a. Serapan anggaran ≤ 80% dan Output ≤ 100%

Terdapat 2 kegiatan yang diproyeksikan dengan serapan < 80% dan outputnya ≤ 100%, yaitu :

1. Peningkatan Kapasitas Bamuskal dengan serapannya 87,54%
2. Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difable (Penyandang Disabilitas) serapannya 84,45%.

b. Serapan anggaran 0% dan output ≤100%

Terdapat 9 kegiatan yang realisasinya < 80% karena kegiatan tersebut terdapat efisiensi dalam serapan anggaran maupun ada beberapa kegiatan yang sudah dilaksanakan tetapi belum dicairkan.

c. Kegiatan Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Tekonologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan dengan serapan 0% dan outputnya 0% karena anggaran kegiatan tersebut bersumber dana Dana Desa yang mengalami efisiensi anggaran sehingga tidak bisa dilaksanakan.

Dari hasil evaluasi diatas, beberapa kegiatan bersumber dana Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota yang baru dilaksanakan di semester 2 karena perubahan APBKAL Tahun 2026. Perlu perencanaan yang lebih cermat dan inovasi untuk optimalisasi pelaksanaan terhadap kegiatan dengan serapan < 80% dan output < 80% dan kegiatan dengan serapan anggaran 0%.

5. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Keadaan Mendesak

Sampai akhir Desember 2026 dari 4 kegiatan di bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Keadaan Mendesak diproyeksikan mencapai penyerapan sebesar 88,75%, berdasarkan pengelompokan evaluasi terhadap serapan anggaran dan output kegiatan sebagai berikut:

a. Serapan anggaran < 80% dan output 100%
   Terdapat 1 kegiatan pada Bidang ini yaitu BLT DD.
b. Serapan anggaran > 0% dan Output ≥ 100%
   Terdapat 3 kegiatan serapan 0%, karena tidak ada kegiatan penanggulangan bencana dan keadaan darurat.

Dapat disimpulkan bahwa capaian APBKAL Tahun 2026 di bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak diproyeksikan sampai akhir Desember 2026 sudah optimal. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Keadaan Mendesak digunakan untuk penyaluran BLT Dana Desa, kecuali kegiatan keadaan darurat dan penanggulangan bencana karena memang tidak ada kegiatan.

Dapat disimpulkan bahwa capaian APBKAL Tahun 2026 sampai akhir Desember 2026 diproyeksikan mencapai 62,83%. Dengan urutan proyeksi serapan, sebagai berikut:

1. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan sebesar 90,49%.
2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Kalurahan sebesar 72,20%.
3. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan sebesar 43,13%.
4. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Kalurahan sebesar 83,33%.
5. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan darurat dan Mendesak sebesar 25%.

Perlu perencanaan yang lebih cermat dan optimalisasi pelaksanaan di kegiatan dengan serapan < 80% dan output < 80%. Detail evaluasi ini dapat diliat ditabel dibawah ini.

Tabel 3.1 Evaluasi Rencana Kerja Pemerintahan Kalurahan Tahun 2026

No	Urusan/Program Kegiatan	Lokasi	Anggaran	Realisasi	Realisasi Capaian s.d Akhir September 2026	Proyeksi Realisasi Capaian s.d Akhir Desember 2026	Swa-daya (Rp.)	APB-Kal (Rp.)							
								PA Kal	Dana Desa	Alokasi Dana Desa	Bantuan Keuangan		Bagi Hasil Pajak Retribusi Daerah	Pendapatan Lain-lain	Ket.
											APBD DIY	APBD KAB			
1	2	4	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16	17	18	19
01.00	**Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan**														
01.01	**Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Kalurahan**														
01.01.01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Lurah	Kalurahan	65.473.200	47.127.960	71,98%	100%				65.473.200					
01.01.02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Pamong Kalurahan	Kalurahan	1.085.066.064	803.494.846	74,05%	100%				1.085.066.064					
01.01.03	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Lurah dan Pamong Kalurahan	Kalurahan	23.980.800	11.006.586	45,90%	100%							23.980.800,00		
01.01.04	Penyediaan Operasional Pemerintah Kalurahan (ATK, Honor PKPK Kalurahan dan PPK Kalurahan, Perlengkapan Perkantoran, pakaian dinas/atribut, listrik/telpon dll))	Kalurahan	154.677.706,00	74.377.435	48,09%	95%		91.306.250		31.446.744			31.924.712		
01.01.05	Penyediaan Tunjangan Bamuskal	Kalurahan	132.300.000	92.100.000	69,61%	100%				132.300.000					
01.01.06	Penyediaan Operasional Bamuskal (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan Perkantoran, Pakaian Seragam, perjalanan dinas,Listrik/telpon, dll)	Kalurahan	10.000.000	3.859.000	38,59%	95%				10.000.000					
01.01.07	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	Kalurahan	198.624.500	169.620.958	85,40%	100%		47.062.000				151.562.500			
01.01.08	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	Kalurahan	11.200.000	9.960.000	88,93%	100%			11.200.000						
01.01.90	Penyediaan Jaminan Sosial Bagi Bamuskal dan LKK	Kalurahan	12.369.600	461.602	3,73%	25%							12.369.600,00		
01.01.91	Penyediaan Tunjangan Kinerja Bagi Lurah,Pamong Kalurahan, Dan Bamuskal	Kalurahan	56.685.000	0	0,00%	100%		56.685.000		0			0		
01.01.92	Penyediaan Tunjangan Hari Raya bagi Lurah, Pamong Kalurahan dan Bamuskal	Kalurahan	141.435.800	138.555.800	97,96%	97,96%		141.435.800					112.802.400		
01.01.93	Penyediaan Tunjangan Purna Tugas Bagi Lurah,Pamong Kalurahan dan Bamuskal	Kalurahan	112.802.400	77.858.400	69,02%	100%									
01.01.94	Penyediaan Tambahan Penghasilan Dari Tanah Pelungguh	Kalurahan	4.069.000	0	0,00%	100%		4.069.000		0					
01.01.97	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Staf Kalurahan	Kalurahan	208.342.000	159.229.600	76,43%	100%				208.342.000					
01.01.98	Penyediaan Penghasilan bagi Staf Honorer	Kalurahan	198.400.000	149.080.000	75,14%	100%				198.400.000					
01.02	**Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Kalurahan**														
01.02.01	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	Kalurahan	24.216.002	19.055.000	78,69%	50%		9.116.001,56			15.100.000				
01.02.02	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Kalurahan	Kalurahan	21.860.000	12.812.000	58,61%	75%		18.670.000	3.190.000						
01.02.03	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **)	Kalurahan	9.850.000	9.850.000	100,00%	100%					9.850.000,00				
01.03	**Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan**														
01.03.01	Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	Kalurahan	9.170.000	5.748.000	62,68%	75%			0		9.170.000				
01.03.02	Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Kalurahan (Dipilih)	Kalurahan	9.850.000	300.000	3,05%	75%			9.250.000		600.000,00		-		
01.03.05	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Kalurahan secara Partisipatif	Kalurahan	4.500.000	3.375.000	75,00%	80%			4.500.000						
01.04	**Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan**														
01.04.01	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Kalurahan/Pembahasan APB Kalurahan (Reguler)	Kalurahan	14.950.000	5.478.000	36,64%	98%			14.950.000						

No	Urusan/Program Kegiatan	Lokasi	Anggaran	Realisasi	Realisasi Capaian s.d Akhir September 2026	Proyeksi Realisasi Capaian s.d Akhir Desember 2026	Swa-daya (Rp.)	APB-Kal (Rp.)							
								PA Kal	Dana Desa	Alokasi Dana Desa	Bantuan Keuangan		Bagi Hasil Pajak Retribusi Daerah	Pendapatan Lain-lain	Ket.
											APBD DIY	APBD KAB			
1	2	4	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16	17	18	19
01.04.02	Penyelenggaraan Musyawaran Kalurahan Lainnya (Musdus, Rembug Kalurahan Non Reguler)	Kalurahan	35.761.450	14.045.500	39,28%	98%			18.322.000			17.439.450			
01.04.03	Penyusunan Dokumen Perencanaan Kalurahan (RPJM Kalurahan/RKP Kalurahan dll)	Kalurahan	22.690.000	1.500.000	6,61%	98%		0	12.190.000				10.500.000,00		
01.04.04	Penyusunan Dokumen Keuangan Kalurahan (APB Kalurahan, APB Kalurahan Perubahan, LPJ dll)	Kalurahan	39.011.500	18.264.000	46,82%	98%			23.261.500		2.550.000,00		13.200.000,00		
01.04.05	Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/Penilaian Aset Kalurahan	Kalurahan	4.400.000	2.600.000	59,09%	100%		4.400.000							
01.04.06	Penyusunan Kebijakan Kalurahan (Peraturan Kalurahan/Peraturan Lurah selain Perencanaan/Keuangan)	Kalurahan	7.575.000	0	0,00%	50%			6.375.000				1.200.000,00		
01.04.07	Penyusunan Laporan Lurah, LPP Kalurahan dan Informasi Kepada Masyarakat	Kalurahan	8.820.000	5.645.000	64,00%	95%		1.500.000	4.120.000,00		3.200.000				
01.04.08	Pengembangan Sistem Informasi Kalurahan	Kalurahan	26.930.000	22.524.900	83,64%	100%			26.930.000						
01.04.10	Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka. Kewilayahan & BPD	Kalurahan	213.793.300	59.898.300	28,02%	100%		11.395.000				123.173.300,00	79.225.000,00		
01.04.90	Dukungan dan Sosialisasi Pengisian Pamong dan Staf Honorer	Kalurahan	55.467.000	39.745.000	71,66%	72%		55.467.000							
01.05	**Pertanahan**	Kalurahan													
01.05.06	Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	Kalurahan	105.500.000	84.330.000	79,93%	100%							105.500.000		
01.05.7	Penentuan/Penegasan Batas/patok Tanah Kas Desa	Kalurahan	3.920.000	0	0,00%	100%		3.920.000							
01.05.91	Pengelolaan Tanah Kas Kalurahan	Kalurahan	49.749.000	26.316.179	52,90%	100%		41.749.000			8.000.000				
02.00	**Pelaksanaan Pembangunan Kalurahan**														
02.01	**Pendidikan**														
02.01.01	Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Kalurahan (Honor, Pakaian dll)	Kalurahan	42.600.000	28.550.000	67,02%	100%			42.600.000						
02.01.03	Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat	8 Dusun	0	0	0,00%	0%						0			
02.01.05	Pemeliharaan Sarana Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Nonformal	13 Dusun	5.208.333	5.000.000	96,00%	100%						5.208.333			
02.01.08	Pengelolaan Perpustakaan Milik Kalurahan (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca)	Kalurahan	0	0	0,00%	0%			0						
02.01.10	Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	Kalurahan	56.022.167	50.293.000	89,77%	100%			50.293.000			5.729.167,00			
02.02	**Kesehatan**	Kalurahan													
02.02.02	Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lansia, Insentif)	Kalurahan	95.655.000	94.439.100	98,73%	100%			56.500.000		39.155.000				
02.02.03	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	Kalurahan	4.412.500	4.412.500	100,00%	100%			0		4.412.500				
02.02.04	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	Kalurahan	12.060.000	12.000.000	99,50%	100%			12.060.000						
02.02.09	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana	Bakulan Kulon, Ngaglik, Gelangan, Gaduh, Gerselo, Sulang Kidul, Kategan, Tanjung Lor	33.771.875	24.683.000	73,09%	100%						33.771.875			
02.02.91	Pengelolaan Rumah Kalurahan Sehat	Kalurahan	7.360.000	7.060.000	95,92%	100%			7.360.000						

No	Urusan/Program Kegiatan	Lokasi	Anggaran	Realisasi	Realisasi Capaian s.d Akhir September 2026	Proyeksi Realisasi Capaian s.d Akhir Desember 2026	Swa-daya (Rp.)	APB-Kal (Rp.)							
								PA Kal	Dana Desa	Alokasi Dana Desa	Bantuan Keuangan		Bagi Hasil Pajak Retribusi Daerah	Pendapatan Lain-lain	Ket.
											APBD DIY	APBD KAB			
1	2	4	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16	17	18	19
02.02.92	Pembinaan Kampung KB	Kalurahan	0	0	0,00%	0%			0						
02.02.93	Pengelolaan Kalurahan Inklusif	20 Padukuhan	306.240.000	180.881.900	59,07%	80%						306.240.000			
02.02.94	Penanganan / Pemulihan Balita Gizi Buruk / Stunting	Bakulan Kulon, Bakulan Wetan, Ngaglik, Tanjung Lor, Jetis, Tanjungkarang, Gelangan, Gaduh, Patalan, Panjangjiwo, Sulang Lor, SulangKidul Kategan, Dukuh Sukun, Ketandan Bobok	75.647.292	65.817.400	87,01%	100%			0			75.647.292			
02.02.96	Gerakan Kebersihan dan Kesehatan Lingkungan (PSN, dll)	Padukuhan	6.600.000	4.800.000	72,73%	100%			6.600.000						
02.03	**Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**														
02.03.10	Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	Gelangan, Gaduh, Tanjungkarang	104.000.000	0	0,00%	90%						104.000.000			
02.03.11	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman (Dipilih)	Bakulan Kulon, Kategan, Gelangan, Tanjung Lor, Gaduh, Karangasem, Sulang Lor, Boto, Sulang Kidul	83.444.479	0	0,00%	80%						83.444.479			
02.03.13	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa **)	Ngaglik	4.498.958	0	0,00%	80%						4.498.958			
02.03.14	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	Jetis, Gaduh	14.240.312	0	0,00%	85%						14.240.312			
02.03.15	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan **)	Ngaglik, Tanjung Lor, Tanjungkarang, Patalan, Panjangjiwo	32.993.750	0	0,00%	80%						32.993.750			
02.03.20	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Monumen/Gapura/Batas Desa **)	Butuh	0	0	0,00%	0%						0			
02.04	**Kawasan Permukiman**														
02.04.01	Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni	5 Dusun	0	0	0,00%	0%		0	0						
02.04.10	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumur Resapan **)	Kalurahan	10.059.167	0	0,00%	100%						10.059.167			
02.04.15	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah **)	Kalurahan	17.760.417	16.690.000	93,97%	90%						17.760.417			
02.05	**Kehutanan dan Lingkungan Hidup**														
02.05.91	Pelatihan Pengolahan / Pengelolaan Sampah	20 Dusun	2.255.208	2.165.000	96,00%	90%						2.255.208			
02.06	**Perhubungan, Komunikasi dan**														

No	Urusan/Program Kegiatan	Lokasi	Anggaran	Realisasi	Realisasi Capaian s.d Akhir September 2026	Proyeksi Realisasi Capaian s.d Akhir Desember 2026	Swa-daya (Rp.)	APB-Kal (Rp.)							
								PA Kal	Dana Desa	Alokasi Dana Desa	Bantuan Keuangan		Bagi Hasil Pajak Retribusi Daerah	Pendapatan Lain-lain	Ket.
											APBD DIY	APBD KAB			
1	2	4	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16	17	18	19
02.06.01	Pembuatan Rambu-rambu di Jalan Desa	20 Dusun	4.687.500	0	0,00%	95%						4.687.500,00			
02.06.05	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Transportasi Desa	20 Dusun	68.121.875	35.424.900,00	52,00%	80%						68.121.875,00			
02.08	**Pariwisata**														
02.08.03	Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa	Kalurahan	0	0	0,00%	0%			0						
03.00	**Pembinaan Kemasyaraatan Kalurahan**														
03.01	**Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat**														
03.01.03	Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lokal Desa	Kalurahan	17.940.000	3.500.000	19,51%	100%			17.940.000						
03.01.04	Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa	Kalurahan	3.200.000	0	0,00%	100%			3.200.000						
03.01.07	Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masy. di Bid. Hukum & Pelindungan Masy.	Kalurahan	0	0	0,00%	0%			0						
03.02	**Kebudayaan dan Keagamaan**														
03.02.01	Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Kalurahan	Kalurahan	0	0	0,00%	0%			0						
03.02.02	Pengiriman Kontingen Group Kesenian & Kebudayaan (Wakil Kalurahan tkt. Kec/Kab/Kot)	Kalurahan	810.000	810.000	100,00%	100%							810.000,00		
03.02.03	Penyelenggaran Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	Kalurahan	26.000.500	0	0,00%	95%			18.155.500				7.845.000,00		
03.02.90	Pembinaan Bidang Keagamaan	Kalurahan	52.593.800	7.770.000	14,77%	95%		9.450.000	38.343.800				4.800.000,00		
03.02.92	Fasilitasi Pelaksanakan MTQ/MHQ/PORSADIN	Kalurahan	0	0	0,00%	0%			0						
03.03	**Kepemudaan dan Olah Raga**														
03.03.01	Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga Sebagai Wakil Desa tkt Kec/Kab/Kota	Kalurahan	0	0	0,00%	0%			0						
03.03.02	Penyelenggaraan Pelatihan Kepemudaan Tingkat Desa	Kalurahan	0	0	0,00%	0%			0						
03.03.03	Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olaraga Tingkat Desa	Kalurahan	12.827.000	11.690.000	91,14%	100%			12.827.000						
03.03.05	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga Milik Desa	Bakulan Kulon, tanjungkarang, Sulang Lor, Boto, Ketandan	7.687.500	0	0,00%	0%						7.687.500,00			
03.03.06	Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	Kalurahan	0	0	0,00%	0%			0						
03.04	**Kelembagaan Masyarakat**														
03.04.02	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	Kalurahan	630.000	0	0,00%	100%		630.000	0						
03.04.03	Pembinaan PKK	Kalurahan	7.356.000	6.823.000	92,75%	100%			7.356.000						
03.04.04	Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	Kalurahan	0	0	0,00%	0%						0			
04.00	**Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan**														
04.01	**Sub Bidang Kelautan dan Perikanan**														
04.01.90	Bimtek/Pelatihan/Pengembangan Usaha Pengolahan Ikan	Jetis	6.441.667	0	0,00%	100%						6.441.667,00			
04.02	**Pertanian dan Peternakan**														
04.02.04	Pembangunan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	Padukuhan	46.560.000	25.650.000	55,09%	100%			46.560.000						

No	Urusan/Program Kegiatan	Lokasi	Anggaran	Realisasi	Realisasi Capaian s.d Akhir September 2026	Proyeksi Realisasi Capaian s.d Akhir Desember 2026	Swa-daya (Rp.)	APB-Kal (Rp.)							
								PA Kal	Dana Desa	Alokasi Dana Desa	Bantuan Keuangan		Bagi Hasil Pajak Retribusi Daerah	Pendapatan Lain-lain	Ket.
											APBD DIY	APBD KAB			
1	2	4	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16	17	18	19
04.02.05	Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Tekonologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan	Kalurahan	0	0	0,00%	0%			0						
04.02.06	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	Tanjung Lor, Boto	182.000.000	0	0,00%	100%		7.000.000,00	0		175.000.000	1.400.000,00			
04.02.90	Fasilitasi Kelompok Masyarakat di Bidang Pertanian (GAPOKTAN, P3A)/Peternakan	Kalurahan	26.900.000	17.530.000	65,17%	100%			25.500.000						
04.03	**Peningkatan Kapasitas Aparatur Kalurahan**														
04.03.02	Peningkatan Kapatitas Pamong Kalurahan	Kalurahan	12.985.000	10.275.000	79,13%	100%					12.985.000				
04.03.03	Peningkatan Kapasitas Bamuskal	Kalurahan	12.042.500	10.542.500	87,54%	100%					12.042.500				
04.04	**Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga**														
04.04.03	Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difable (Penyandang Disabilitas)	Kalurahan	5.210.000	4.400.000	84,45%	100%			5.210.000						
04.04.94	Pelatihan Kerja (Live Skill) bagi Ibu Rumah Tangga/Remaja Belum Bekerja/Keluarga	Kalurahan	6.250.000	0	0,00%	100%						6.250.000,00			
04.05	**Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)**														
04.05.02	Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi	Kalurahan	25.000.000	0	0,00%	100%			0			25.000.000,00			
04.06	**Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)**	Kalurahan													
04.06.02	Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)	BUMKAL	2.935.000	1.100.000	37,48%	100%					2.935.000,00				
04.07	**Perdagangan dan Perindustrian**	Kalurahan													
04.07.04	Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif	Kalurahan	4.560.000	2.880.000,00	63,16%	100%			4.560.000						
05.00	**Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Bencana**														
05.01	**Sub Bidang Penanggulangan Bencana**														
05.01.00	Kegiatan Penanggulanan Bencana	Kalurahan	21.803.080	0	0,00%	0%		21.803.080							
05.02	**Sub Bidang Keadaan Darurat**	Kalurahan													
05.02.00	Penanganan Keadaan Darurat	Kalurahan	0	0	0,00%	0%		0	0						
05.03	**Sub Bidang Keadaan Mendesak**	Kalurahan													
05.03.00	Penanganan Keadaan Mendesak	Kalurahan	0	0	0,00%	0%		0					0		
05.03.90	BLT DD	Kalurahan	72.000.000	54.000.000,00	75,00%	100%			72.000.000						
Jumlah			4.624.810.201,56	2.703.406.366	58,45%			525.658.131,56	561.353.800	1.731.028.008	295.000.000	1.107.612.750	404.157.512		

Sumber : Aplikasi Siskeudes per tanggal 30 September 2026

3.2. Evaluasi laju pencapaian SDGs Desa

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau Sustainable Develoment Goals (SDG's) merupakan deklarasi internasional pada tanggal 25 September 2015 yang diselenggarakan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Perserikatan Bangsa-Bangsa telah menetapkan 17 TPB/SDGs yang terdiri atas 169 target untuk mengukur pencapaian target TPB/SDG's. Tujuan SDG's adalah seperangkat target yang berhubungan dengan pengembangan internasional di masa mendatang. Target-target ini dibuat oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa dan dipromosikan sebagai Tujuan Global untuk Pembangunan yang Berkelanjutan.

Proses sinkronisasi perencanaan dan penganggaran program prioritas nasional, diwujudkan melalui integrasi program dan kegiatan pembangunan nasional yang harus didukung dan dilaksanakan oleh Pemerintah Kalurahan sesuai kewenangan. Adapun skala prioritas perencanaan kegiatan berdasarkan rekomendasi SDGS Tahun 2026:

1. Desa Tanpa Kemiskinan
    a. Tingkat kemiskinan desa mencapai 0%
    Rekomendasi melalui Musyawarah Kalurahan/ RKP/ RPJM Kal, sebagai berikut :
    b. Tingkat kemiskinan ekstrem desa mencapai 0%
    c. Persentase warga desa peserta SJSN Bidang Kesehatan mencapai 100%
    d. Persentase warga desa peserta SJSN Bidang Ketenagakerjaan mencapai 100%
    e. Keluarga miskin penerima bantuan sosial mencapai 100%
    f. Individu miskin mendapat layanan kesehatan mencapai 100%
    g. Individu miskin mendapat pendidikan SD mencapai 100%
    h. Individu miskin mendapat pendidikan SMP mencapai 100%
    i. Individu miskin mendapat pendidikan SMA mencapai 100%
    j. Individu miskin mendapat pendidikan lanjutan (D3, S1, S2, dst) mencapai 100%
    k. Keluarga miskin pengguna Listrik (PLN dan Non PLN) mencapai 100%
    l. Keluarga miskin dengan sanitasi layak mencapai 100%
    m. Keluarga miskin dengan hunian layak (subjektif) mencapai 100%
    n. Keluarga miskin dengan hunian layak (objektif) mencapai 100%

2. Desa Tanpa Kelaparan
    a. Persentase bayi yang mendapatkan ASI Eksklusif mencapai 100%
    b. Keberadaan pertanian pangan tiap kawasan Rukun Tetangga
3. Desa Sehat & Sejahtera
    a. BPJS Kesehatan mencapai 100% penduduk
    b. Unmet need pelayanan kesehatan mencapai 0%
    c. Persentase Ibu hamil yang melahirkan di faskes mencapai 100%
    d. Prevalensi TBC mencapai 0%
4. Pendidikan dan Berkualitas
    a. Persentase keluarga dengan akses ke SD terdekat mencapai 100%
    b. Persentase keluarga dengan akses ke SMP terdekat mencapai 100%
    c. Persentase keluarga dengan akses ke SMA terdekat mencapai 100%
    d. Persentase keluarga dengan akses ke Pesantren terdekat mencapai 100%
    e. APK SD mencapai 100%
    f. APK SMA mencapai 100%
    g. APM SD mencapai 100%
    h. APM SMP mencapai 100%
    i. APM SMA mencapai 100%
    j. Rata-rata lama sekolah penduduk >20 tahun mencapai 12 tahun
    k. Persentase RT yang memiliki taman bacaan masyarakat
5. Keterlibatan Perempuan Desa
    a. Persentase Keberadaan perdes/SK terkait gender
    b. Persentase Keberadaan perdes/SK terkait jaminan untuk perempuan
    c. APK SMA mencapai 100%
    d. Persentase jumlah perempuan di Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan perangkat desa minimal 30%
6. Layak Sanitasi dan Air Bersih
    a. Persentase keluarga dengan akses terhadap air minum layak mencapai 100%
    b. Persentase keluarga dengan akses terhadap sanitasi layak mencapai 100%
    c. Keluarga yang dilayani air baku mencapai 100%
    d. Keluarga pengguna fasilitas air limbah mencapai 100%
    e. Kualitas sumber air tidak berwarna, tidak berbau, tidak berasa di seluruh RT
    f. Terdapat perdes/SK Kades tentang penggunaan air tanah, tata kelola sumber daya air

g. Tersedianya perdes/SK Kades pelestarian lingkungan di sekitar aliran sungai

7. Desa Berenergi Bersih dan Terbarukan
   a. Keluarga pengguna listrik mencapai 100%
   b. Keluarga pengguna gas atau sampah kayu untuk memasak mencapai 100%
8. Pertumbuhan Ekonomi Desa Merata
   a. PDB Desa rata-rata di atas Rp 30 juta
   b. Pekerja sektor formal minimal 51%
   c. Tingkat pengangguran terbuka 0%
   d. Angkatan kerja baru yang dilatih mencapai 100%
9. Infrastruktur dan Inovasi Desa sesuai Kebutuhan
   a. Jalan kondisi baik mencapai 100%
   b. Dermaga/tambatan perahu kondisi baik mencapai 100%
   c. Industri yang mencemari udara mencapai 0%
10. Desa Tanpa Kesenjangan
    a. Koefisien Gini desa di bawah 0,200
    b. Jumlah pekerja peserta BPJS Ketenagakerjaan mencapai 100%
    c. Tersedia perdes/SK Kades tentang advokasi pekerja migran
11. Kawasan Permukiman Desa Aman dan Nyaman
    a. Rumah kumuh mencapai 0%
    b. Pengamanan dilaksanakan di 100% RT
    c. Keluarga, orang tua, perempuan dan difabel pengguna moda transportasi umum >50%
    d. Swasta dan organisasi kemasyarakatan cangkrukan untuk pembangunan desa
    e. Tersedia peringatan dini bencana
    f. Terdapat pengolahan sampah dan penanganan sampah keluarga mencapai 100%
    g. Terdapat taman/lapangan di desa
12. Konsumsi dan Produksi Desa Sadar Lingkungan
    a. Tersedia Perdes/SK Kades tentang kegiatan usaha yang tidak menimbulkan pencemaran dan pengelolaan limbah serta sampah rumah tangga
    b. Tersedia unit pengolah sampah
13. Desa Tanggap Perubahan Iklim
    a. Penanganan/mitigasi bencana mencakup 100% terhadap peluang kebencanaan tiap RT

14. Desa Damai Berkeadilan
    a. Tersedia perdes/SK Kades tentang tata ruang desa dan perlindungan sumber daya laut.
    b. Tidak ada ilegal fishing.
15. Kelembagaan Desa Dinamis dan Budaya Desa Adaptif
    a. Tersedia perdes/SK Kades tentang pelestarian keanekaragaman hayati
    b. Luas lahan hutan rusak dan lahan kritis di hutan mencapai 0%, pemanfaatan kayu dari hutan yang direstorasi
16. Desa Damai Berkeadilan
    a. Terselenggara gotong royong antar penduduk berbeda agama, ras, golongan
    b. Pekerja anak mencapai 0%
    c. Laporan pertanggungjawaban Kades dan laporan keuangan diterima dalam Musdes
    d. Tingkat kepuasan layanan pemerintah desa tinggi
    e. Perempuan dalam BPD dan perangkat desa mencapai minimal 30%
    f. Penanganan terhadap aduan pelanggaran karena suku, agama, rasa dan golongan mencapai 100%
17. Desa berjejaring
    a. Rasio penerimaan perpajakan terhadap PDB Desa di atas 12% per tahun
18. Kelembagaan Desa Dinamis dan Budaya yang apatif
    a. Kegiatan tolong menolong yang didasarkan pada ajaran agama
    b. Tokoh agama berpartisipasi dalam musdes dan implementasi pembangunan desa
    c. Pelaksanaan musdes minimal 4 kali setahun
    d. Budaya yang dilestarikan mencapai 100%, lembaga adat aktif
    e. Penyelesaian masalah sosial melalui pendekatan budaya >50%

Status desa berdasarkan perkembangan kemajuan kalurahan dapat dinilai dengan menggunakan Indeks Desa (ID). Indeks Desa merupakan sistem tunggal yang digunakan oleh pemerintah Indonesia untuk mengukur kemajuan pembangunan desa di seluruh wilayah. Indeks ini bertujuan untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai kondisi desa, yang mencakup berbagai aspek seperti layanan dasar, sosial, ekonomi, lingkungan, aksesibilitas, dan tata kelola pemerintahan desa. Hasil pengukuran Indeks Desa 2026 akan digunakan sebagai dasar dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan desa, serta untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan.

Pada tahun 2026 status Indeks Desa (ID) Kalurahan Patalan berstatus Mandiri dengan nilai 91,81 dengan total skor ID 583.

Tabel 3.2 Indeks Kalurahan Patalan Tahun 2026

NO	PERTANYAAN	SKOR	HASIL PENDATAAN INDEKS DESA	INTERVENSI KEGIATAN (SESUAI PERMENDES 7 TAHUN 2023)	KODE REKENING	PELAKSANA KEGIATAN				
						PUSAT	PROVINSI	KABUPATEN	DESA	Lain-nya
1	**LAYANAN DASAR**	**158**								
1.A	**SUB-DIMENSI PENDIDIKAN**	**45**								
1	**AKSES TERHADAP PAUD/TK/Sederajat**	**15**								
a	SKOR Keberadaan PAUD/TK/Sederajat di Desa	5	Terdapat >=5 PAUD/TK/Sederajat		2 Bidang Pendidikan 2.1 Sub Bidang Pendidikan 2.1.01 Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/ ** 2.1.02 Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst) 2.1.06 Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan /Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga Edukatif (APE) .....**	Kemendikbud, Kemendagri, Kementerian PUPR	Dinas PMD, Dinas Dikbud, Dinas PUPR	Dinas Dikbud, Dinas PMD, Dinas PUPR	Desa	Swasta
b	SKOR Kemudahan Akses menuju PAUD/TK/Sederajat terdekat di Desa	5	Akses Menuju PAUD/TK/Sederajat Sangat Mudah		2.1.02 Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst)	Kemendikbud, Kemendagri, Kementerian PUPR	Dinas PMD, Dinas Dikbud, Dinas PUPR	Dinas Dikbud, Dinas PMD, Dinas PUPR	Desa	Swasta
c	SKOR Angka Partisipasi Murni (APM) anak usia 3 - 6 tahun yang bersekolah PAUD/TK/Sederajat di desa	5	Angka Partisipasi Murni (APM) >80-100%		2.1.03 Penyuluhan dan Pelatihan bagi Masyarakat	Kemendikbud, Kemendagri, Kementerian PUPR	Dinas PMD, Dinas Dikbud, Dinas PUPR	Dinas Dikbud, Dinas PMD, Dinas PUPR	Desa	Swasta
2	**AKSES TERHADAP SD/MI/Sederajat**	**10**								

NO	PERTANYAAN	SKOR	HASIL PENDATAAN INDEKS DESA	INTERVENSI KEGIATAN (SESUAI PERMENDES 7 TAHUN 2023)	KODE REKENING	PELAKSANA KEGIATAN				
						PUSAT	PROVINSI	KABUPATEN	DESA	Lain-nya
a	SKOR Kemudahan Akses menuju SD/MI/Sederajat terdekat di Desa	5	Akses Menuju SD/MI/Sederajat Sangat Mudah		2.3.01 Pemeliharaan Jalan Desa 2.3.02 Pemeliharaan Jalan Lingkungan Permukiman /Gang	Kemendikbud, Kemendagri, Kementerian PUPR	Dinas PMD, Dinas Dikbud, Dinas PUPR	Dinas Dikbud, Dinas PMD, Dinas PUPR	Desa	Swasta
b	SKOR Angka Partisipasi Murni (APM) anak usia 7-12 tahun yang bersekolah SD/MI/Sederajat di desa	5	Angka Partisipasi Murni (APM) >80-100%		2.1.03 Penyuluhan dan Pelatihan bagi Masyarakat	Kemendikbud, Kemendagri, Kementerian PUPR	Dinas PMD, Dinas Dikbud, Dinas PUPR	Dinas Dikbud, Dinas PMD, Dinas PUPR	Desa	Swasta
3	**AKSES TERHADAP SMP/MTs/Sederajat**	**10**								
a	SKOR Kemudahan Akses menuju SMP/MTs/Sederajat terdekat di Desa	5	Akses Menuju SMP/MTs/Sederajat Sangat Mudah		2.3.01 Pemeliharaan Jalan Desa 2.3.02 Pemeliharaan Jalan Lingkungan Permukiman /Gang	Kemendikbud, Kemendagri, Kementerian PUPR	Dinas PMD, Dinas Dikbud, Dinas PUPR	Dinas PMD, Dinas PUPR	Desa	Swasta
b	SKOR Angka Partisipasi Murni (APM) anak usia 13-15 tahun yang bersekolah SMP/MTs/Sederajat di desa	5	Angka Partisipasi Murni (APM) >80-100%		2.1.03 Penyuluhan dan Pelatihan bagi Masyarakat	Kemendikbud, Kemendagri, Kementerian PUPR	Dinas PMD, Dinas Dikbud, Dinas PUPR	Dinas PMD, Dinas PUPR	Desa	Swasta
4	**AKSES TERHADAP SMA/SMK/MA/MAK/Sederajat**	**10**								
a	SKOR Kemudahan Akses menuju SMA/SMK/MA/MAK/Sederajat terdekat di Desa	5	Akses Menuju SMA/SMK/MA/MAK/Sederajat Sangat Mudah		2.3.01 Pemeliharaan Jalan Desa 2.3.02 Pemeliharaan Jalan Lingkungan Permukiman /Gang	Kemendikbud, Kemendagri, Kementerian PUPR	Dinas PMD, Dinas Dikbud, Dinas PUPR	Dinas PMD, Dinas PUPR	Desa	Swasta
b	SKOR Angka Partisipasi Murni (APM) anak usia 16-18 tahun yang bersekolah SMA/SMK/MA/MAK/Sederajat di desa	5	Angka Partisipasi Murni (APM) >80-100%		2.1.03 Penyuluhan dan Pelatihan bagi Masyarakat	Kemendikbud, Kemendagri, Kementerian PUPR	Dinas PMD, Dinas Dikbud, Dinas PUPR	Dinas PMD, Dinas PUPR	Desa	Swasta
1.B	**SUB-DIMENSI KESEHATAN**	**92**								
5	**Layanan Sarana Kesehatan**	**5**								
a	SKOR Kemudahan akses menuju Sarana Kesehatan	5	Akses Menuju Sarana Kesehatan Sangat Mudah		2.3.01 Pemeliharaan Jalan Desa 2.3.02 Pemeliharaan Jalan Lingkungan Permukiman /Gang	Kemenkes, Kemen PUPR	Dinas PUPR	Dinas Kesehatan, DPMD, Dinas PUPR	Desa	Swasta
6	**Fasilitas Puskesmas Pembantu (Pustu)**	**8**								
a	SKOR Keberadaan Fasilitas Puskesmas Pembantu (Pustu) termasuk Poskesdes/Polindes di Desa	5	Terdapat Poskesdes/Polindes		2.2.01 Penyelenggaraan PKD/Polindes Milik Desa 2.2.02 Penyelenggaraan Posyandu 2.2.09 Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan / Pengadaan Sarana /Prasarana Posyandu / Polindes / PKD	Kemenkes, Kemen PUPR	Dinas PUPR	Dinas Kesehatan, DPMD, Dinas PUPR	Desa	Swasta

NO	PERTANYAAN	SKOR	HASIL PENDATAAN INDEKS DESA	INTERVENSI KEGIATAN (SESUAI PERMENDES 7 TAHUN 2023)	KODE REKENING	PELAKSANA KEGIATAN				
						PUSAT	PROVINSI	KABUPATEN	DESA	Lain-nya
					2.2.08 Pemeliharaan Sarana/ Prasarana Posyandu/ Polindes/PKD					
b	SKOR Kemudahan akses menuju Fasilitas Puskesmas Pembantu (Pustu) termasuk Kesehatan Poskesdes/Polindes	3	Akses Menuju Fasilitas Puskesmas Pembantu (Poskesdes/ Polindes) Sedang	Pembangunan, Pemeliharaan Infrastruktur & Ketersediaan Transportasi menuju Fasilitas Puskesmas Pembantu/ Poskesdes/ Polindes di Desa, sehingga memudahkan baik dari jarak, waktu dan ketersediaan sarana transportasi	2.2.04 Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan 2.2.09 Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan / Pengadaan Sarana /Prasarana Posyandu / Polindes / PKD 2.2.08 Pemeliharaan Sarana/ Prasarana Posyandu/ Polindes/PKD	Kemenkes, Kemen PUPR	Dinas PUPR	Dinas Kesehatan, DPMD, Dinas PUPR	Desa	Swasta
7	**Aktivitas Posyandu**	**15**								
a	SKOR Ketersediaan Fasilitas Posyandu di Desa	5	Terdapat Posyandu		2.2.01 Penyelenggaraan PKD/Polindes Milik Desa 2.2.02 Penyelenggaraan Posyandu 2.2.09 Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan / Pengadaan Sarana /Prasarana Posyandu / Polindes / PKD 2.2.08 Pemeliharaan Sarana/ Prasarana Posyandu/ Polindes/PKD	Kemenkes, Kemen PUPR	Dinas PUPR	Dinas Kesehatan, DPMD, Dinas PUPR	Desa	
b	SKOR Keberadaan Aktivitas Posyandu	5	Aktivitas Posyandu Ada dan Rutin >=8 Kali Per Tahun		2.2.01 Penyelenggaraan PKD/Polindes Milik Desa 2.2.02 Penyelenggaraan Posyandu 2.2.03 Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan 2.2.09 Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan / Pengadaan Sarana /Prasarana Posyandu / Polindes / PKD 2.2.08 Pemeliharaan Sarana/ Prasarana Posyandu/ Polindes/PK	Kemenkes, Kemen PUPR	Dinas PUPR	Dinas Kesehatan, DPMD, Dinas PUPR	Pemdes	Swasta

NO	PERTANYAAN	SKOR	HASIL PENDATAAN INDEKS DESA	INTERVENSI KEGIATAN (SESUAI PERMENDES 7 TAHUN 2023)	KODE REKENING	PELAKSANA KEGIATAN				
						PUSAT	PROVINSI	KABUPATEN	DESA	Lain-nya
c	SKOR Kemudahan akses menuju Fasilitas Posyandu	5	Akses Menuju Fasilitas Posyandu Sangat Mudah		2.2.01 Penyelenggaraan PKD/Polindes Milik Desa (Obat-obatan; tambanagan Insentif Bidan Desa/Perawat Desa; Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi keluarga miskin, dst) 2.2.02 Penyelenggaraan Posyandu 2.2.03 Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan 2.2.09 Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan / Pengadaan Sarana /Prasarana Posyandu / Polindes / PKD 2.2.08 Pemeliharaan Sarana/ Prasarana Posyandu/ Polindes/PK	Kemenkes, Kemen PUPR	Dinas PUPR	Dinas Kesehatan, DPMD, Dinas PUPR	Pemdes	Swasta
8	**Layanan Dokter**	**20**								
a	SKOR Ketersediaan layanan dokter di desa	5	Tersedia Layanan Dokter di Desa		Supra Desa dan Swasta	Kemenkes, Kemen PUPR	Dinas PUPR	Dinas Kesehatan, DPMD, Dinas PUPR	Pemdes	Swasta
b	SKOR Operasional ketersediaan layanan dokter di desa	5	Layanan Dokter Tersedia 1 Kali dalam Seminggu		Supra Desa dan Swasta	Kemenkes, Kemen PUPR	Dinas PUPR	Dinas Kesehatan, DPMD, Dinas PUPR	Pemdes	Swasta
c	SKOR Penyedia layanan dokter di desa	5	Penyedia Layanan Dokter berasal dari Pemerintah		Supra Desa dan Swasta	Kemenkes, Kemen PUPR	Dinas PUPR	Dinas Kesehatan, DPMD, Dinas PUPR	Pemdes	Swasta
d	SKOR Keberadaan Penyedia Transportasi penunjang menuju layanan Dokter	5	Tersedia Sarana Transportasi Penunjang Menuju Layanan Dokter		2.2.90-99 lain-lain kegiatan sub bidang kesehatan	Kemenkes, Kemen PUPR	Dinas PUPR	Dinas Kesehatan, DPMD, Dinas PUPR	Pemdes	Swasta
9	**Layanan Bidan**	**20**								
a	SKOR Ketersediaan layanan Bidan di Desa	5	Tersedia Layanan Bidan di Desa		Supra Desa dan Swasta	Kemenkes, Kemen PUPR	Dinas PUPR	Dinas Kesehatan, DPMD, Dinas PUPR	Pemdes	Swasta
b	SKOR Operasional ketersediaan layanan Bidan di desa	5	Layanan Bidan Tersedia 1 Kali dalam Seminggu		Supra Desa dan Swasta	Kemenkes, Kemen PUPR	Dinas PUPR	Dinas Kesehatan, DPMD, Dinas PUPR	Pemdes	Swasta
c	SKOR Penyedia layanan Bidan di desa	5	Penyedia Layanan Bidan berasal dari Pemerintah		Supra Desa dan Swasta	Kemenkes, Kemen PUPR	Dinas PUPR	Dinas Kesehatan, DPMD, Dinas PUPR	Pemdes	Swasta
d	SKOR Keberadaan Penyedia Transportasi penunjang menuju layanan Bidan	5	Tersedia Sarana Transportasi Penunjang Menuju Layanan Bidan		2.2.90-99 lain-lain kegiatan sub bidang kesehatan	Kemenkes, Kemen PUPR	Dinas PUPR	Dinas Kesehatan, DPMD, Dinas PUPR	Pemdes	Swasta

NO	PERTANYAAN	SKOR	HASIL PENDATAAN INDEKS DESA	INTERVENSI KEGIATAN (SESUAI PERMENDES 7 TAHUN 2023)	KODE REKENING	PELAKSANA KEGIATAN				
						PUSAT	PROVINSI	KABUPATEN	DESA	Lain-nya
10	**Layanan Tenaga Kesehatan Lainnya**	**18**								
a	SKOR Ketersediaan layanan Tenaga Kesehatan di Desa	5	Tersedia Layanan Tenaga Kesehatan di Desa		Supra Desa dan Swasta	Kemenkes, Kemen PUPR	Dinas PUPR	Dinas Kesehatan, DPMD, Dinas PUPR	Pemdes	Swasta
b	SKOR Operasional ketersediaan layanan Tenaga Kesehatan di desa	5	Layanan Tenaga Kesehatan Lainnya Tersedia 1 Kali dalam Seminggu		Supra Desa dan Swasta	Kemenkes, Kemen PUPR	Dinas PUPR	Dinas Kesehatan, DPMD, Dinas PUPR	Pemdes	Swasta
c	SKOR Penyedia layanan Tenaga Kesehatan di desa	3	Penyedia Layanan Tenaga Kesehatan Lainnya berasal dari Yayasan/Swasta/Masyarakat	Penyediaan Layanan Tenaga Kesehatan Lainnya di Desa oleh Supra Desa dan Swasta	Supra Desa dan Swasta	Kemenkes, Kemen PUPR	Dinas PUPR	Dinas Kesehatan, DPMD, Dinas PUPR	Pemdes	Swasta
d	SKOR Keberadaan Penyedia Transportasi penunjang menuju layanan Nakes	5	Tersedia Sarana Transportasi Penunjang Menuju Layanan Tenaga Kesehatan Lainnya		2.2.90-99 lain-lain kegiatan sub bidang kesehatan	Kemenkes, Kemen PUPR	Dinas PUPR	Dinas Kesehatan, DPMD, Dinas PUPR	Pemdes	Swasta
11	**Jaminan Kesehatan Nasional**	**6**								
a	SKOR Persentase keanggotaan BPJS	5	Persentase Keanggotaan BPJS >80-100%		2.2.03 Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masyarakat, Tenaga Kesehatan, Kader Kesehatan, dll)	Kemenkes, Kemen PUPR	Dinas PUPR	Dinas Kesehatan, DPMD, Dinas PUPR	Pemdes	Swasta
b	SKOR Keberadaan kegiatan sosialisasi dan/atau advokasi terkait program jaminan kesehatan nasional di desa	1	Tidak Terdapat Kegiatan Sosialisasi dan/atau Advokasi terkait Program Jaminan Kesehatan Nasional di Desa	Melaksanakan sosialisasi, promosi dan advokasi kebijakan pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional melalui komunikasi, informasi dan edukasi	2.2.03 Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masyarakat, Tenaga Kesehatan, Kader Kesehatan, dll)	Kemenkes, Kemen PUPR	Dinas PUPR	Dinas Kesehatan, DPMD, Dinas PUPR	Pemdes	Swasta
1.C	**Sub-Dimensi Utilitas Dasar**	**21**								
12	**Rumah Tangga dengan Air Minum Aman**	**16**								
a	SKOR Operasional Ketersediaan Air Minum di Desa dalam seminggu	5	Air Minum Tersedia Setiap Hari		2.4.03 Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air/ Tandon Penampungan Air Hujan/ Sumur Bor dll) 2.4.04 Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga	PAMSIMAS, PU	Dinas PUPR	Dinas PUPR, Dinas Kesehatan, DPMD, PDAM	Pemdes	Swasta

NO	PERTANYAAN	SKOR	HASIL PENDATAAN INDEKS DESA	INTERVENSI KEGIATAN (SESUAI PERMENDES 7 TAHUN 2023)	KODE REKENING	PELAKSANA KEGIATAN				
						PUSAT	PROVINSI	KABUPATEN	DESA	Lain-nya
					(pipanisasi dll) 2.4.10 Pembangunan / Rehaboilitasi / Peningkatan Sumur Resapan** 2.4.11 Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan SAB Milik Desa (Mata Air / Tandon Penampungan Air Hujan / Sumur Bor dll)** 2.4.12 Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga**					
b	SKOR Ketersediaan Air Minum untuk warga desa	3	Sebagian Warga di Desa yang Bisa Mengakses Air Minum (50-100% Terakses)	Melaksanakan pembangunan, pemeliharaan dan pengembangan sarana prasarana air minum	2.4.03 Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air/ Tandon Penampungan Air Hujan/ Sumur Bor dll) 2.4.04 Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (pipanisasi dll) 2.4.10 Pembangunan / Rehaboilitasi / Peningkatan Sumur Resapan** 2.4.11 Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan SAB Milik Desa (Mata Air / Tandon Penampungan Air Hujan / Sumur Bor dll)** 2.4.12 Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga**	PAMSIMAS, PU	Dinas PUPR	Dinas PUPR, Dinas Kesehatan, DPMD, PDAM	Pemdes	Swasta
c	SKOR Kemudahan akses Air Minum untuk warga di desa	3	Akses Air Minum Sedang (Sebagian Sudah Terlayani PDAM dan Sebagian Lainnya Menggunakan Air Tanah)	Melaksanakan pembangunan, pemeliharaan dan pengembangan sarana prasarana air minum	2.4.03 Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air/ Tandon Penampungan Air Hujan/ Sumur Bor dll) 2.4.04 Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (pipanisasi dll) 2.4.10 Pembangunan / Rehaboilitasi / Peningkatan Sumur Resapan** 2.4.11 Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan SAB Milik Desa (Mata Air / Tandon Penampungan Air Hujan / Sumur Bor dll)** 2.4.12 Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga**	PAMSIMAS, PU	Dinas PUPR	Dinas PUPR, Dinas Kesehatan, DPMD, PDAM	Pemdes	Swasta

NO	PERTANYAAN	SKOR	HASIL PENDATAAN INDEKS DESA	INTERVENSI KEGIATAN (SESUAI PERMENDES 7 TAHUN 2023)	KODE REKENING	PELAKSANA KEGIATAN				
						PUSAT	PROVINSI	KABUPATEN	DESA	Lain-nya
d	SKOR Kualitas Air Minum di Desa (Tidak untuk Berbau, Berwarna, & Berasa)	5	Kualitas Air Minum Layak (Tidak Berbau, Tidak Berwarna dan Tidak Berasa)		2.4.03 Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air/ Tandon Penampungan Air Hujan/ Sumur Bor dll) 2.4.04 Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (pipanisasi dll) 2.4.10 Pembangunan / Rehaboilitasi / Peningkatan Sumur Resapan** 2.4.11 Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan SAB Milik Desa (Mata Air / Tandon Penampungan Air Hujan / Sumur Bor dll)** 2.4.12 Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga** 2.4.12 Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan Sambungan Air Bersih lainnya	PAMSIMAS, PU	Dinas PUPR	Dinas PUPR, Dinas Kesehatan, DPMD, PDAM	Pemdes	Swasta
13	**Persentase Rumah Tidak Layak Huni**	**5**								
a	SKOR Persentase Rumah Tidak Layak Huni	5	Persentase Rumah Tidak Layak Huni 0-20%		2.4. Sub Bidang Kawasan Permukiman 2.4.01 Dukungan Pelaksanaan Perogram Pembangunan / Rehab RTLH, GAKIN (Pemetaan, validasi, dll)	PAMSIMAS, PU	Dinas PUPR	Dinas PUPR, Dinas Kesehatan, DPMD, PDAM	Pemdes	Swasta
2	**SOSIAL**	**79**								
2.A	**SUB-DIMENSI AKTIVITAS**	**64**								
14	**Kearifan Sosial/Budaya dan Keagamaan**	**10**								
a	SKOR Keberadaan kearifan budaya/sosial/keagamaan yang ada/menjadi ciri khas desa	5	Terdapat Kearifan Budaya/Sosial/Keagamaan yang Ada/Menjadi Ciri Khas Desa		3.2.01 Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa 3.2.03 Penyelenggaraan Festival Kesenian, adat/kebudayaan dan keagamaan (perayaan hari kemerdesaan hari besar keagamaan dll) tingkat desa 3.2.04 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/ Rumah adat/ keagamaan milik desa** 3.2.05 Pembangunan/ Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa**	Kemendesa PDT, Kemendikbudristek, Kemenag, Kemenparekraf	Dinas PMD, Dians Pariwisata	Dinas PMD, Dinas Pariwisata	Pemdes, Lembaga Adat, Karang Taruna	Swasta

NO	PERTANYAAN	SKOR	HASIL PENDATAAN INDEKS DESA	INTERVENSI KEGIATAN (SESUAI PERMENDES 7 TAHUN 2023)	KODE REKENING	PELAKSANA KEGIATAN				
						PUSAT	PROVINSI	KABUPATEN	DESA	Lain-nya
b	SKOR Jumlah Kearifan budaya/sosial yang masih dipertahankan/dilestarikan	5	Lebih dari 3 Kearifan Budaya/Sosial yang Dipertahankan		3.2.01 Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa 3.2.03 Penyelenggaraan Festival Kesenian, adat/kebudayaan dan keagamaan (perayaan hari kemerdesaan hari besar keagamaan dll) tingkat desa 3.2.04 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/ Rumah adat/ keagamaan milik desa** 3.2.05 Pembangunan/ Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa**	Kemendesa PDT, Kemendikbudristek, Kemenag, Kemenparekraf	Dinas PMD, Dians Pariwisata, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Dinas PMD, Dians Pariwisata, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pemdes, Lembaga Adat, Kelompok Seni, Karang Taruna	Swasta
15	**Frekuensi Gotong Royong**	**15**								
a	SKOR Keberadaan kegiatan gotong royong di Desa	5	Terdapat Kegiatan Gotong Royong di Desa		3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa 4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	Kemendagri, Kemendesa PDT, Kemensos	Dinas PMD, Dinas Sosial	Dinas PMD, Dinas Sosial	Lembaga Kemasyarakatan Desa (LPMD/ RT/RW), Pemdes, Karang Taruna	Swasta
b	SKOR Frekuensi Kegiatan Gotong Royong di desa	5	Terdapat >2 Kegiatan Gotong Royong di Desa dalam 1 Bulan		3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa 4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	Kemendagri, Kemendesa PDT, Kemensos	Dinas PMD, Dinas Sosial	Dinas PMD, Dinas Sosial	Lembaga Kemasyarakatan Desa (LPMD/ RT/RW), Pemdes, Karang Taruna, Kelompok Pemuda	Swasta
c	SKOR Keterlibatan warga dalam kegiatan gotong royong	5	Sebagian Besar Warga Terlibat (>= 50% Warga Terlibat)		3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa 4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	Kemendagri, Kemendesa PDT, Kemensos	Dinas PMD, Dinas Sosial	Dinas PMD, Dinas Sosial	Lembaga Kemasyarakatan Desa (LPMD/ RT/RW), Pemdes, Karang Taruna, Kelompok Pemuda	Swasta
16	**Kegiatan Olahraga**	**4**								
a	SKOR Frekuensi Aktivitas Kegiatan Olahraga dilakukan dalam satu bulan	4	Terdapat 4-5 Kali Kegiatan Olahraga dalam 1 Bulan	Mendorong adanya aktivitas olahraga di Desa	3.3.03 Penyelenggaraan Festival / Lomba Kepemudaan dan Olahraga tingkat Desa	Kemenpora, Kemendesa,Koni, Lembaga Olah Raga nasional	Dispora, Dinkes	Dispora, Dinkes	Pemdes, karang Taruna, PKK	Klub Olahraga,Pusat Studi Olah Raga, kampus

NO	PERTANYAAN	SKOR	HASIL PENDATAAN INDEKS DESA	INTERVENSI KEGIATAN (SESUAI PERMENDES 7 TAHUN 2023)	KODE REKENING	PELAKSANA KEGIATAN				
						PUSAT	PROVINSI	KABUPATEN	DESA	Lain-nya
17	**Mitigasi dan Penanganan Konflik Sosial**	**25**								
a	SKOR Penyelesaian Konflik secara damai	5	Ada Penyelesaian Konflik Secara Damai)		1.5.04 Mediasi Konflik Pertanahan 3.1.03 Koordinasi Pembinaan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat (dengan masyarakat/instansi pemerintah daerah, dll) skala lokal desa 3.1.07 Pelatihan/Penyuluhan/sosialisasi kepada masyarkat di bidang hukum dan perlindungan masyarakat	Kemendagri, kemenkum dan HAM, kemenkopolhukam, BIN, Kepolisian, TNI	Kesbangpol ,Dinas Kominfo, Dinas Sosial	Kesbangpol,Dinas Kominfo, Dinas Kesejahteraan Sosial, Dinas PMD	Lembaga Kemasyarakatan Desa (LPMD/RT/RW), Pemdes, Karang Taruna, Kelompok Pemuda, Tokoh Masyarakat dan Adat	Fasilitator Mediasi Akademis, Kampus
b	SKOR Peranan aparat keamanan menjadi mediator / penengah dalam penyelesaian Konflik	5	Ada Peranan Aparat Keamanan menjadi Mediator/ Penengah dalam Penyelesaian Konflik		1.5.04 Mediasi Konflik Pertanahan 3.1.03 Koordinasi Pembinaan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat (dengan masyarakat/instansi pemerintah daerah, dll) skala lokal desa 3.1.07 Pelatihan/Penyuluhan/sosialisasi kepada masyarkat di bidang hukum dan perlindungan masyarakat	Kemenko Polhukam, Kemendagri, Kemenhan, Polri, TNI	Satpol PP,Dinsos, Forkopinda	Satpol PP,Dinsos, Forkopinda	pemdes, LKS, Lembaga Mediasi Swasta	Akademisi, Pakar Konsflik dan Perdamaian
c	SKOR Peranan aparat pemerintah menjadi mediator / penengah dalam penyelesaian Konflik	5	Ada Peranan Aparat Pemerintah menjadi Mediator/ Penengah dalam Penyelesaian Konflik		1.5.04 Mediasi Konflik Pertanahan 3.1.03 Koordinasi Pembinaan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat (dengan masyarakat/instansi pemerintah daerah, dll) skala lokal desa 3.1.07 Pelatihan/Penyuluhan/sosialisasi kepada masyarkat di bidang hukum dan perlindungan masyarakat	Kemendagri, Kemendesa PDTT, Kemenko Polhukam, Kemenkumham, BNPB, Lemhannas, BPN	Kesbangpol , Dinas PMD	Kesbangpol, Dinas PMD, Dinsos	Pemdes, BPD	LSM, Akademisi, Pusat Studi konflik
d	SKOR Peranan tokoh masyarakat menjadi mediator / penengah dalam penyelesaian Konflik	5	Ada Peranan Tokoh Masyarakat menjadi Mediator/ Penengah dalam Penyelesaian Konflik		1.5.04 Mediasi Konflik Pertanahan 3.1.03 Koordinasi Pembinaan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat (dengan masyarakat/instansi pemerintah daerah, dll) skala lokal desa 3.1.07 Pelatihan/Penyuluhan/sosialisasi kepada masyarkat di bidang hukum dan	Kemendagri, Kemendesa PDTT,Kemenag, Kemenko PMK, BNPT, LIPI, MUI	Dinas PMD, Dinas Pariwisata, Kesbangpol	Dinas PMD, Dinsos, Dinas pendidikan	Pemdes, BPD	LSM, Akademisi, Pusat Kajian Konflik dan Perdamaian

NO	PERTANYAAN	SKOR	HASIL PENDATAAN INDEKS DESA	INTERVENSI KEGIATAN (SESUAI PERMENDES 7 TAHUN 2023)	KODE REKENING	PELAKSANA KEGIATAN				
						PUSAT	PROVINSI	KABUPATEN	DESA	Lain-nya
					perlindungan masyarakat					
e	SKOR Peranan tokoh agama menjadi mediator / penengah dalam penyelesaian Konflik	5	Ada Peranan Tokoh Agama menjadi Mediator/ Penengah dalam Penyelesaian Konflik		1.5.04 Mediasi Konflik Pertanahan 3.1.03 Koordinasi Pembinaan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat (dengan masyarakat/instansi pemerintah daerah, dll) skala lokal desa 3.1.07 Pelatihan/Penyuluhan/sosialisasi kepada masyarkat di bidang hukum dan perlindungan masyarakat	Kemenag, Kemenko PMK, Kemendagri, MUI, Konferensi Waligereja Indonesia, BNPT	Kesbangpol, Dinsos, Dinas PMD,	Kesbangpol, Dinsos, Dinas PMD, Dias Dikbud	Pemdes, BPD,	LSM Keagamaan, Swasta, Akademisi, Pusat Studi Agama dan Perdamaian
18	**Satkamling**	**10**								
a	SKOR Keberadaan Satuan Keamanan Lingkungan (Satkamling) di Desa	5	Ada Satuan Keamanan Lingkungan (Satkamling) di Desa		3.1.01 Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa (Pembangunan Pos, Pengawasan pelaksanaan jadwal ronda/patroli dll) 3.1.02 Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan / Ketertiban oleh Pemerintah Desa (Satlinmas desa)	Kemendagri, Kemenko Polhukam, Kemendesa PDTT, Polri, BNPT,BIN	Kesbangpol, Dinas PMD,Forkopinda	Kesbangpol, Dinas PMD,Forkopinda	Pemdes, BPD, RT/RW	Akademisi, Pusat Studi Keamanan
b	SKOR Aktivitas Satuan Keamanan Lingkungan (Satkamling) di Desa	5	Terdapat >3 Kali Aktivitas Satkamling di Desa		3.1.01 Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa (Pembangunan Pos, Pengawasan pelaksanaan jadwal ronda/patroli dll) 3.1.02 Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan / Ketertiban oleh Pemerintah Desa (Satlinmas desa)	Kemendagri, Kemendesa PDTT, Kemenko Polhukam, Polri, TNI, BNPT, BIN	Kesbangpol, Dinas PMD	Kesbangpol, Dinas PMD	Pemdes, BPD, RT/RW, Tokoh Masyarakat	Akademisi, Pusat Studi Keamanan
2.B	**SUB-DIMENSI FASILITAS MASYARAKAT**	**15**								
19	**Taman Bacaan Masyarakat/ Perpustakaan Desa**	**9**								
a	SKOR Keberadaan Taman Bacaan Masyarakat/ Perpustakaan Desa	5	Ada Taman Bacaan Masyarakat/ Perpustakaan Desa		2.1.04 Pemeliharaan Sarpras Perpustakaan / Taman bacaan / Sanggar Milik Desa** 2.1.07 Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan Sarpras Perpustakaan / Taman Bacaan Desa**	Kemendibudristek, Kemendagri, Kemendesa PDTT, Perpustakaan nasional, Bakti-Kominfo, Badan pengembangan dan	Dinas perpustakaan dan Kearsipan, Dinas Dikbud, Diskominfo	Dinas perpustakaan dan Kearsipan, Dinas Dikbud, Diskominfo, Dinas PMD	Pemdes, Karang Taruna, RT, RW, Kader Literasi Desa	Swasta, LSM, Akademisi, Pusat Studi Literasi, Mahasiswa

NO	PERTANYAAN	SKOR	HASIL PENDATAAN INDEKS DESA	INTERVENSI KEGIATAN (SESUAI PERMENDES 7 TAHUN 2023)	KODE REKENING	PELAKSANA KEGIATAN				
						PUSAT	PROVINSI	KABUPATEN	DESA	Lain-nya
						Pembinaan Bahasa				
b	SKOR Operasional Taman Bacaan Masyarakat/ Perpustakaan Desa	4	Taman Bacaan Masyarakat/ Perpustakaan Desa Beroperasi Selama 4-5 Hari	Sosialisasi, pengelolaan, pelayanan, dan pengembangan Taman bacaan masyarakat / perpustakaan desa	2.1.03 Penyuluhan dan pelatihan bagi masyarakat 2.1.08 Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku-buku bacaan, Honor Penjaga untuk perpustakaan)	Kemendikbudristek, Kemendagri, Kemendesa PDTT, Perpusnas, Bakti-Kominfo, Badan pengembangan dan pembinaan bahasa	Dinas perpustakaan dan Kearsipan, Dinas Dikbud, Diskominfo	Dinas perpustakaan dan Kearsipan, Dinas Dikbud, Diskominfo, Dinas PMD	Pemdes, Karang Taruna, RT, RW, Kader Literasi Desa	Swasta, LSM, Akademisi, Pusat Studi Literasi, Mahasiswa
20	**Fasilitas Olahraga**	**4**								
a	SKOR Ketersediaan Fasilitas dan kondisi/keadaan sebagian besar Fasilitas olahraga di Desa	4	Rata-rata Kondisi/ Keadaan Sebagian Besar Fasilitas Olahraga di Desa dalam Kondisi Rusak Ringan	pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana atau prasarana olahraga	3.3.05 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasaran Kepemudaan dan Olah raga milik Desa ** 3.3.04 Pemeliharaan Saran dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga Milik Desa**	Kemenpora, Kemendesa PDTT, KONI, Lembaga Pengelola Dana Hibah,	Dispora, Dinas PU, Dinas Kesehatan	Dispora, Dinas PUPR, Dinas Kesehatan, Dinas Pariwisata	Pemdes, Karang Taruna, kelompok Pemuda, BPD	Swasta, Akademisi, Pusat Penelitian dan Pengembangan Olahraga
21	**Keberadaan Ruang Publik Terbuka**	**2**								
a	SKOR Keberadaan ruang publik terbuka/keadaan sebagian besar Fasilitas Ruang Publik Terbuka di Desa	2	Rata-rata Kondisi/ Keadaan Sebagian Besar Fasilitas Ruang Publik Terbuka di Desa dalam Kondisi Rusak Parah	Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana atau prasarana olahraga, keterampilan, adat atau budaya	2.4.17 Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan Taman / Taman Bermain Anak Milik Desa** 2.4.09 Pemeliharaan Taman/Taman Bermain Milik Desa	KemenPUPR, Kemendesa PDTT, KLHK, Bappenas, Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup, LSM	Dinas PUPR, DLH,	Dinas PUPR, DLH,	Pemdes, BPD,	Swasta, Akademisi, Badan Penelitian tata Kota dan Lingkungan
3	**EKONOMI**	**150**								
3.A	**SUB-DIMENSI PRODUKSI DESA**	**40**								
22	**Keragaman Aktivitas Ekonomi**	**10**								

NO	PERTANYAAN	SKOR	HASIL PENDATAAN INDEKS DESA	INTERVENSI KEGIATAN (SESUAI PERMENDES 7 TAHUN 2023)	KODE REKENING	PELAKSANA KEGIATAN				
						PUSAT	PROVINSI	KABUPATEN	DESA	Lain-nya
a	SKOR Keragaman Aktivitas Ekonomi di Desa	5	Terdapat >2 Keragaman Sektor/ Aktivitas Ekonomi		2.8.01 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa 2.8.02 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milk Desa 2.8.03 Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa** 2.5.01 Pengelolaan Hutan Milik Desa 2.5.02 Pengelolaan Lingkungan Hidup Desa 4.1 Sub Bidang Kelautan dan Perikanan 4.2 Sub Bidang Pertanian dan Peternakan 4.5 Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah 4.6 Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal 4.7 Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	Kemendesa PDTT, Kemenkop UKM, Kemendag, Kementan, Kemenparekraf, LPDB, BUMN, Lembaga Penelitian dan Pengembangan	Dinas Kop dan UMKM, Dinas Perindag	Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas Perindag, Dinas Parekraf	Pemdes, BPD, Kelompok Tani, Nelayan dan Pengrajin Desa	Swasta, Koperasi, Bumdes, Akademisi, Pusat Penelitian Ekonomi dan Desa
b	SKOR Keaktifan Aktivitas Ekonomi di Desa	5	Keaktifan Aktivitas Ekonomi di Desa Aktif (Memiliki Produk/ Jasa yang Dihasilkan)		4.1 Sub Bidang Kelautan dan Perikanan 4.2 Sub Bidang Pertanian dan Peternakan 4.5 Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah 4.6 Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal 4.7 Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	Kemendesa PDTT, Kemenkop & UMKM, Kementan, Kemendag, BUMN, Lembaga Penelitian Ekonomi dan Kebijakan Publik, Lembaga Keuangan dan Bank BUMN	Dinas Kop dan UMKM, Dinas Perindag, Dinas Pariwisata	Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas Pertanian, Dinas Pariwisata dan kebudayaan, Dinas Tenaga Kerja	Pemdes, BPD, Kelompok Tani, Pengrajin Desa,	Swasta, Akademisi, Pusat Penelitian Ekonomi dan Sosial
23	**Produk Unggulan Desa**	**15**								
a	SKOR Keberadaan Produk Unggulan Desa	5	Ada Produk Unggulan Desa		4.2.03 Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa, dll) 4.5.01 Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/KUD/UMKM 4.5.02 Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Ekcil dan menengah serta Koperasi 4.5.03 Pengadaan Teknologi Tepat Guna untuk Pengembangan Ekonomi Perdesaan Non-Pertanian 4.7.03 Pengembangan Industri Keci Level Desa 4.7.04 Pembentukan/Fasilitasi /Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi peroduktif (Pengrajin, pedagang,	Kemendesa PDTT, Kementan, Kemenperin, Kemenkop UKM, Kemenparekraf, Kemendag, BPS, BUMN, LIPI, Brin	Dinas pMD, Disperindag, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Dinas pariwisata dan Kebudayaan	Dinas pMD, Disperindag, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Dinas pariwisata dan Kebudayaan	Pemdes, Bumdes,	Akademisi, Pusat Penelitian dan Inovasi Universitas

NO	PERTANYAAN	SKOR	HASIL PENDATAAN INDEKS DESA	INTERVENSI KEGIATAN (SESUAI PERMENDES 7 TAHUN 2023)	KODE REKENING	PELAKSANA KEGIATAN				
						PUSAT	PROVINSI	KABUPATEN	DESA	Lain-nya
					industri rumah tangga, dll)					
b	SKOR Cakupan Penjualan Hasil Produk Unggulan Desa	5	Cakupan Penjualan Produk Unggulan Desa Sampai ke Luar Desa		4.2.03 Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa, dll) 4.5.01 Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/KUD/UMKM 4.5.02 Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Ekcil dan menengah serta Koperasi 4.5.03 Pengadaan Teknologi Tepat Guna untuk Pengembangan Ekonomi Perdesaan Non-Pertanian 4.7.03 Pengembangan Industri Kecil Level Desa 4.7.04 Pembentukan/Fasilitasi /Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi peroduktif (Pengrajin, pedangan, industri rumah tangga, dll)	Kemendesa PDTT, Kementan, Kemenperin, Kemendag, BPS, BKPM	Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas Perdagangan, Dinas Pertanian	Dinas pMD, Disperindag	Pemdes, Bumdes, Kelompok Tani, Kelompok Usaha	Swasta, Akademisi
c	SKOR Ketersediaan merek dagang	5	Merek Dagang Produk Unggulan Desa Sudah Terdaftar		4.5.01 Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/KUD/UMKM 4.5.02 Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Ekcil dan menengah serta Koperasi 4.5.03 Pengadaan Teknologi Tepat Guna untuk Pengembangan Ekonomi Perdesaan Non-Pertanian 4.7.04 Pembentukan/Fasilitasi /Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi peroduktif (Pengrajin, pedangan, industri rumah tangga, dll)	Kemenkumham, Kemendesa PDTT, Kemendag, Kemenperin, BSN, Lembaga Pengkajian dan Pengembangan	Disperindag, Dinas Koperasi dan UKM	Disperindag, Dinas PMD	Pemdes, Bumdes,	Swasta, Akademisi
24	**Ekonomi Kreatif**	**5**								

NO	PERTANYAAN	SKOR	HASIL PENDATAAN INDEKS DESA	INTERVENSI KEGIATAN (SESUAI PERMENDES 7 TAHUN 2023)	KODE REKENING	PELAKSANA KEGIATAN				
						PUSAT	PROVINSI	KABUPATEN	DESA	Lain-nya
a	SKOR Keberadaan Kearifan lokal atau kebudayaan lokal yang di jadikan sebagai kegiatan ekonomi dalam menunjang penghidupan masyarakat di desa	5	Ada Kearifan Lokal atau Kebudayaan Lokal yang dijadikan Sebagai Kegiatan Ekonomi dalam Menunjang Penghidupan Masyarakat di Desa		3.2.01 Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa 3.2.03 Penyelenggaraan Festival Kesenian, adat/kebudayaan dan keagamaan (perayaan hari kemerdesaan hari besar keagamaan dll) tingkat desa 3.2.04 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/ Rumah adat/ keagamaan milik desa** 3.2.05 Pembangunan/ Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa**	Kemenparekraf, Kemendikbudristek, Kemendesa PDTT, Kemendag, Bekraf, Lembaga Kebudayaan Lokal	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Dinas Koperasi daan UKM, Dinas Pendidikan	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Dinas PMD, Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Pemdes, Bumdes, Kelompok Masyarakat Adat dan Budaya	Swasta, Akademisi
25	**Kerjasama Desa**	**10**								
a	SKOR Kerjasama desa dengan desa lainnya	5	Sudah Ada Kerjasama Desa dengan Desa Lainnya		1.4.09 Koodinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (Antar Desa/Kecamatan/Kabupaten, Pihak ketiga, dll)**	Kemendesa PDTT,Kemendagri, Kemenko PMK,BKPM, LPM	Dinas PMD, Dinas Perdagangan, Dinas Koperasi dan UKM	Dinas PMD, Disperindag, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Pemdes, Bumdes, Kelompok Masyarakat	Swasta, Akademisi
b	SKOR Kerjasama desa dengan pihak ketiga	5	Sudah Ada Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga		1.4.09 Koodinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (Antar Desa/Kecamatan/Kabupaten, Pihak ketiga, dll)**	Kemendesa PDTT, Kemendagri, Kementerian Perdagangan, Kementerian Koperasi dan UKM, BKPM, BUMN, LSM	Dinas PMD, Disperindag, Dinas Koperasi dan UKM	Dinas PMD, Disperindag, Dinas Lingkungan Hidup	Pemdes, Bumdes, Kelompok Masyarakat	Swasta, Akademisi
3.B	**SUB-DIMENSI FASILTAS PENDUKUNG EKONOMI**	**110**								
26	**Akses Terhadap Pendidikan Non-formal/Pusat Keterampilan/Kursus**	**8**								
a	SKOR Ketersediaan Pendidikan Non-formal/Pusat Keterampilan/Kursus	5	Ada Tersedia Pendidikan Non-Formal/ Pusat Keterampilan/ Kursus di Desa		4.7.04 Pembentukan/Fasilitasi /Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif (Pengrajin. Pedagang, Industri Rumah Tangga, dll)	Kemendikbudristek, Kemenaker, Kemendesa PDTT,Kemenkos, BNSP, Perpustakaan Nasional, LPKS	Dinas Pendidikan, Dinas Ketenagakerjaan, Disperindag	Dinas Pendidikan, Dinas Ketenagakerjaan, Dinas Koperasi dan UKM	Pemdes, Bumdes, Kelompok Masyarakat	Swasta, Akademisi
b	SKOR Keterlibatan Angkatan Kerja pada Pendidikan Non-formal/Pusat Keterampilan/Kursus	3	Pendidikan Non-Formal/ Pusat Keterampilan/ Kursus Melibatkan Sebagian Kecil/ <50% Angkatan Kerja yang Tidak	Pengembangan kapasitas ekonomi produktif dan kewirausahaan masyarakat Desa melalui Pendidikan	4.7.04 Pembentukan/Fasilitasi /Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif (Pengrajin. Pedagang, Industri Rumah Tangga, dll)	Kemenaker, Kemendikbudristek, Kemendesa PDTT, Kemenperin, BNSP, Bappenas, BUMN	Dinas Ketenagakerjaan, Dinas Pendidikan, Disperindag	Dinas Ketenagakerjaan, Dinas Pendidikan, Dinas Koperasi dan UKM	Pemdes, Bumdes, Kelompok Pemuda Desa	Swasta, Akademisi

NO	PERTANYAAN	SKOR	HASIL PENDATAAN INDEKS DESA	INTERVENSI KEGIATAN (SESUAI PERMENDES 7 TAHUN 2023)	KODE REKENING	PELAKSANA KEGIATAN				
						PUSAT	PROVINSI	KABUPATEN	DESA	Lain-nya
			Bekerja di Desa	Non-formal/Pusat Keterampilan/Kursus di Desa						
27	**Pasar Rakyat**	**8**								
a	SKOR Ketersediaan Pasar di Desa	5	Tersedia Pasar di Desa		4.7.02 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pasar Desa/Kios milik Desa** 4.7.01 Pemeliharaan Pasar Desa/ Kios milik Desa 4.7.03 Pengembangan Industri Kecil level Desa	Kemendesa PDTT, Kemendag, Kementerian Koperasi dan UKM, Kementan, LPDB-KUMKM, BKPM, Perpustakaan Nasional dan Lembaga Arsip Daerah	Disperindag, Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Pertanian	Dinas Perdagangan, Dinas Koperasi dana UKM, Dinas Pertanian dan Perikanan	Pemdes, Bumdes, Kelompok Tani dan Pengrajin	Swasta, Akademisi
b	SKOR Kemudahan akses menuju pasar di Desa	3	Akses Menuju Pasar di Desa Sedang	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan infrastruktur menuju pasar di Desa	4.7.02 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pasar Desa/Kios milik Desa** 4.7.01 Pemeliharaan Pasar Desa/ Kios milik Desa 4.7.03 Pengembangan Industri Kecil level Desa 2.3.01 Pemeliharaan Jalan Desa 2.3.02 Pemeliharaan Jalan Lingkungan Permukiman /Gang	Kementerian PUPR, Kemenhub, Kemendesa PDTT, Kementan, BPIW, BNPB, LKPP	Dinas PUPR, Dinas Perhubungan, Dinas Pembangunan	Dinas PUPR, Dinas Perhubungan, Dinas PMD	Pemdes, Bumdes, Kelompok Masyarakat	Swasta, Akademisi
28	**Toko/Pertokoan**	**10**								
a	SKOR Ketersediaan Toko/Pertokoan di Desa	5	Tersedia Toko/ Pertokoan di Desa		4.7.02 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pasar Desa/Kios milik Desa** 4.7.01 Pemeliharaan Pasar Desa/ Kios milik Desa 4.7.03 Pengembangan Industri Kecil level Desa	Kemendesa PDTT, Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian PUPR, Kemendag, LPDB-KUMKM, BPIW, BKPM	Dinas Koperasi dan UKM, Disperindag, Dinas PU dan Penataan Ruang	Disperindag, Dinas Koperasi dan UKM, Dinas PU	Pemdes, Bumdes, Kelompok Masyarakat	Swasta, Akademisi
b	SKOR Kemudahan akses menuju toko/pertokoan di Desa	5	Akses Menuju Toko/ Pertokoan di Desa Sangat Mudah		4.7.02 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pasar Desa/Kios milik Desa** 4.7.01 Pemeliharaan Pasar Desa/ Kios milik Desa 4.7.03 Pengembangan Industri Kecil level Desa 2.3.01 Pemeliharaan Jalan Desa 2.3.02 Pemeliharaan Jalan Lingkungan Permukiman /Gang	Kemendesa PDTT, Kementerian PUPR, Kemenhub, Kemendag, BPIW, BNPB, LPDB-KUMKM	Dinas PUPR, Dishub, Disperindag	Dinas PU, Dishub, Disperindag	Pemdes, Bumdes, Kelompok Masyarakat	Swasta, Akademisi
29	**Kedai/Rumah Makan**	**10**								

NO	PERTANYAAN	SKOR	HASIL PENDATAAN INDEKS DESA	INTERVENSI KEGIATAN (SESUAI PERMENDES 7 TAHUN 2023)	KODE REKENING	PELAKSANA KEGIATAN				
						PUSAT	PROVINSI	KABUPATEN	DESA	Lain-nya
a	SKOR Ketersediaan Kedai/Rumah Makan di Desa	5	Tersedia Kedai/ Rumah Makan di Desa		4.7.02 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pasar Desa/Kios milik Desa** 4.7.01 Pemeliharaan Pasar Desa/ Kios milik Desa 4.7.03 Pengembangan Industri Kecil level Desa	Kemendesa PDTT, Kemenparekraf, Kementerian Koperasi dan UKM, Kemendag, LPDB-KUMKM, Bekraf, BKPM	Dinas Koperasi dan UKM, Disperindag, Dinas Pariwisata	Dinas Koperasi dan UKM, Disperindag, Dinas Pariwisata	Pemdes, Bumdes, Kelompok Masyarakat	Swasta, Akademisi
b	SKOR Kemudahan akses menuju Kedai/Rumah Makan di Desa	5	Akses Menuju Kedai/ Rumah Makan di Desa Sangat Mudah		2.3.01 Pemeliharaan Jalan Desa 2.3.02 Pemeliharaan Jalan Lingkungan Permukiman /Gang	Kemendesa PDTT, Kementerian PUPR, kemenhub, Kemenparekraf, BPIW, Bekraf, LPDB-KUMKM	Dias PUPR, Dishub, Dinas Pariwisata	Dinas PU, Dishub, Dinas Pariwisata	Pemdes, Bumdes, Kelompok Masyarakat	Swasta, Akademisi
30	**Penginapan**	**10**								
a	SKOR Ketersediaan Penginapan di Desa	5	Tersedia Penginapan di Desa		4.7.02 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pasar Desa/Kios milik Desa** 4.7.01 Pemeliharaan Pasar Desa/ Kios milik Desa 4.7.03 Pengembangan Industri Kecil level Desa	Kemendesa PDTT, Kemenparekraf, Kementerian Koperasi dan UKM, Kemendag, Bekraf, BPIW, LPDB-KUMKM	Dinas Pariwisata, Dinas PUPR, Dinas Perdagangan dan Koperasi	Dinas Pariwisata, Dinas PU, Dinas Perdagangan dan Koperasi	Pemdes, Bumdes, Kelompok Masyarakat	Swasta, Akademisi
b	SKOR Kemudahan akses menuju Penginapan di Desa	5	Akses Menuju Penginapan di Desa Sangat Mudah		2.3.01 Pemeliharaan Jalan Desa 2.3.02 Pemeliharaan Jalan Lingkungan Permukiman /Gang	Kemendesa PDTT, Kementerian PUPR, Kemenhub, Kemenparekraf, BPIW-Bekraf, LPDB-KUMKM	Dinas PUPR, Dishub, Dinas Pariwisata	Dinas PU, Dishub, Dinas Pariwisata	Pemdes, Bumdes, Kelompok Masyarakat	Swasta, Akademisi
31	**Layanan Pos dan Logistik**	**10**								
a	SKOR Ketersediaan Layanan Pos dan Logistik di Desa	5	Tersedia Layanan Pos dan Logistik di Desa		Supra Desa	Kemendesa PDTT, Kementerian Kominfo, Kemenhub, BUMN, PT Pos Indonesia, Bulog, BPOM	Dishub, Diskominfo, Dinas Koperasi dan UKM	Dishub, Diskominfo, Dinas Koeprasi dan UKM	Pemdes, Bumdes, Kelompok Masyarakat	Swasta, Akademisi
b	SKOR Kemudahan akses menuju Layanan Pos dan Logistik di Desa	5	Akses Menuju Layanan Pos dan Logistik di Desa Sangat Mudah		2.3.01 Pemeliharaan Jalan Desa 2.3.02 Pemeliharaan Jalan Lingkungan Permukiman /Gang	Kemendesa PDTT, Kementerian Kominfo, Kemenhub, BUMN, PT Pos Indonesia, Bulog, BPOM	Dishub, Diskominfo, Dinas Perdagangan	Dishub, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Koperasi dan UKM	Pemdes, Bumdes, Kelompok Masyarakat	Swasta, Akademisi
32	**Lembaga Ekonomi**	**25**								

NO	PERTANYAAN	SKOR	HASIL PENDATAAN INDEKS DESA	INTERVENSI KEGIATAN (SESUAI PERMENDES 7 TAHUN 2023)	KODE REKENING	PELAKSANA KEGIATAN				
						PUSAT	PROVINSI	KABUPATEN	DESA	Lain-nya
a	SKOR Keberadaan BUM Desa/BUM Desa Bersama di Desa	5	Terdapat BUMDesa/ Bumdesa Bersama di Desa		4.6.01 Pembentukan BUM Desa (Persiapan dan Pembentukan Awal BUM Desa) 4.6.02 Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yang dilaksanakan oleh Desa)	Kemendesa PDTT, Kementerian Koperasi dan UKM, Kemenkeu, Kementerian BUMN, BUMN, Lembaga Pengembangan Ekonomi,Bappenas	Dinas PMD, Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Perdagangan	Dinas PMD,Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Perdagangan	Pemdes, Bumdes	Swasta, Akademisi
b	SKOR BUM Desa/BUM Desa Bersama sudah berbadan hukum	5	BUMDesa/ Bumdesa Bersama di Desa Sudah Berbadan Hukum		4.6.01 Pembentukan BUM Desa (Persiapan dan Pembentukan Awal BUM Desa) 4.6.02 Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yang dilaksanakan oleh Desa)	Kemendesa PDTT, Kemenkumham, Kementerian Koperasi dan UKM, BKPM, LPED	Dinas PMD, Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Perdagangan	Dinas PMD,Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Perdagangan	Pemdes, Bumdes	Swasta, Akademisi
c	SKOR Operasional BUM Desa/BUM Desa Bersama	4	Waktu Pelayanan BUMDes/ BUMDESMA Beroperasi 4-5 Hari Seminggu	Peningkatan kapasitas dalam Pengelolaan aktifitas dan jenis usaha BUMDes / BUMDesma	4.6.01 Pembentukan BUM Desa (Persiapan dan Pembentukan Awal BUM Desa) 4.6.02 Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yang dilaksanakan oleh Desa)	Kemendesa PDTT, Kementeian Koperasi dan UKM, Kemenkeu, BKPM, LPED	Dinas PMD, Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Perdagangan	Dinas PMD,Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Perdagangan	Pemdes, Bumdes	Swasta, Akademisi
d	SKOR Ketersediaan Lembaga Ekonomi lainnya di Desa (selain BUM Desa/BUM Desa bersama)	5	Tersedia Lembaga Ekonomi Lainnya (Selain BUMDes/ BUMDESMA) di Desa		4.6.01 Pembentukan BUM Desa (Persiapan dan Pembentukan Awal BUM Desa) 4.6.02 Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yang dilaksanakan oleh Desa) 4.7.03 Pengembangan Industri Kecil Level Desa 4.7.04 Pembentukan/Fasilitasi /Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi peroduktif (Pengrajin, pedangan, industri rumah tangga, dll)	Kemendesa PDTT, Kementerian Koperasi dan UKM, Kemenkeu, Kemensos, BKPM, LPED, OJK	Dinas PMD, Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Perdagangan	Dinas PMD,Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Perdagangan	Pemdes	Swasta, Akademisi
e	SKOR Ketersediaan Lembaga Ekonomi KUD	1	Tidak Tersedia KUD di Desa	Fasilitasi izin usaha Lembaga Ekonomi KUD	4.5.01 Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/KUD/UMKM 4.5.02 Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Ekcil dan menengah serta Koperasi	Kemendesa PDTT, Kementerian Koperasi dan UKM, Kemenkeu, Kemensos, BKPM, LPED, OJK	Dinas PMD, Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Perdagangan	Dinas PMD,Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Perdagangan	Pemdes, Lembaga Ekonomi	Swasta, Akademisi
f	SKOR Ketersediaan Lembaga Ekonomi UMKM	5	Tersedia UMKM di Desa		4.5.01 Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/KUD/UMKM 4.5.02 Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil dan menengah serta Koperasi	Kemenkop UKM, Kemendesa PDTT, Kemendag, kemenkeu, Bekraf, BKPM, OJK, Lembaga Pembiayaan	Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Perdagangan, Dinas Perindustrian	Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Perdagangan, Dinas Perindustrian	Pemdes, Lembaga Ekonomi	Swasta, Akademisi
33	**Layanan Keuangan**	**29**								

NO	PERTANYAAN	SKOR	HASIL PENDATAAN INDEKS DESA	INTERVENSI KEGIATAN (SESUAI PERMENDES 7 TAHUN 2023)	KODE REKENING	PELAKSANA KEGIATAN				
						PUSAT	PROVINSI	KABUPATEN	DESA	Lain-nya
a	SKOR Ketersediaan layanan perbankan di desa	5	Tersedia UMKM di Desa		4.5.01 Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/KUD/UMKM 4.5.02 Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil dan menengah serta Koperasi	Kemenkeu, BI, OJK, Kemendesa PDTT, BKPM, LKM	Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Perdagangan	Dinas Koperasi dan UKM, Dinsos	Pemdes, Lembaga Ekonomi	Swasta, Akademisi
b	SKOR Operasional layanan perbankan	4	Waktu Pelayanan Perbankan Beroperasi 4-5 Hari Seminggu	Fasilitasi layanan perbankan	Supra Desa	Kemenkeu, BI, OJK, Kemendesa PDTT, BKPM, LKM	Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Perdagangan	Dinas Koperasi dan UKM, Dinsos	Pemdes, Lembaga Ekonomi	Swasta, Akademisi
c	SKOR Keberadaan Layanan Fasilitas Kredit Berupa KUR	5	Terdapat Layanan Fasilitas Kredit Berupa KUR di Desa		Supra Desa	Kemenkeu, Kemenkop UKM, Kemendesa PDTT, OJK, Bank Pemerintah, Lembaga Keuangan Mikro, Aosiasi Perbankan Indonesia	Dinas Koperasi dan UKM, Disperindag	Dinas Koperasi dan UKM, Dinas PMD	Pemdes, Lembaga Ekonomi, lembaga Pengelola Keuangan Desa	Swasta, Akademisi
d	SKOR Keberadaan Layanan Fasilitas Kredit Berupa KKP-E	5	Terdapat Layanan Fasilitas Kredit Berupa KKP-E di Desa		Supra Desa	Kemenkop UKM, Kemenkeu, OJK, Kemendesa PDTT, Bank Pemerintah, Lembaga Keuangan Mikro	Dinas Koperasi dan UKM, Disperindag	Dinas Koperasi dan UKM, Dinas PMD	Pemdes, Lembaga Ekonomi, lembaga Pengelola Keuangan Desa	Swasta, Akademisi
e	SKOR Keberadaan Layanan Fasilitas Kredit Berupa KUK	5	Terdapat Layanan Fasilitas Kredit Berupa KUK di Desa		Supra Desa	Kemenkop UKM, Kemenkeu, OJK, Kemendesa PDTT, Bank Pemeintah, Lembaga Keuangan Mikro	Dinas Koperasi dan UKM, Disperindag	Dinas Koperasi dan UKM, Dinas PMD	Pemdes, Lembaga Ekonomi Desa	Swasta, Akademisi
f	SKOR Status Layanan Fasilitas Kredit di Desa	5	Status Layanan Fasilitas Kredit Sudah Resmi		Supra Desa	Kemenkeu, Kemenkop UKM, OJK, Bank Pemerintah, Lembaga Keuangan Mikro,lembaga Pembiayaan	Dinas Koperasi dan UKM, Disperindag	Dinas Koperasi dan UKM, Dinas PMD	Pemdes, Lembaga Ekonomi Desa	Swasta, Akademisi
4	**LINGKUNGAN**	**74**								
4.A	**SUB-DIMENSI PENGELOLAAN LINGKUNGAN**	**49**								
34	**Kearifan Lingkungan**	**8**								
a	SKOR Terdapat upaya menjaga/mempertahankan/melestarikan kearifan lingkungan berupa atraksi alam/sumberdaya	1	Tidak Terdapat Upaya Menjaga/ Mempertahankan/ Melestarikan Kearifan	Sosialisasi/ Pelatihan/ Penyuluhan/Penyadaran dalam pemanfaatan sumber daya alam	2.5.02 Pengelolaan Lingkungan Hidup	KLHK, Kemenparekraf, Kemendesa PDTT, Bappenas	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi, Dinas Pariwisata Provinsi,	Dinas Lingkungan Hidup Kab/Kota, Dinas Pariwisata Kab/Kota	Pemerintah Desa, Pokdarwis	LSM, Swasta, BUMDes, Akademisi

NO	PERTANYAAN	SKOR	HASIL PENDATAAN INDEKS DESA	INTERVENSI KEGIATAN (SESUAI PERMENDES 7 TAHUN 2023)	KODE REKENING	PELAKSANA KEGIATAN				
						PUSAT	PROVINSI	KABUPATEN	DESA	Lain-nya
	alam/keindahan alam yang ada di desa		Lingkungan di Desa	dan lingkungan secara berkelanjutan melalui pemanfaatan energi terbarukan, pengelolaan lingkungan desa, dan pelestarian sumber daya alam desa			Bappeda Provinsi			
b	SKOR Terdapat peraturan/regulasi yang mengatur terkait pelestarian lingkungan di Desa	1	Tidak Terdapat Peraturan Regulasi yang Mengatur Terkait Pelestarian Lingkungan di Desa	Penyusunan dan sosialisasi peraturan desa tentang Peningkatan Kapasitas Kelompok Masyarakat dalam Pengelolaan Energi Terbarukan dan Pelestarian Lingkungan Hidup	2.5.03 Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan/Penyadaran tentang Lingkungan Hidup dan Kehutanan 1.4.06 Penyusunan kebijakan desa	KLHK, Kemendagri, Kemendesa PDTT Bappenas, BSN	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi, Dinas Pemerdayaan Masyarakat Desa Provinsi	Dinas Lingkungan Hidup Kab/Kota, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kab/Kota	Pemerintah Desa, BPD, Lembaga Masyarakat Adat	LSM, Swasta, Akademisi
c	SKOR Terdapat kegiatan pelestarian lingkungan berbasis kearifan lokal di bidang lingkungan di Desa	5	Terdapat Kegiatan Pelestarian Lingkungan Berbasis Kearifan Lokal Bidang Lingkungan di Desa		2.5.02 Pengelolaan Lingkungan Hidup 2.5.03 Pelatihan/ Sosialisasi/ Penyuluhan/ Penyadaran tentang Lingkungan Hidup dan Kehutanan	KLHK, Kemenparekraf, Kemendesa PDTT, Bappenas	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi, Dinas Pariwisata Provinsi, Dinas Kebuudayaan Provinsi	Dinas Lingkungan Hidup Kab/Kota, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kab/Kota	Pemerintah Desa, Lembaga Masyarakat Adat	BUMDes, LSM, Swasta, Akademisi
d	SKOR Terdapat pemanfaatan Energi Baru Terbarukan di desa	1	Tidak Terdapat Pemanfaatan Energi Baru Terbarukan (EBT) di Desa	Sosialiasi, Pelatihan, Pengadaan, Pelestarian, Pemanfaatan Sumber Daya Alam serta Lingkungan secara Berkelanjutan melalui Energi Terbarukan	2.7.02 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif tingkat Desa** 2.7.01 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif tingkat Desa	Kementerian ESDM, Kemendesa PDTT, KLHK, Bappenas, BPPT	Dinas ESDM Provinsi, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi	Dinas ESDM Kab/Kota, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab/Kota	Pemerintah Desa, Kelompok Masyarakat	BUMDesa, Swasta, Akademisi
35	**Sistem Pengelolaan Sampah**	**11**								

NO	PERTANYAAN	SKOR	HASIL PENDATAAN INDEKS DESA	INTERVENSI KEGIATAN (SESUAI PERMENDES 7 TAHUN 2023)	KODE REKENING	PELAKSANA KEGIATAN				
						PUSAT	PROVINSI	KABUPATEN	DESA	Lain-nya
a	SKOR Ketersediaan Tempat Penampuangan Pembuangan Sampah di Desa	1	Sampah Tidak Dibuang ke Tempat Penampungan Sampah	Pembangunan, Perbaikan, dan Rehabilitasi Tempat Pembuangan Sampah	2.4.15 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman (Penampungan, Bank Sampah, dll) **	KLHK, Kemendesa PDTT, Bappenas	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi, Bappeda Provinsi, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Provinsi	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten/Kota	Pemerintah Desa,	BUMDesa, LSM, Swasta, Akademisi
b	SKOR Ketersediaan Pengolahan Sampah di desa	5	Dilakukan Pengolahan Sampah di Desa		2.4.15 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman (Penampungan, Bank Sampah, dll) **	KLHK, Kemendagri, Kemendesa PDTT, Bappenas, BPPT	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Provinsi	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten/Kota	Pemerintah Desa, Lembaga Masyarakat Desa, BPD	BUMDesa, Swasta, Akademisi
c	SKOR Ketersediaan Pemanfaatan Sampah di desa	5	Dilakukan Pemanfaatan Sampah di Desa		2.4.15 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman (Penampungan, Bank Sampah, dll) **	KLHK, Kemendagri, Kemendesa PDTT, Bappenas, BPPT	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Provinsi	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten/Kota	Pemerintah Desa	Swasta, LSM, BUMDesa Akademisi
36	**Tingkat Pencemaran Lingkungan**	**5**								
a	SKOR Rata-rata kejadian pencemaran lingkungan	5	Skor Kejadian Pencemaran Lingkungan Bernilai 0		2.4.15 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman (Penampungan, Bank Sampah, dll) ** 2.4.16 Pembuangan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainease, Air Limbah Rumah Tangga)**	KLHK, Kemendesa PDTT, Kementerian Perindustrian, Kementerian ESDM, Bappenas, BPPT	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi	Dinas Lingkungan Hidup Kab/Kota, Dinas Kesehatan Kab/Kota, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab/Kota	Pemerintah Desa	LSM, BUMDesa. Swasta, Akademisi
37	**Rumah Tangga Dengan Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik) Aman**	**25**								
a	SKOR Ketersediaan dan kepemilikan Jamban di Desa	5	Sebagian Besar Rumah Tangga Sudah Memiliki Jamban Individu (>=50%)		2.4.14 Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan Fasilitas Jamban Umum / MCK Umum**	KLHK, Kementerian Perindustrian, Kementerian ESDM, Kemendesa PDTT, Bappenas, BPPT	Dinas Kesehatan Provinsi, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Provinsi	Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten/Kota	Pemerintah Desa, BPD, Lembaga Masyarakat Desa	Swasta, BUMDesa, Akademisi

NO	PERTANYAAN	SKOR	HASIL PENDATAAN INDEKS DESA	INTERVENSI KEGIATAN (SESUAI PERMENDES 7 TAHUN 2023)	KODE REKENING	PELAKSANA KEGIATAN				
						PUSAT	PROVINSI	KABUPATEN	DESA	Lain-nya
b	SKOR Keberfungsian jamban	5	Jamban Berfungsi		2.4.06 Pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum / MCK Umum, dll	KLHK, Kemendesa Perindustrian, Kementerian ESDM, Kemendesa PDTT, Bappenas, BPPT	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota, Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten/Kota	Pemerintah Desa, BPD, Lembaga Masyarakat Desa	BUMDesa, LSM, Swasta, Akademisi
c	SKOR Ketersediaan Tangki Septik (Komunal/ Bersama)	5	Tersedia Tangki Septic Tank Sendiri/ Individu		2.4.14 Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan Fasilitas Jamban Umum / MCK Umum**	Kementerian PUPR, Kementerian Kesehatan, Kemendesa PDTT, Bappenas, BPPT	Dinas Perkim Provinsi, Dinas Kesehatan Provinsi	Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, Dinas PUPR Kabupaten/Kota, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Pemerintah Desa, BPD, Lembaga Masyarakat Desa	BUMDesa, LSM, Swasta, Akademisi
d	SKOR Keberfungsian Tangki Septik	5	Tangki Septic Tank Berfungsi		2.4.14 Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan Fasilitas Jamban Umum / MCK Umum**	Kementerian PUPR, Kementerian Kesehatan, Kemendesa PDTT, Bappenas, BPPT	Dinas Perkim Provinsi, Dinas Kesehatan Provinsi	Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, Dinas PUPR Kabupaten/Kota, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Pemerintah Desa, BPD, Lembaga Masyarakat Desa	BUMDesa, LSM, Swasta, Akademisi
e	SKOR Pembuangan Air Limbah Cair Rumah	5	Pembuangan Air Limbah Cair Rumah Memiliki Aliran Khusus (Seperti Lubang Khusus/ Resapan, dan Lainnya)		2.4.16 Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase. Air Limbah RT)** 2.4.08 Pemeliharanaan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase Air Limbah RT)	Kementerian PUPR, Kementerian Kesehatan, Kemendesa PDTT, Bappenas, BPPT	Dinas Perkim Provinsi, Dinas Kesehatan Provinsi	Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, Dinas PUPR Kabupaten/Kota, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Pemerintah Desa, BPD, Lembaga Masyarakat Desa	BUMDesa, LSM, Swasta, Akademisi
4.B	**SUB-DIMENSI PENANGGULANGAN BENCANA**	**25**								
38	**Penanggulangan Bencana**	**25**								
a	SKOR Ketersediaan Aspek informasi Kebencanaan	5	Tersedia Aspek Informasi Kebencanaan seperti Data Kejadian Bencana, Indeks Resiko Bencana dan Peta Rawan Bencana		"1.3.02 Penyusunan/Pendataan /Pemutakhiran Profil Desa (profil kependudukan dan potensi desa) 2.3.17 Pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa ** 1.4.02 Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya (musdus, rembug warga, dll., yang bersifat non-reguler sesuai kebutuhan desa) "1.4.02 Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya (musdus, rembug warga, dll., yang bersifat non-reguler sesuai kebutuhan desa) " Melakukan peyebarluasan	Kemendagri, Kemensos, Kemenkominfo, KLHK, BNPB, BMKG, BIG, LIPI	BPBD, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi	BPBD Kabupaten/Kota, Dinas kominfo Kabupaten/Kota, Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota	Pemerintah Desa, Lembaga Masyarakat Desa	LSM, Swasta, Akademisi

NO	PERTANYAAN	SKOR	HASIL PENDATAAN INDEKS DESA	INTERVENSI KEGIATAN (SESUAI PERMENDES 7 TAHUN 2023)	KODE REKENING	PELAKSANA KEGIATAN				
						PUSAT	PROVINSI	KABUPATEN	DESA	Lain-nya
					peringatan bahaya untuk masyarakat Desa (Misal : Pembuatan Poster/Baliho Informasi/Plakat/Pengumuman, dll)					
b	SKOR Ketersediaan Fasilitas Mitigasi Bencana	5	Tersedia Fasilitas Mitigasi Bencana (Peringatan Dini, Perlengkapan Keselamatan, Jalur Evakuasi		3.1.04 Pelatihan Kesiapsiagaan / Tanggap Bencana Skala Lokal Desa	Kemendagri, Kementerian PUPR, Kemensos, Kemenkominfo, KLHK, BNPB, BMKG, BIG, LIPI	BPBD, Dinas PUPR Provinsi, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi	BPBD Kabupaten/Kota, Dinas Pertanian Kabupaten/Kota, Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota	Pemerintah Desa, Lembaga Masyarakat Desa, Relawan Tanggap Bencana	LSM, Swasta, Akademisi
c	SKOR Kemudahan Akses Menuju Fasilitas Mitigasi Bencana	5	Akses Menuju Fasilitas Mitigasi Bencana di Desa Sangat Mudah		2.6.01 Pembuatan Rambu-rambu di Jalan Desa 2.6.05 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana & Prasarana Transportasi Desa 2.6.04 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Transportasi Desa. 3.1.05 Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa	Kemendagri, Kementerian PUPR, Kemensos, Kemenhub, BNPB, BMKG, BIG, LIPI	BPBD, Dinas PUPR Provinsi, Dinas Perhubungan Provinsi	BPBD Kabupaten/Kota, Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota, Dinas PUPR Kabupaten/Kota	Pemerintah Desa, Lembaga Masyarakat Desa, Relawan Tanggap Bencana	LSM, Swasta, Akademisi
d	SKOR Terdapat aktivitas Mitigasi dan atau Rehabilitasi Bencana di Desa	5	Ada Program Penanggulangan Bencana dalam Dokumen Perencanaan Desa dan Terealisasi		3.1.03 Koordinasi Pembinaan Ketentraman, Ketertiban, dan Pelindungan Masyarakat (dengan masyarakat/instansi pemerintah daerah, dll) Skala Lokal Desa 3.1.04 Pelatihan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa 3.4.04 Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan 2.1.03 Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan bagi Masyarakat 3.1.07 Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi dibidang hukum dan perlindungan masyarakat	Kemendagri, Kementerian PUPR, KLHK, Kemensos, BNPB, BMKG, BIG, LIPI	BPBD, Dinas PUPR Provinsi, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi	BPBD Kabupaten/Kota, Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota	Pemerintah Desa, Lembaga Masyarakat Desa, Relawan Tanggap Bencana	LSM, Swasta, Akademisi

NO	PERTANYAAN	SKOR	HASIL PENDATAAN INDEKS DESA	INTERVENSI KEGIATAN (SESUAI PERMENDES 7 TAHUN 2023)	KODE REKENING	PELAKSANA KEGIATAN				
						PUSAT	PROVINSI	KABUPATEN	DESA	Lain-nya
e	SKOR Ketersediaan Fasilitas Aspek Tanggap Darurat Bencana	5	Tersedia Titik Evakuasi, Pos Keamanan Bencana dan Alat Kesiasiagaan Bencana		5 Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak	Kemendagri, Kementerian PUPR, Kemenkominfo, Kemensos, BNPB, BMKG, BIG, LIPI	BPBD, Dinas PUPR Provinsi, Dinas Kesehatan Provinsi	BPBD Kabupaten/Kota, Dinas Sosial Kabupaten/Kota, Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota	Pemerintah Desa, Lembaga Masyarakat Desa, Relawan Tanggap Bencana	LSM, Swasta, Akademisi
5	**AKSESIBILITAS**	**47**								
5.A	**SUB-DIMENSI KONDISI AKSES JALAN**	**18**								
39	**Kondisi Jalan di desa**	**9**								
a	SKOR Jenis Permukaan Jalan sebagian besar di desa	5	Jenis Permukaan Jalan Sebagian Besar di Desa Berupa Aspal/ Beton		2.3.01 Pemeliharaan Jalan Desa 2.3.02 Pemeliharaan Jalan Lingkungan Permukiman /Gang 2.3.03 Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Kementerian PUPR, Kemendesa PDTT, Kemeterian Perhubungan, KLHK, LKPP, BIG, BUMN	Dinas PUPR Provinsi, Dinas Perhubungan Provinsi	Dinas PUPR Kabupaten/Kota, Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota	Pemerintah Desa, Lembaga Masyarakat Desa,	BUMDesa, LSM, Swasta, Akademisi
b	SKOR Kualitas sebagian besar jalan di Desa	4	Kualitas Sebagian Besar Jalan di Desa Rusak Sedang, Dapat Dilalui Setiap Hari	Pembangunan Jalan di Desa agar dapat dilalui Setiap Hari	2.3.01 Pemeliharaan Jalan Desa 2.3.02 Pemeliharaan Jalan Lingkungan Permukiman /Gang 2.3.03 Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Kementerian PUPR, Kemendesa PDTT, Kemeterian Perhubungan, KLHK, BPKP, BIG, BUMN	Dinas PUPR Provinsi, Dinas Perhubungan Provinsi	Dinas PUPR Kabupaten/Kota, Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota	Pemerintah Desa, Lembaga Masyarakat Desa,	BUMDesa, LSM, Swasta, Akademisi
40	**Kondisi Penerangan Jalan Utama Desa**	**9**								
a	SKOR Ketersediaan penerangan di jalan-jalan utama di desa	5	Tersedia Penerangan Jalan Umum (PJU) di Jalan Utama Desa		2.3.14 Peningkatan Prasarana Jalan Desa	Kementerian ESDM, Kemendesa PDTT, Kementerian PUPR, Kemenhub, PLN, LKPP, BUMN	Dinas ESDM Provinsi, Dinas Perhubungan Provinsi, Dinas PUPR Provinsi	Dinas PUPR Kabupaten/Kota, Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota	Pemerintah Desa, Lembaga Masyarakat Desa,	BUMDesa, Swasta, Akademisi
b	SKOR Operasional desa dalam penyediaan penerangan di jalan-jalan utama di desa	4	PJU Beroperasi 6-12 Jam dalam 1 Hari	Pengadaan Penerangan Jalan Umum EBT desa minimal >12 Jam perhari di Desa	2.3.14 Peningkatan Prasarana Jalan Desa	Kementerian ESDM, Kemendesa PDTT, Kemenkeu, KLHK, PLN, BUMN	Dinas ESDM Provinsi, Dinas Perhubungan Provinsi	Dinas PUPR Kabupaten/Kota, Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota	Pemerintah Desa, Lembaga Masyarakat Desa,	BUMDesa, Swasta, Akademisi
5.B	**SUB-DIMENSI KEMUDAHAN AKSES**	**29**								
41	**Keberadaan Angkutan Perdesaan/Angkutan Lokal/ Sejenis**	**9**								

NO	PERTANYAAN	SKOR	HASIL PENDATAAN INDEKS DESA	INTERVENSI KEGIATAN (SESUAI PERMENDES 7 TAHUN 2023)	KODE REKENING	PELAKSANA KEGIATAN				
						PUSAT	PROVINSI	KABUPATEN	DESA	Lain-nya
a	SKOR Keberadaan Angkutan Perdesaan/Angkutan Lokal/ Sejenis di Desa	5	Terdapat Angkutan Umum di Desa		Supra Desa	Kemenhub, Kemendesa PDTT, Kemenkeu, Perusahaan Otobus, BUMN Transportasi	Dinas PUPR Provinsi, Dinas Perhubungan Provinsi	Dinas PUPR Kabupaten/Kota, Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota	Pemerintah Desa, Lembaga Masyarakat Desa,	BUMDesa, Swasta, Akademisi
b	SKOR Operasional Angkutan Perdesaan/Angkutan Lokal/Sejenis di Desa	4	Transportasi Umum Beroperasi 4-6 Hari dalam, Seminggu	Mengoptimalkan operasional angkutan umum desa melalui penjadwalan, pemeliharaan dan dukungan layanan	Supra Desa	Kemenhub, Kemendesa PDTT, Kementerian PUPR, Kemenkeu, PLN, BUMN Transportasi	Dinas PUPR Provinsi, Dinas Perhubungan Provinsi	Dinas PUPR Kabupaten/Kota, Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota	Pemerintah Desa, Lembaga Masyarakat Desa,	BUMDesa, Swasta, Akademisi
42	**Akses Listrik**	**10**								
a	SKOR Ketersediaan Pelayanan Listrik untuk rumah di desa	5	Ada Sebagian Besar (>50%)Tersedia pelayanan Listrik Untuk Rumah di Desa		2.7.02 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif tingkat Desa** 2.7.01 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif tingkat Desa	Kementerian ESDM, Kemendesa PDTT, Kemenkeu, PLN, BUMN Lembaga Energi	Dinas PUPR Provinsi, Dinas ESDM Provinsi	Dinas PUPR Kabupaten/Kota, Dinas ESDM Kabupaten/Kota	Pemerintah Desa, Lembaga Masyarakat Desa,	BUMDesa, Swasta, Akademisi
b	SKOR Tersedia Lama Durasi layanan Listrik di Desa	5	Tersedia >12 Jam Layanan Listrik di Desa		Supra Desa	Kementerian ESDM, Kemendesa PDTT, Kemenkeu, Kementerian PUPR, PLN, BUMN Lembaga Energi Terbarukan	Dinas PUPR Provinsi, Dinas ESDM Provinsi	Dinas PUPR Kabupaten/Kota, Dinas ESDM Kabupaten/Kota	Pemerintah Desa, Lembaga Masyarakat Desa,	BUMDesa, Swasta, Akademisi
43	**Layanan Telekomunikasi**	**10**								
a	SKOR Ketersediaan Akses Telepon di sebagian besar wilayah Desa	5	Tersedia Akses Sinyal Telepon Kuat		Supra Desa	Kemenkominfo, Kemendesa PDTT, Kementerian PUPR, BAKTI, Lembaga Penyedia Telekomunikasi Nasional	Dinas Kominfo Provinsi	Dinas Kominfo Kabupaten/Kota, Dinas PUPR Kabupaten/Kota	Pemerintah Desa, Lembaga Masyarakat Desa,	BUMDesa, Swasta, Akademisi
b	SKOR Ketersediaan Akses Internet di sebagian besar wilayah Desa	5	Terdapat Akses Sinyal 5G dan 4G di Wilayah Desa		2.6.03 Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalisasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	Kemenkominfo, Kemendesa PDTT, Kementerian PUPR, BAKTI, Lembaga Penyedia Jasa Internet (ISP)	Dinas Kominfo Provinsi, Dinas PUPR Provinsi	Dinas Kominfo Kabupaten/Kota, Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kabupaten/Kota	Pemerintah Desa, Lembaga Masyarakat Desa,	BUMDesa, Swasta, Akademisi
6	**TATA KELOLA PEMERINTAHAN DESA**	**75**								

NO	PERTANYAAN	SKOR	HASIL PENDATAAN INDEKS DESA	INTERVENSI KEGIATAN (SESUAI PERMENDES 7 TAHUN 2023)	KODE REKENING	PELAKSANA KEGIATAN				
						PUSAT	PROVINSI	KABUPATEN	DESA	Lain-nya
6.A	**SUB-DIMENSI KELEMBAGAAN DAN PELAYANAN DESA**	**33**								
44	**Pelaksanaan Pelayanan dan Administrasi Desa**	**3**								
a	SKOR Pelaksanaan Pelayanan dan Administrasi Desa	3	Pelaksanaan Pelayanan dan Administrasi diberikan Hanya di Hari Kerja	Peningkatan Pelaksanaan Layanan dan Administrasi Desa dilakukan Setiap Hari	1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa 1.3.01 Pelayanan Administrasi umum dan kependudukan (Surat Pengantar / Pelayanan KTP. Akta kelahiran KK dll)	Kemendagri, Kemendesa PDTT, Kemenkeu, BPKP, Lembaga Administrasi Negara	Dinas Kesehatan Provinsi, BKD Provinsi	Dinas Kominfo Kabupaten/Kota, Dinas PMD Kabupaten/Kota	Pemerintah Desa, BPD,	Swasta, Akademisi
45	**Pemanfaatan Teknologi dalam Pelayanan Desa (SPBE)**	**20**								
a	SKOR Publikasi Informasi Pelayanan kepada masyarakat desa	5	Sudah Dilaksanakan Publikasi Informasi Pelayanan Kepada Masyarakat Desa		1.4.08 Pengembangan Sistem Informasi Desa 2.6.02 Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster/Baliho Informasi Penetapan/ LPJ dll)	Kemenkominfo, Kemendesa PDTT, Kemendagri, BAKTI, Komisi Informasi Pusat	Dinas Kominfo Provinsi, Dinas PMD Provinsi	Dinas Kominfo Kabupaten/Kota, Dinas PMD Kabupaten/Kota	Pemerintah Desa, Lembaga Masyarakat Desa,	BUMDesa, Swasta, Akademisi
b	SKOR Pelayanan Administrasi untuk masyarakat desa	5	Sudah Dilaksanakan Pelayanan Administrasi untuk Masyarakat Desa		1.3.01 Pelayanan Administrasi umum dan kependudukan (Surat Pengantar / Pelayanan KTP. Akta kelahiran KK dll)	Kemenkeu, Kemendesa PDTT, Kemendagri, Lembaga Administrasi Negara, Komisi Aparatur Sipil Negara	Dinas Kominfo Provinsi, Dinas PMD Provinsi	Dinas Kominfo Kabupaten/Kota, Dinas Dukcapil Kabupaten/Kota	Pemerintah Desa, BPD,	Swasta, Akademisi
c	SKOR Pelayanan Pengaduan untuk masyarakat desa	5	Sudah Dilaksanakan Pelayanan Pengaduan untuk Masyarakat Desa		1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa 1.4.08 Pengembangan Sistem Informasi Desa	Kemendagri, Kemendesa PDTT, Kemenkumham, KORI, Komisi Informasi Pusat	Dinas Kominfo Provinsi, Dinas PMD Provinsi	Dinas Kominfo Kabupaten/Kota, Dinas PMD Kabupaten/Kota	Pemerintah Desa, BPD,	Swasta, Akademisi
d	SKOR Pelayanan Lainnya untuk masyarakat desa	5	Sudah Dilaksanakan Pelayanan Lainnya untuk Masyarakat Desa		1.3.01 Pelayanan Administrasi umum dan kependudukan (Surat Pengantar / Pelayanan KTP. Akta kelahiran KK dll) 1.4.08 Pengembangan Sistem Informasi Desa	Kemendagri, Kemendesa PDTT, Kemenkes, BNPB, BPS	Dinas Kesehatan Provinsi, Dinas Sosial Provinsi	Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, Dinas PMD Kabupaten/Kota	Pemerintah Desa, BPD,	Swasta, Akademisi
46	**Musyawarah Desa**	**10**								
a	SKOR Frekuensi Musyawarah Desa selama setahun terakhir	5	Musdes Terlaksana >=10 Kali dalam Setahun Terakhir		1.4.01 Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa / Pembahasan APBDes 1.4.02 Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, rembug warga dll sesuai kebutuhan)	Kemendagri, Kemendesa PDTT, BPMD, Bappenas	Bappeda Provinsi, Dinas PMD Provinsi	Bappeda Kabupaten/Kota, Dinas PMD Kabupaten/Kota	Pemerintah Desa, BPD,	Swasta, Akademisi, LSM

NO	PERTANYAAN	SKOR	HASIL PENDATAAN INDEKS DESA	INTERVENSI KEGIATAN (SESUAI PERMENDES 7 TAHUN 2023)	KODE REKENING	PELAKSANA KEGIATAN				
						PUSAT	PROVINSI	KABUPATEN	DESA	Lain-nya
b	SKOR Musyawarah Desa dihadiri oleh unsur masyarakat atau unsur masyarakat lainnya	5	Musdes Dihadiri oleh Unsur Masyarakat atau Unsur Masyarakat Lainnya		1.4.01 Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa / Pembahasan APBDes 1.4.02 Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, rembug warga dll sesuai kebutuhan)	Kemendagri, Kemendesa PDTT, BPMD, Bappenas	Dinas Pendidikan Provinsi, Dinas PMD Provinsi	Dinas Sosial Kabupaten/Kota, Dinas PMD Kabupaten/Kota	Pemerintah Desa, BPD,	Swasta, Akademisi, LSM
6.B	**SUB-DIMENSI TATA KELOLA KEUANGAN DESA**	**42**								
47	**Pendapatan Asli Desa (PADes) dan Dana Desa**	**15**								
a	SKOR Pendapatan Asli Desa	5	Terdapat Pendapan Asli Desa (PADes)			Kemendagri, Kemendesa PDTT, Kemenkeu, BPMD, BPKP	Dinas Parekraf Provinsi, Dinas PMD Provinsi	Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten/Kota, Dinas PMD Kabupaten/Kota	Pemerintah Desa	BUMDesa, Swasta, Akademisi
b	SKOR Peningkatan PADes	5	PADes Meningkat >1%			Kemendagri, Kemendesa PDTT, Kemenkeu, Kemenparekraf, BPMD, Bappenas, BPKP	Dinas Parekraf Provinsi, Dinas PMD Provinsi	Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten/Kota, Dinas PMD Kabupaten/Kota	Pemerintah Desa	BUMDesa, Swasta, Akademisi
c	SKOR Ketersediaan Penyertaan Modal dari Dana Desa kepada BUMDesa	5	Adanya Penyertaan Modal dari Dana Desa Kepada BUMDes		4.6.01 Pembentukan BUM Desa (Persiapan dan Pembentukan Awal BUM Desa) 4.6.02 Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yang dilaksanakan oleh Desa)	Kemendagri, Kemendesa PDTT, Kemenkeu, Bappenas, BPKP	Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi, Dinas PMD Provinsi	Dinas Keuangan Kabupaten/Kota, Dinas PMD Kabupaten/Kota	Pemerintah Desa	BUMDesa, Swasta, Akademisi
48	**Jumlah Kepemilikan dan Produktivitas Aset Desa**	**27**								
a	SKOR Kepemilikan Aset berupa Tanah Desa	5	Terdapat Aset Tanah Desa, Namun Produktif untuk Kepentingan Masyarakat		1.5.01 Sertifikasi Tanah Kas Desa	Kementerian ATR/BPN, Kemendesa PDTT, Kemendagri, BPN, BPKP	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Provinsi, Dinas PMD Provinsi	Dinas PMD Kabupaten/Kota,	Pemerintah Desa	BUMDesa, Swasta, Akademisi
b	SKOR Kepemilikan Aset berupa Kantor Desa	5	Terdapat Aset Kantor Desa, Namun Produktif untuk Kepentingan Masyarakat		1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Kemendagri, Kemendesa PDTT, Kementerian PUPR, BPK, BPKP	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Provinsi, Dinas PMD Provinsi	Dinas PMD Kabupaten/Kota, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kabupaten/Kota	Pemerintah Desa, BPD	Swasta, Akademisi
c	SKOR Kepemilikan Aset berupa Pasar Desa	5	Terdapat Aset Pasar Desa, Namun Produktif untuk Kepentingan Masyarakat		1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Kemendagri, Kemendesa PDTT, Kementerian Perdagangan, Kemenkeu, BPK, BPKP	Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi, Dinas PMD Provinsi	Dinas Perdagangan dan Koperasi Kabupaten/Kota, Dinas PMD Kabupaten/Kota	Pemerintah Desa, BPD	BUMDesa, Swasta, Akademisi

NO	PERTANYAAN	SKOR	HASIL PENDATAAN INDEKS DESA	INTERVENSI KEGIATAN (SESUAI PERMENDES 7 TAHUN 2023)	KODE REKENING	PELAKSANA KEGIATAN				
						PUSAT	PROVINSI	KABUPATEN	DESA	Lain-nya
d	SKOR Kepemilikan Aset Lainnya	3	Terdapat Aset Desa Lainnya, Namun Tidak Produktif untuk Kepentingan Masyarakat	Meningkatkan pendapatan asli desa untuk memiliki aset lainnya	1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Kemendagri, Kemendesa PDTT, Kementerian PUPR, Kemenkeu, BPK, BPKP	Dinas Pemuda dan Olahraga atau Kebudayaan Provinsi, Dinas PMD Provinsi	Dinas Perdagangan dan Koperasi Kabupaten/Kota, Dinas PMD Kabupaten/Kota	Pemerintah Desa, BPD	BUMDesa, Swasta, Akademisi
e	SKOR Produktivitas Kepemilikan Aset Desa	4	Aset Desa yang Dimiliki Produktif untuk Kepentingan Masyarakat >60-80%	Peningkatan, pemanfaatan Aset Desa yang Produktif untuk Kepentingan Masyarakat	1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Kemendagri, Kemendesa PDTT, Kemenparekraf, Kemenkeu, Bappenas, BPKP	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi, Dinas PMD Provinsi	Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten/Kota, Dinas PMD Kabupaten/Kota, Dinas Perdagangan atau Perindustrian Kabupaten/Kota	Pemerintah Desa, BPD	BUMDesa, Swasta, Akademisi
f	SKOR inventarisasi Aset Desa	5	Sudah Dilakukan Inventarisasi Aset Desa		1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Kemendagri, Kemendesa PDTT, Kemenkeu, BPN, BPKP, LKPP	Dinas PMD Provinsi	Dinas Pertahanan Kabupaten/Kota, Dinas PMD Kabupaten/Kota, Dinas Keuangan Daerah Kabupaten/Kota		

Sumber : https://id.kemendesa.go.id/

3.3. Identifikasi masalah berdasarkan RPJMKal

Pencermatan ulang RPJMKal merupakan langkah krusial dalam mengkaji dokumen perencanaan tahunan guna memastikan kesesuaian program kerja dengan kondisi terkini serta regulasi yang berlaku. Proses ini bertujuan untuk menyelaraskan prioritas pembangunan tahun 2027 dengan kebutuhan faktual masyarakat, sekaligus mengevaluasi capaian kinerja yang telah direalisasikan. Mengingat tahun 2026 merupakan akhir masa jabatan Lurah sekaligus penanda berakhirnya Peraturan Kalurahan Patalan Nomor 02 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Patalan Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019–2024, evaluasi menyeluruh menjadi sangat penting. Hasil pencermatan menunjukkan bahwa masih terdapat beberapa prioritas kegiatan pembangunan yang belum dapat terakomodasi dalam penganggaran tahun 2026 maupun tahun-tahun sebelumnya, antara lain:

1. Pembentukan KWT Dusun

Kelompok Wanita Tani (KWT) merupakan salah satu kelembagaan petani yang mana para anggotanya terdiri atas wanita yang berkecimpung dalam kegiatan pertanian. KWT di Kalurahan Patalan sudah terbentuk 13

kelompok di 10 Padukuhan dari 20 Padukuhan, bertambah KWT dari Dusun Gerselo, Ketandan dan Jetis. Tahun 2027 di targetkan untuk membentuk 9 KWT di Padukuhan sisanya untuk meningkatkan peran perempuan dan memfasilitasi kegiatan-kegiatan pertanian dari sektor permodalan hingga pengolahan hasil pertanian.

2. Penataan Kandang Kelompok

Kandang kelompok adalah kandang di mana dalam suatu tempat diletakan beberapa ternak sekaligus. Di masing-masing padukuhan memiliki Kandang Kelompok dusun tetapi tidak saling terkoordinasi satu sama lain, banyak kandang di dusun yang tidak digunakan karena aturan dari tiap Kandang Kelompok mengharuskan pemanfaatnya warga didusun tersebut. Pemerintah Kalurahan bermitra dengan LPMK untuk mengelola penataan Kandang Kelompok Dusun agar dimanfaatkan semaksimal mungkin. Ditargetkan di tahun 2027 membentuk Perkumpulan Kandang Kelompok yang beranggotakan perwakilan dari kandang kelompok dusun yang menfasilitasi kegiatan antar kandang kelompok mulai dari pembibitan, pakan, dan jual beli ternak.

3. Wisata Edukasi Pertanian

Pemerintah Kalurahan Patalan memiliki lahan pertanian dengan luas sawah mencapai 320,76 Ha dengan topografi terletak di ketinggian 8 mdpl dan iklim tropis sehingga wilayah Kalurahan Patalan cocok untuk lahan pertanian. Kondisi ini dimanfaatkan Kalurahan Patalan untuk membuat wisata edukasi terkait pertanian dengan pemandangan dan keasrian Desa yang masih terjaga. Pemeritah Kalurahan Patalan berkerjasama dengan Gapoktan Patalan dan KWT sehingga dapat memberdayakan petani Patalan selaras dengan program inovasi Kalurahan Patalan dan menciptakan lapangan kerja baru serta meningkatkan kesejahteraan petani.

4. Reformasi Kalurahan

Reformasi Kalurahan merupayakan upaya untuk meningkatkan Kapasitas Pemerintahan Kalurahan dan keberdayaan masyarakat Kalurahan dalam rangka mewujudkan kualitas hidup masyarakat, Pembangunan yang inklusif dan pengembangan kebudayaan. Reformasi Kalurahan mengacu pada upaya perbaikan tata kelola Pemerintah Kalurahan yang menekankan pada kegiatan yang sederhana dan mudah dilaksanakan, namun memiliki dampak perubahan yang tinggi pada

Pemerintah Kalurahan. Reformasi Birokrasi Kalurahan dilakukan untuk perbaikan mendasar pada tata Kelola Pemerintahan Kalurahan terutama menyangkut permasalahan tentang Pengelolaan Keuangan, Sumber Daya Manusia, Regulasi dan Nilai serta Budaya, hal lain Reformasi Kalurahan yaitu Reformasi Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan yaitu dengan adanya penguatan pada pengelolaan BUMKal, baik dalam penguatan SDM dan juga tata administrasinya.

5. Pengelolaan Sampah

Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dengan melakukan kegiatan pengolahan sampah di rumah tangga dengan mengedepankan prinsip mengurangi, memakai ulang, dan mendaur ulang.

BUMKAL Karya Pakarti yang memiliki unit usaha Sampah yang bertugas mengelola sampah masyarakat Patalan dan sudah membangun TPSS (Tempat Pemilihan Sampah Sementara) di Padukuhan Gelangan. Namun TPSS ini berhenti beroperasi sementara dikarenakan belum mendapat izin Gubernur untuk alih fungsi lahan. Hal ini menjadi perhatian khusus karena sudah keluar Surat Edaran Bupati Bantul tentang Bantul Darurat Sampah dan khusunya di Patalan ada beberapa titik yang perlu menjadi perhatian karena ada timbunan sampah dibuang sembarangan oleh oknum masyarakat.

Kalurahan Patalan memprioritaskan pengolahan sampah rumah tangga sudah dipilah di tingkat rumah tangga kemudian dikumpulkan di bank sampah Dusun yang bekerjasama dengan Unit Sampah BUMKAL.

6. Optimalisasi BUMKAL dan Koperasi Merah Putih

Badan Usaha Milik Kalurahan (BUMKal) dan Koperasi Merah Putih merupakan dua pilar penting dalam memajukan ekonomi di tingkat desa/kalurahan. Keduanya memiliki potensi besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menciptakan lapangan kerja, dan mendorong kemandirian ekonomi lokal. Namun, optimalisasi peran keduanya memerlukan strategi yang tepat dan sinergi yang kuat.

BUMKal didirikan dengan tujuan untuk mengelola potensi ekonomi kalurahan secara mandiri, meningkatkan pendapatan asli kalurahan (PAK), serta memberikan pelayanan dan manfaat bagi masyarakat.

Sedangkan Koperasi Merah Putih, sebagai wadah ekonomi berbasis keanggotaan, memiliki kekuatan pada asas kekeluargaan dan gotong royong.

Optimalisasi tidak akan maksimal jika BUMKal dan Koperasi Merah Putih berjalan sendiri-sendiri. Sinergi antara keduanya dapat menciptakan kekuatan ekonomi yang jauh lebih besar :

1). BUMKal sebagai Pemasok, Koperasi sebagai Distributor: BUMKal dapat fokus pada produksi barang atau jasa, sementara koperasi berperan dalam distribusi dan pemasaran kepada anggota atau pasar yang lebih luas.
2). Penyertaan Modal Timbal Balik: Jika memungkinkan dan sesuai regulasi, BUMKal dapat menyertakan modal pada koperasi untuk usaha tertentu, atau sebaliknya.
3). Pemanfaatan Jaringan Bersama: Keduanya bisa saling memanfaatkan jaringan anggota atau pelanggan untuk memperluas jangkauan bisnis.
4). Program Bersama: Mengadakan pelatihan bersama, pendampingan usaha, atau bahkan membuat produk kolaborasi yang memiliki nilai tambah. Misalnya, BUMKal menyediakan bibit unggul, koperasi menyediakan pupuk dan membantu pemasaran hasil panen anggota.

Dengan strategi optimalisasi yang komprehensif dan sinergi yang kuat antara BUMKal dan Koperasi Merah Putih, diharapkan roda perekonomian di tingkat kalurahan dapat bergerak lebih cepat, memberikan dampak positif yang nyata bagi kesejahteraan masyarakat, dan mewujudkan kemandirian ekonomi dari desa.

3.4. Identifikasi Masalah Berdasarkan Analisa Keadaan Darurat antara lain bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi dan atau kerusahan sosial yang berkepanjangan

Kawasan rawan bencana alam adalah kawasan yang berpotensi tinggi mengalami bencana alam, meliputi kawasan rawan gempa bumi, kawasan rawan banjir, dan kawasan rawan kekeringan. Curah hujan di Kalurahan Patalan memiliki rentang antara 1400 – 1700 Mm/Tahun. Seluruh wilayah memiliki potensi hujan lebat hingga badai yang dapat menyebabkan pohon tumbang serta kerusakan bangunan. Untuk

Kawasan gempa, berkaca dari Gempa tahun 2006, semua wilayah Kalurahan Patalan merupakan Kawasan rawan bencana gempa. Sedangkan kawasan rawan banjir adalah sebagai berikut:

Gambar 3.1. Peta Rawan Banjir

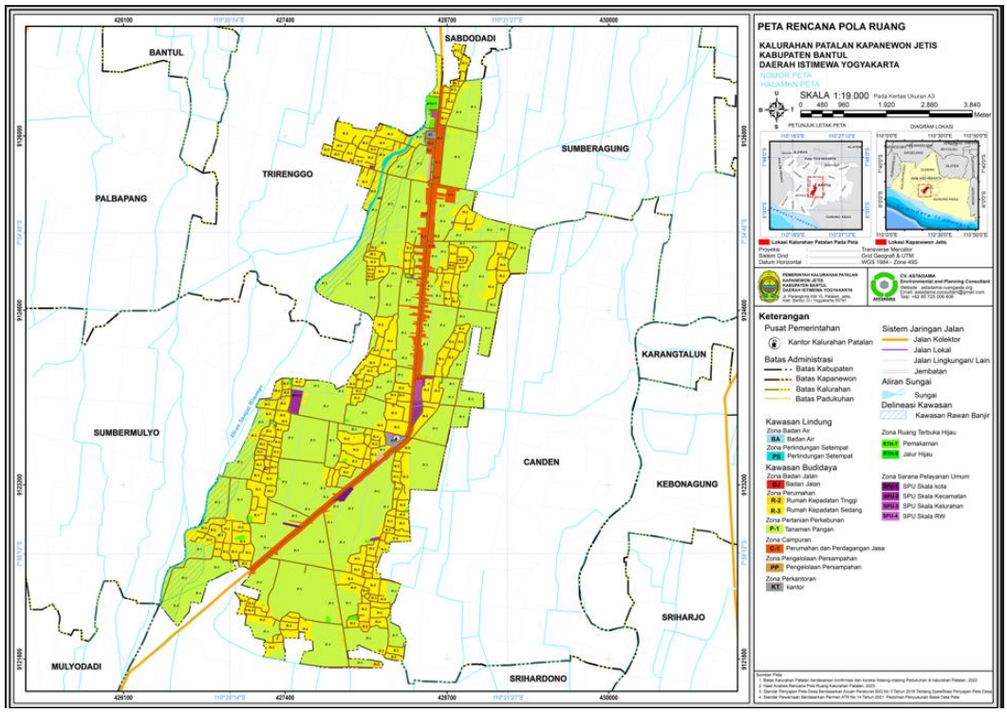

Sumber : masterplan Kalurahan Patalan

Daerah rawan banjir berada di daerah sepanjang Sungai Winonggo yaitu Padukuhan Ngaglik, Bakulan Kulon, Bakulan Wetan, Gelangan, Dukuh Sukun dan Butuh.

Kondisi politik dan ekonomi Kalurahan Patalan secara umum tentunya dipengaruhi oleh kondisi Kabupaten, Provinsi, dan Negara. Pada tahun 2026 sendiri merupakan Tahun awal Lurah Patalan terpilih menjabat. Program Kalurahan Patalan mensinkronkan dengan program dari Pemerintah Kabupaten, Propinsi, dan Pemerintah Pusat. Kerusuhan sosial sendiri selama ini belum pernah terjadi secara masif di Kalurahan Patalan. Akan tetapi tentunya tetap perlu antisipasi kedepannya.

Pemerintah Kalurahan Patalan mengalokasikan untuk bidang penanggulangan bencana, darurat dan mendesak kalurahan karena Kalurahan Patalan berada di daerah yang rawan gempa baik gempa di laut maupun di darat, banjir di beberapa titik, angin kencang, dan bencana non alam lainnya. Pemerintah bermitra dengan FPRB, Linmas,

dan masyarakat yang tergabung dalam Jagawarga dalam menjaga keamanan di marayakat kalurahan.

Berkaca dari bencana Covid-19, Pemerintah Kalurahan Patalan harus mempersiapkan tanggap darurat bencana dengan lebih baik lagi dan teroganisir, maka perlu kegiatan pendukung untuk mitigasi bencana. Pasca Covid-19, arus perekonomian mulai berputar kembali. Banyak toko, warung makan, yang sudah banyak beroperasi kembali. Anak-anak mulai bersekolah tatap muka dan pekerja kantor sudah beraktifitas secara normal di kantor kembali. UMKM sudah mulai beroperasi seperti semula. Program Pemerintah Kalurahan Patalan mengalokasikan anggaran dan untuk pelatihan dan bantuan UMKM, memberikan bantuan langsung tunai, dan bantuan rumah layak huni (RTLH). Dengan adanya Covid-19 dapat menjadi efek yang berkelanjutkan dimasyarakat seperti kehilangan pekerjaan sekarang ini masih belum mendapat pekerjaan, pemerintah juga merencakan pelatihan keterampilan untuk masyarakat usia produktif agar dapat bersaing di dunia kerja.

Pengelolaan sampah menjadi perhatian khusus karena diakhir tahun 2025 ini, Daerah Istimewa Yogyakarta masih berstatus darurat sampah, khususnya di Patalan ada beberapa titik yang perlu menjadi perhatian karena ada timbunan sampah dibuang sembarangan oleh oknum masyarakat. Pemerintah Kalurahan mengalokasikan anggaran untuk mengoptimalkan pengelolaan sampah rumah tangga di Kalurahan Patalan.

Analisa keadaan darurat dilakukan untuk mengantisipasi berbagai permasalahan yang muncul, apabila tidak segera diatasi akan menimbulkan masalah bagi masyarakat. Beberapa masalah mendesak yang harus secepatnya diatasi oleh Pemerintah Kalurahan , antara lain:

a. Legalitas Tanah Kalurahan secara digitalisasi untuk mempermudah pengarsipan dan pendataan aset Kalurahan.
b. Batas patok Tanah Kalurahan dengan tanah milik warga perlu adanya penegasan untuk menghindari konflik.
c. Belum memadainya drainase pemukiman di sebagian wilayah sehingga bila musim hujan terjadi genangan yang bisa menyebabkan kerawanan di bidang kesehatan dan kerusakan infrastruktur.

d. Belum optimalnya sarana dan prasarana pengairan untuk meminimalisir gagal panen, sehingga untuk menanggulangi keadaan tersebut kelompok tani berinisiatif membuat sumur bor dan pengadaan pompa air dengan kapasitas yang mencukupi guna mengairi lahan pertanian.
e. Perlunya normalisasi saluran irigasi guna memaksimalkan penggunaan air, karena dimensi saluran kurang memadai untuk debit air sehingga banyak air yang terbuang sia-sia.
f. Masih terdapat jalan kalurahan dan jalan pemukiman yang rusak berat karena umur dan perlu segera dilakukan rehab, agar jalan dapat berfungsi dengan baik. Beberapa ruas jalan yang merupakan akses transportasi warga.
g. Penyelesaian legalitas Aset Kalurahan berupa Ruko yang berada di Dusun Bakulan Kulon, Pasar Hewan, Lapangan di Dusun Patalan, dll (Ijin Gubernur).
h. Peningkatan kapasitas SDM guna mengurangi angka kemiskinan, antara lain Tim Penanggulangan Kemiskinan Tingkat Kalurahan maupun tingkat Dusun.
i. Masih ada kebutuhan sarana prasarana yang perlu dipenuhi antara lain gedung untuk lembaga-lembaga Kalurahan, Rumah Pilah Sampah, Saluran Irigasi yang rusak serta penerangan jalan.
j. Pengembangan Ekonomi Lokal kalurahan perlu ditingkatkan melalui kegiatan produk unggulan Kalurahan.

3.5. Identifikasi Masalah berdasarkan Prioritas Kebijakan Pembangunan Daerah

Dalam rangka mencapai tujuan nasional diperlukan sinkronisasi kebijakan pemerintah, baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten maupun Pemerintah Kalurahan, melalui kesamaan persepsi terhadap berbagai persoalan dan program pembangunan dalam kerangka pembangunan yang berkesinambungan. Penyusunan RKP Kalurahan merupakan upaya menjaga kesinambungan pembangunan yang terencana dan sistematis yang dilaksanakan oleh masing-masing Kalurahan dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif dan akuntabel dengan tujuan penanggulangan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat berdasarkan kearifan

lokal/local wisdom. Untuk itu, pemerintah kalurahan harus melakukan sinkronisasi kegiatan pembangunan daerah dengan kegiatan pembangunan kalurahan.

Proses sinkronisasi perencanaan dan penganggaran antara Pemerintah dan Pemerintah Kalurahan, diwujudkan melalui integrasi program dan kegiatan pembangunan nasional yang harus didukung dan dilaksanakan oleh Pemerintah Kalurahan.

Tabel 3.3 Sikronisasi Kegiatan Tahun 2027

No	Prioritas umum	Program Unggulan Bupati	Bentuk Kegiatan di Pemerintah Kalurahan
1	Pembangunan Ketahanan Pangan	Fasilitasi pembuatan pupuk organik dan benih tanaman pangan di tingkat gapoktan/poktan untuk kemandirian petani peningkatan konsumsi pangan bergizi	1. Pembentukan dan pemberdayaan BUMKal 2. Pembangunan dan/atau rehabilitasi Jalan Usaha Tani 3. Pembangunan dan/atau rehabilitasi saluran irigasi pertanian 4. Pemeliharaan saluran irigasi/angkat walet. 5. Pemanfaatan pekarangan dengan penanaman tanaman toga, sayuran, dan buah-buahan; 6. Fasilitasi pelatihan pembuatan benih tanaman
2	Desentralisasi Pengelolaan Sampah	Penuntasan penanganan sampah dengan pemanfaatan teknologi modern, budaya bersih dan penegakan hukum	Pengadaan bank sampah paling sedikit 1 (satu) unit setiap padukuhan
3	Percepatan penurunan Stunting	Penguatan fungsi layanan Kesehatan promotif dan preventif pada posyandu	1. Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Bumil, Lansia, Insentif) 2. Penanganan / Pemulihan Balita Gizi Buruk / Stunting

No	Prioritas umum	Program Unggulan Bupati	Bentuk Kegiatan di Pemerintah Kalurahan
			3. Pendampingan Ibu Hamil Kekurangan Gizi Kronis / Resiko Tinggi Dan Nifas 4. Pembangunan sanitasi dan Jamban sehat. 5. Fasilitasi Posyandu dan Kader kesehatan. 6. Program Seribu Hari Pertama Kehidupan (1000 HPK) 7. Peningkatan kapasitas dalam pengasuhan anak 8. Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masyarakat, Tenaga dan Kader Kesehatan dll) 9. Pengelolaan Rumah Kalurahan Sehat 10. Fasilitasi Penyelenggaraan Pos Binaan Terpadu (POSBINDU)
4	Kesetaraan Gender, Disabilitas, dan Inklusi Sosial	Peningkatan bantuan bagi pelajar dan santri berprestasi	1. Dukungan pendidikan bagi siswa miskin / berprestasi 2. Fasilitasi Forum Disabilitas Kalurahan
5	Tingginya Daerah Kerawanan Bencana	1. Pemasangan CCTV pada kawasan rawan gangguan keamanan 2. Optimalisasi peran dan fungsi relawan untuk penanganan masalah kemanusiaan	1. Penguatan dan Peningkatan Kapasitas 2. Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) 3. Pengadaan/Pemeliharaan Alat Pendeteksi Bencana 4. Pencegahan dan Pengendalian Perubahan Iklim melalui Mitigasi dan Adaptasi 5. Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa 6. Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa

No	Prioritas umum	Program Unggulan Bupati	Bentuk Kegiatan di Pemerintah Kalurahan
6	Tata Nilai Budaya Istimewa Yogyakarta		1. Penyusunan data kelompok kebudayaan kalurahan 2. Perencanaan dan penganggaran pendampingan pengembangan kebudayaan kalurahan 3. Monev pendampingan pengembangan kebudayaan kalurahan 4. Pembinaan/Pengembangan Adat, Seni dan Tradisi 5. Pengembangan Desa Budaya 6. Pemeliharaan Sarana Prasarana Kebudayaan, Rumah Adat dan Keagamaan Milik Desa
7	Reformasi Kalurahan	1. Pengembangan sumberdaya manusia birokrasi yang kreatif dan kolaboratif 2. Menuntaskan reformasi pelayanan publik	1. Pemutakhiran data warga miskin 2. Peningkatan keberdayaan warga miskin melalui peningkatan keterampilan 3. Program Padat Karya 4. Bantuan RTLH 5. Penyertaan modal Koperasi Desa Merah Putih

BAB IV
RUMUSAN PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN KALURAHAN

Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKP Kal) Tahun 2027 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan (RPJM Kal) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat program prioritas dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran berikutnya. Penyusunan RKP Kal merupakan upaya menjaga kesinambungan pembangunan yang terencana dan sistematis yang dilaksanakan oleh kalurahan dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif dan akuntabel dengan tujuan penanggulangan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat berdasarkan kearifan lokal. Hal ini mengisyaratkan bahwa pencapaian prioritas pembangunan di Kalurahan memerlukan koordinasi dari seluruh pemangku kepentingan, melalui penginstegrasikan program prioritas nasional, prioritas Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten Bantul berdasarkan kewenangan Kalurahan.

4.1. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Skala kalurahan Tahun Anggaran 2027

Prioritas Pembangunan Daerah tertuang dalam RPJMD Kabupaten Bantul 2025-2029 dengan fokus penyelenggaraan pemerintah daerah yang dilaksanakan secara bertahap untuk mencapai sasaran RPJMD, dengan mempertimbangkan sasaran Pembangunan jangka menengah dan keselarasan dengan misi RPJMD. Prioritas Daerah (PD) Kabupaten Bantul sebagai berikut:

PD-1 : Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia.

PD-2 : Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan.

PD-3 : Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi.

PD-4 : Mewujudkan transformasi infrastruktur yang ramah lingkungan dan tangguh bencana.

PD-5 : Mewujudkan transformasi sosial dan pelestarian budaya.

4.2. Berdasarkan Kewenangan Hak asal usul

Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Kalurahan atau prakarsa masyarakat Kalurahan sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.

Kewenangan Kalurahan berdasarkan hak asal usul meliputi :

a. pembinaan kelembagaan masyarakat;
b. pengelolaan tanah aset desa/Kalurahan; dan
c. pengembangan peran masyarakat Kalurahan.

Rincian kewenangan Kalurahan berdasarkan hak asal-usul yang diatur dan diurus oleh Kalurahan terdiri atas :

a. pembinaan kelembagaan masyarakat;
b. pengembangan peran masyarakat Kalurahan;
c. penyelesaian sengketa antar masyarakat di luar pemilikan hak-hak perdata;
d. pembinaan ketentraman masyarakat;
e. pengamanan penetapan batas pemilikan tanah masyarakat;
f. pengembangan lembaga keuangan Kalurahan;
g. peningkatan upaya gotong royong masyarakat;
h. pengamanan kekayaan dan aset Kalurahan;
i. pengelolaan tanah aset Desa/Kalurahan;
j. pembinaan dan pelestarian budaya, gotong royong dan adat istiadat.

Pada Tahun 2027 rincian kegiatan berdasarkan Kewenangan Hak asal usul, yaitu :

1. Pembinaan kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan, Karangtaruna dan Lembaga tingkat Kalurahan lainnya.
2. Sertifikasi Tanah Kas Kalurahan
3. Administrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah dan Pemberian Registrasi Agenda Pertanahan)
4. Fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin
5. Mediasi Konflik Pertanahan
6. Kegiatan Penyuluhan Pertanahan
7. Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
8. Penentuan/Penegasan Batas/patok Tanah Kas Kalurahan
9. Pengadaan Tanah Pengganti Kas Kalurahan
10. Pengelolaan Tanah Kas Kalurahan

4.3. Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala kalurahan

Kewenangan Lokal Berskala Kalurahan adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Kalurahan yang telah dijalankan oleh Kalurahan atau mampu dan efektif dijalankan oleh Kalurahan atau yang muncul karena perkembangan Kalurahan dan prakasa masyarakat Kalurahan.

Kriteria kewenangan lokal berskala Kalurahan terdiri atas :

a. kewenangan yang mengutamakan kegiatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat;
b. kewenangan yang mempunyai lingkup pengaturan dan kegiatan hanya di dalam wilayah dan masyarakat Kalurahan;
c. kewenangan yang berkaitan dengan kebutuhan dan kepentingan sehari-hari masyarakat Kalurahan;
d. kegiatan yang telah dijalankan oleh Kalurahan atas dasar prakarsa Kalurahan; dan
e. program kegiatan Pemerintah, Pemerintah Daerah DIY, Pemerintah Daerah dan pihak ketiga yang telah diserahkan dan dikelola oleh Kalurahan.

Rincian kewenangan Kalurahan berdasarkan lokal berskala Kalurahan diatur dan diurus oleh Kalurahan terdiri atas :

a. pengelolaan pasar Kalurahan;
b. pengelolaan tempat pemandian umum;
c. pengelolaan jaringan irigasi;
d. pengelolaan lingkungan permukiman masyarakat Kalurahan;
e. pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu);
f. pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar;
g. pengelolaan perpustakaan Kalurahan dan taman bacaan;
h. pengelolaan embung Kalurahan;
i. pengelolaan air minum berskala Kalurahan;
j. pembuatan jalan Kalurahan antar permukiman ke wilayah pertanian;
k. pembangunan jalan Kalurahan;
l. pembangunan jalan lingkungan;
m. pendayagunaan bahan galian yang tidak diperdagangkan, untuk pembangunan Kalurahan dan rumah rakyat;

n. usaha ekonomi masyarakat;
o. penegakan hukum dan sistem pengamanan lingkungan;
p. pengembangan pusat perekonomian Kalurahan, seperti pasar Kalurahan, perkoperasian, perbankan dan lembaga keuangan lainnya;
q. pemanfaatan sumber daya alam bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat;
r. melakukan penghijauan Kalurahan;
s. mengupayakan peningkatan pendidikan nonformal;
t. pengembangan industri rumah tangga; dan
u. kerjasama antar Kalurahan dan/atau dengan Pihak Ketiga.

Rincian kewenangan Kalurahan berdasarkan lokal berskala Kalurahan hasil identifikasi dan inventarisasi terdiri dari :

a. pengelolaan sarana dan prasarana aset Kalurahan;
b. pengelolaan data dan informasi Kalurahan;
c. pemberdayaan Lembaga Pemerintahan Kalurahan, Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan dan Lembaga tingkat Kalurahan lainnya;
d. penyelenggaraan kerjasama antar Kalurahan dan/atau dengan Pihak Ketiga;
e. pengelolaan Badan Usaha Milik Kalurahan;
f. pengelolaan dan pengembangan budidaya perikanan, peternakan, pertanian dan perkebunan milik Kalurahan;
g. pengelolaan wisata Kalurahan;
h. pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) milik Kalurahan;
i. pengelolaan lingkungan hidup di Kalurahan;
j. pengembangan olahraga;
k. pengembangan wawasan kebangsaan;
l. penanggulangan bencana skala Kalurahan; dan
m. pendayagunaan dan pengembangan teknologi tepat guna skala Kalurahan.

Pada Tahun 2027 rincian kegiatan berdasarkan Kewenangan Lokal Skala kalurahan, yaitu :

1. Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)
2. Dukungan Penyelenggaran PAUD (APE, Sarana PAUD dst)
3. Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat

4. Pemeliharaan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan/Sanggar Belajar Milik Kalurahan
5. Pemeliharaan Sarana Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/ Madrasah Nonformal Milik Kalurahan
6. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/ Madrasah Nonformal
7. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana/Prasarana Perpustakaan/ Taman Bacaan Kalurahan/ Sanggar Belajar Milik Kalurahan
8. Pengelolaan Perpustakaan Milik Kalurahan (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca)
9. Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar
10. Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi
11. Dukungan Relawan Pendidikan
12. Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif (PAUD HI)
13. Pendampingan Psikologis Siswa dan Orang tua
14. Penyelenggaraan Pos Kesehatan Kalurahan/Polindes Milik Kalurahan (obat, Insentif, KB, dsb)
15. Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lansia, Insentif)
16. Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)
17. Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan
18. Pembinaan Palang Merah Remaja (PMR) Tingkat Kalurahan
19. Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)
20. Pembinaan dan Pengawasan Upaya Kesehatan Tradisional
21. Pemeliharaan Sarana Prasarana Posyandu/Polindes/PKD
22. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD
23. Fasilitasi Penyelenggaraan Posbindu
24. Pengelolaan Rumah Kalurahan Sehat
25. Pembinaan Kampung KB
26. Pengelolaan Kalurahan Inklusif
27. Penanganan/Pemulihan Balita Gizi Buruk/Stunting
28. Pendampingan Ibu Hamil Kekurangan Gizi Kronis/Resiko Tinggi dan Nifas
29. Gerakan Kebersihan dan Kesehatan Lingkungan (PSN, dll)

30. Pembinaan Pramurukti Wreda
31. Penyelenggaraan Posyandu Remaja
32. Pemeliharaan Jalan Kalurahan
33. Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman/Gang
34. Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
35. Pemeliharaan Jembatan Kalurahan
36. Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Kalurahana/Balai Kemasyarakatan
37. Pemeliharaan Pemakaman /Situs Bersejarah/Petilasan Milik Kalurahan
38. Pemeliharaan Embung Milik Kalurahan
39. Pemelharaan Monumen/Gapura/Batas Desa/Kalurahan
40. Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Kalurahan
41. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman
42. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani
43. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa
44. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)
45. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan
46. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan
47. Pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa
48. Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Desa
49. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Embung Desa
50. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Monumen/Gapura/Batas Desa
51. Penyusunan dokumen perencanaan kawasan budaya kalurahan
52. Pembangunan / Pengembangan Kawasan Budaya Kalurahan
53. Pembangunan Area Bermain Anak Untuk Mendukung Kalurahan Layak Anak
54. Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN
55. Pemeliharaan Sumur Resapan Milik Kalurahan

56. Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Kalurahan (Mata Air, Penampung Air, Sumur Bor dll)
57. Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (Pipanisasi dll)
58. Pemeliharaan Sanitasi Pemukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit diluar Prasarana Jalan))
59. Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Kalurahan (Penampungan, Bank Sampah, dll)
60. Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga)
61. Pemeliharaan Taman/Taman Bermain Anak Milik Kalurahan
62. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumur Resapan
63. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Kalurahan
64. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga
65. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi Permukiman
66. Pembinaan Kemasyaraatan Kalurahan
67. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah
68. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah
69. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Taman/Taman Bermain Anak Milik Kalurahan
70. Pengelolaan PAMSIMAS / Air Minum Kalurahan
71. Pembangunan/Rehabilitasi/Pemeliharaan/Peningkatan IPAL Komunal
72. Bantuan Listrik Untuk Masyarakat miskin
73. Pembangunan/rehabilitasi/pemeliharaan Talut
74. Pembanguan taman/rehabilitasi/pemeliharaan taman
75. Pengelolaan Hutan Milik Kalurahan
76. Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Kalurahan
77. Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan/Penyadaran tentang LH dan Kehutanan
78. Pengelolaan Rumah Pilah Sampah/ Bank Sampah Milik Kalurahan
79. Pelatihan Pengelolaan/ Pengolahan Sampah
80. Pengembangan Tanaman Hias/Tanaman Obat/Tanaman Sayuran di Pekarangan
81. Pembuatan Rambu-rambu di Jalan Desa
82. Penyelenggaraan Informasi Publik Kalurahan (Poster, Baliho Dll)

83. Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Kalurahan
84. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Transportasi Kalurahan
85. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana & Prasarana Transportasi Kalurahan
86. Pembangunan/Peningkatan/Pengadaan Sarana Penerangan Jalan
87. Pemeiliharaan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif Kalurahan
88. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana & Prasarana Energi Alternatif Desa
89. Pembangunan/Pengembangan Energi Listrik Terbarukan (Biogas/Boidisel/Biohidro dll)
90. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Kalurahan
91. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik
92. Pengembangan Pariwisata Tingkat Kalurahan
93. Pengadaan/Penyelenggaran Pos Keamanan Kalurahan
94. Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Kalurahan
95. Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lokal Desa
96. Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Kalurahan
97. Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Kalurahan
98. Bantuan Hukum Untuk Aparatur Desa dan Masyarakat Miskin
99. Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masy. di Bid. Hukum & Pelindungan Masy.
100. Pengadaan/ Pemeliharaan Alat Pendeteksi Bencana
101. Pembinaan dan Pengawasan Rumah Kos/Sewa
102. Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Forum Pengurangan Resiko Bencana (FPRB)
103. Pencegahan dan Pengendalian Perubahan Iklim melalui Mitigasi dan Adaptasi
104. Penguatan Desa Aman Covid-19/Desa Tangguh Bencana
105. Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap NAPZA tingkat Kalurahan
106. Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Kalurahan
107. Pengiriman Kontingen Group Kesenian & Kebudayaan (Wakil Kalurahan tkt. Kec/Kab/Kot)

108. Penyelenggaran Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)
109. Pemeliharaan Sarana Prasarana Kebudayaan, Rumah Adat dan Kegamaan Milik Kalurahan
110. Pembangunan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Kegamaan Milik Kalurahan
111. Pembinaan Bidang Keagamaan
112. Pemeliharaan/Pembinaan/Pengembangan Adat, Seni dan Tradisi
113. Fasilitasi Pelaksanakan MTQ/MHQ/PORSADIN
114. Pengembangan Desa Budaya
115. Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga Sebagai Wakil Kalurahan tkt Kec/Kab/Kota
116. Penyelenggaraan Pelatihan Kepemudaan Tingkat Kalurahan
117. Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Kalurahan
118. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga Milik Kalurahan
119. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga Milik Kalurahan
120. Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Kalurahan
121. Pembinaan Lembaga Adat
122. Pembinaan LKM Kalurahan/LPM/LPM Kalurahan
123. Pembinaan PKK
124. Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan
125. Pembinaan/Peningkatan Kapasitas Lembaga Kebudayaan Kalurahan
126. Pembentukan LKK
127. Kegiatan Gotong Royong
128. Program Kalurahan Ramah/Layak Anak
129. Pelatihan Peningkatan Kapasitas Lembaga Kalurahan
130. Pemeliharaan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Kalurahan
131. Pemeliharaan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Kalurahan
132. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Karamba/Kolamini Perikanan Darat Milik Kalurahan
133. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Kalurahan
134. Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dll)
135. Bimtek/Pelatihan/Pengenalan TTG untuk Perikanan Darat/Nelayan

136. Bimtek/Pelatihan/ Pengembangan Usaha Pengolahan Ikan
137. Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggilingan)
138. Peningkatan Produksi Peternakan (alat produksi/pengelolaan/kandang)
139. Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Kalurahan (Lumbung Kalurahan dll)
140. Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana
141. Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Tekonologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan
142. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana
143. Fasilitasi Kelompok Masyarakat di Bidang Pertanian (GAPOKTAN, P3A)/Peternakan
144. Pelatihan Pengolahan Pasca Panen
145. Pengembangan Usaha Pengolahan Hasil Pertanian/Peternakan
146. Pelatihan Produksi/Pemasaran Benih Unggul
147. Pembentukan/Pelatihan Kader Keamanan Pangan Tingkat Kalurahan
148. Angkat Walet
149. Peningkatan Kapasitas Lurah
150. Peningkatan Kapasitas Pamong Kalurahan
151. Peningkatan Kapasitas Bamuskal
152. Peningkatan Kapasitas Staf/Tenaga Honorer Kalurahan/Kader Pembangunan Masyarakat
153. Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Desa
154. Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Administrasi Desa
155. Peningkatan Kapasitas Pengembangan Desa Wisata
156. Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan
157. Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak
158. Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difable (Penyandang Disabilitas)
159. Pendataan Warga difabel (Penyandang Disabilitas)
160. Fasilitasi/Penyuluhan/Sosialisasi KDRT/ Bina Keluarga Sakinah
161. Penyelenggaraan Desa/Kalurahan Inklusif
162. Pelatihan/Pembinaan Pengelolaan Keuangan Keluarga
163. Pelatihan Kerja (Live Skill) bagi Ibu Rumah Tangga/Remaja Belum Bekerja/Keluarga
164. Pelatihan Persiapan Perkawinan bagi Remaja Usia Kawin
165. Pembinaan/Sosialisasi Pencegahan Perkawinan Usia Dini

166. Pelatihan Pengelolaan Sampah
167. Pelatihan Manajemen Koperasi/KUD/UMKM
168. Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi
169. Pengadaan Teknologi Tepat Guna Untuk Pengembangan Ekonomi Pedesaan Non Pertanian
170. Pendampingan Penerapan Produksi Pangan Sehat dan Baik bagi UMKM
171. Pembentukan BUM Kalurahan (Persiapan dan Pembentukan Awal BUM Kalurahan)
172. Pelatihan Pengelolaan BUM Kalurahan (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemerintah Kalurahan)
173. Fasilitas Kantor BUM Desa
174. Pemeliharaan Pasar Kalurahan/Kios Milik Kalurahan
175. Pembangunan/Rehab Pasar Kalurahan/Kios Milik Kalurahan
176. Pengembangan Industri Kecil Tingkat Kalurahan
177. Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif
178. Kegiatan Penanggulangan Bencana
179. Penanganan Keadaan Darurat
180. Penanganan Keadaan Mendesak
181. Bantuan Langsung Tunai (BLT)
182. Bantuan Bahan Pangan
183. Bantuan Pendidikan
184. Bantuan Pengobatan

4.4. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2027

Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah disamping berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun 2027, capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD, identifikasi permasalahan di tingkat daerah dan nasional, rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan, juga memperhatikan tema dan prioritas pembangunan nasional dan Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2027. Tema RKPD Kabupaten Bantul tahun 2027 adalah “memperkuat pertumbuhan ekonomi daerah berbasis pertanian, industri, dan pariwisata didukung sdm berkualitas” dengan prioritas pembangunan sebagai berikut :

PD-1 : Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia.

PD-2 : Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan.

PD-3 : Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi.

PD-4 : Mewujudkan transformasi infrastruktur yang ramah lingkungan dan tangguh bencana.

PD-5 : Mewujudkan transformasi sosial dan pelestarian budaya.

Prioritas Penggunaan Dana Desa diarahkan untuk percepatan pencapaian tujuan SDGs Desa dan harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Desa berupa :

a. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Desa
   1. Penyertaan Modal BUMKal
   2. Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi
   3. Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif
   4. Pengembangan Pariwisata Tingkat Kalurahan

b. Peningkatan Kualitas Hidup Manusia
   1. Updating data (Profil Kalurahan, Monografi, Kemiskinan, Difable, Tani, UMKM)
   2. Fasilitasi Kelompok Masyarakat di Bidang Pertanian (GAPOKTAN, P3A)/Peternakan
   3. Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dll)
   4. Penanganan/Pemulihan Balita Gizi Buruk/Stunting
   5. Jambanisasi
   6. Penyelenggaraan Posyandu
   7. Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan
   8. Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan
   9. Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)
   10. Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu
   11. Pembinaan Kampung KB
   12. Pengelolaan Rumah Kalurahan Sehat
   13. Gerakan Kebersihan dan Kesehatan Lingkungan (PSN, dll)
   14. Penyelenggaraan Musyawarah Kalurahan/Dusun dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang inklusif
   15. Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Kalurahan secara Partisipatif

16. Kegiatan Penanggulangan Bencana
17. Penanganan Keadaan Darurat
18. Penanganan Keadaan Mendesak
19. Bantuan Langsung Tunai (BLT)
20. Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lokal Desa
21. Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Kalurahan
22. Pengelolaan Perpustakaan Milik Kalurahan
23. Pengembangan Pariwisata
24. Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)
25. Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat
26. Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap NAPZA tingkat Kalurahan
27. Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Kalurahan
28. Program Kalurahan Ramah/Layak Anak
29. Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difable (Penyandang Disabilitas)
30. Pelatihan Pengelolaan/ Pengolahan Sampah

c. Penanggulangan Kemiskinan
    1. Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Kalurahan secara Partisipatif
    2. Bantuan Langsung Tunai (BLT)
    3. Penyelenggaraan Desa/Kalurahan Inklusif
    4. Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi
    5. Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif

Prioritas Penggunaan Dana Desa diarahkan untuk percepatan pencapaian tujuan SDGs Desa dan harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Desa berupa :

d. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Desa
    5. Penyertaan Modal BUMKal
    6. Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi
    7. Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif

8. Pengembangan Pariwisata Tingkat Kalurahan

e. Peningkatan Kualitas Hidup Manusia
   1. Updating data (Profil Kalurahan, Monografi, Kemiskinan, Difable, Tani, UMKM)
   2. Fasilitasi Kelompok Masyarakat di Bidang Pertanian (GAPOKTAN, P3A)/Peternakan
   3. Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dll)
   4. Penanganan/Pemulihan Balita Gizi Buruk/Stunting
   5. Jambanisasi
   6. Penyelenggaraan Posyandu
   7. Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan
   8. Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan
   9. Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)
   10. Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu
   11. Pembinaan Kampung KB
   12. Pengelolaan Rumah Kalurahan Sehat
   13. Gerakan Kebersihan dan Kesehatan Lingkungan (PSN, dll)
   14. Penyelenggaraan Musyawarah Kalurahan/Dusun dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang inklusif
   15. Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Kalurahan secara Partisipatif
   16. Kegiatan Penanggulangan Bencana
   17. Penanganan Keadaan Darurat
   18. Penanganan Keadaan Mendesak
   19. Bantuan Langsung Tunai (BLT)
   20. Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lokal Desa
   21. Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Kalurahan
   22. Pengelolaan Perpustakaan Milik Kalurahan
   23. Pengembangan Pariwisata
   24. Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)
   25. Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat
   26. Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap NAPZA tingkat Kalurahan
   27. Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Kalurahan
   28. Program Kalurahan Ramah/Layak Anak

29. Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difable (Penyandang Disabilitas)
30. Pelatihan Pengelolaan/ Pengolahan Sampah

f. Penanggulangan Kemiskinan
   1. Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Kalurahan secara Partisipatif
   2. Bantuan Langsung Tunai (BLT)
   3. Penyelenggaraan Desa/Kalurahan Inklusif
   4. Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi
   5. Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif

4.5 Kebijakan Keuangan Kalurahan

1. Kebijakan Pendapatan Kalurahan

Pendapatan Kalurahan meliputi seluruh penerimaan uang melalui rekening Kalurahan yang merupakan hak Kalurahan dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh Kalurahan. Perkiraan pendapatan Kalurahan disusun berdasarkan asumsi realisasi pendapatan Kalurahan tahun sebelumnya dengan perkiraan berdasarkan potensi yang menjadi sumber Pendapatan Asli Kalurahan, Pendapatan Transfer dan Pendapatan Lain-lain.

Asumsi perkiraan Pendapatan Kalurahan Tahun 2027 sebesar Rp.3.671.594.206,00 (tiga miliar enam ratus tujuh puluh satu juta lima ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus enam rupiah) yang berasal dari :

Tabel 4.1 Pendapatan Kalurahan Patalan Tahun 2027

Kode Rek-ening	Uraian	Tahun	
		Berjalan (2026) (Rp)	Proyeksi (n-1/2027) (Rp)
04.00	Pendapatan		
04.01	**Pendapatan Asli Kalurahaan**	**380.924.850,00**	**380.924.850,00**
04.01.01	Hasil Usaha Kalurahan	135.787.600,00	135.787.600,00
04.01.02	Hasil Aset Kalurahan	245.137.250,00	245.137.250,00
04.01.03	Swadaya, Partisipasi dan Gotong-royong	0,00	0,00
04.01.04	Lain-lain Pendapatan Asli Kalurahan	0,00	0,00
04.02	**Pendapatan Transfer**	**3.731.662.656,00**	**3.282.579.356,00**
04.02.01	Dana Desa (DD)	373.456.000,00	373.456.000,00
04.02.02	Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah	338.336.356,00	338.336.356,00
04.02.03	Alokasi Dana Kalurahan (ADD)	1.642.697.000,00	1.642.697.000,00

Kode Rek-ening	Uraian	Tahun	
		Berjalan	Proyeksi
		(2026) (Rp)	(n-1/2027) (Rp)
04.02.04	Bantuan Keuangan Provinsi	295.000.000,00	120.000.000,00
04.02.05	Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota	1.082.173.300,00	808.090.000,00
04.03	**Pendapatan Lain-lain**	**8.185.000,00**	**8.090.000,00**
04.03.01	Penerimaan dari Hasil Kerjasama Antar Desa	685.000,00	590.000,00
04.03.06	Bunga Bank	7.500.000,00	7.500.000,00
Jumlah Pendapatan		**4.120.772.506,00**	**3.671.594.206,00**

Dalam RKP Kalurahan menampung semua potensi pendapatan yang masuk ke Kalurahan, yang nantinya akan dijabarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun 2027.

Pada saat penyusunan RKP Kal ini Pagu Anggaran Tahun 2027 belum keluar, Pagu Pendapatan Asli Kalurahan berdasarkan Pendapatan Asli Kalurahan tahun sebelumnya ditambah Pagu Dana Transfer berdasarkan Pagu tahun sebelumnya.

2. Kebijakan Belanja Kalurahan

Belanja Kalurahan meliputi semua pengeluaran dari rekening Kalurahan yang merupakan kewajiban Kalurahan dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayaran kembali oleh Kalurahan. Belanja sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 terdiri Belanja Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan, Belanja Bidang Pelaksanaan Pembangunan Kalurahan, Belanja Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Kalurahan, Belanja Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Belanja Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak.

Pembelanjaan dalam RKP Kalurahan TA 2027 ini akan dijadikan acuan dalam penyusunan APB Kal Tahun Aanggaran 2027, dengan format aplikasi SISKEUDES:

Tabel 4.2 Belanja Kalurahan Patalan Tahun 2027

Kode Rek-ening	Uraian	Tahun	
		Berjalan	Proyeksi
		(2026) (Rp)	(n+1/2027) (Rp)
05.00	**Belanja**		
01.00	**Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan**	**3.884.962.200**	**3.281.979.038**
01.01	**Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Kalurahan**	**2.678.923.600**	**2.616.534.992**
01.01.01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Lurah	62.380.800	66.657.600

Kode Rek-ening	Uraian	Tahun	
		Berjalan	Proyeksi
		(2026) (Rp)	(n+1/2027) (Rp)
01.01.02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Pamong Kalurahan	1.098.610.656	1.096.659.360
01.01.03	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Lurah dan Pamong Kalurahan	21.451.200	23.712.000
01.01.04	Penyediaan Operasional Pemerintah Kalurahan (ATK, Honor PKPK Kalurahan dan PPK Kalurahan, Perlengkapan Perkantoran, pakaian dinas/atribut, listrik/telpon dll))	169.250.000	158.182.862
01.01.05	Penyediaan Tunjangan Bamuskal	125.400.000	132.300.000
01.01.06	Penyediaan Operasional Bamuskal (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan Perkantoran, Pakaian Seragam, perjalanan dinas,Listrik/telpon, dll)	10.000.000	10.000.000
01.01.07	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	322.106.000	421.504.400
01.01.08	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	50.000.000	10.800.000
01.01.90	Penyediaan Jaminan Sosial Bagi Bamuskal dan LKK	12.369.600	12.369.600
01.01.91	Penyediaan Tunjangan Kinerja Bagi Lurah,Pamong Kalurahan ,Dan Bamuskal	140.572.000	118.781.250
01.01.92	Penyediaan Tunjangan Hari Raya bagi Lurah, Pamong Kalurahan dan Bamuskal	141.874.344	140.268.920
01.01.93	Penyediaan Tunjangan Purna Tugas Bagi Lurah,Pamong Kalurahan dan Bamuskal	92.752.000	24.966.000
01.01.94	Penyediaan Tambahan Penghasilan Dari Tanah Pelungguh	4.069.000	4.069.000
01.01.97	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Staf Kalurahan	228.888.000	197.064.000
01.01.98	Penyediaan Penghasilan bagi Staf Honorer	199.200.000	199.200.000
01.02	**Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Kalurahan**	**343.640.000**	**205.366.000**
01.02.01	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	205.540.000	154.266.000
01.02.02	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Kalurahan	50.100.000	38.100.000
01.02.03	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Kalurahan	88.000.000	13.000.000
01.03	**Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan**	**50.819.000**	**32.320.000**
01.03.01	Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	16.400.000	4400000
01.03.02	Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Kalurahan (Dipilih)	20.380.000	17650000
01.03.03	Pengelolaan Adminstrasi dan Kearsipan Pemerintahan Kalurahan	3.839.000	0
01.03.05	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Kalurahan secara Partisipatif	10.200.000	10.270.000
01.04	**Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan**	**601.474.600**	**234.139.046**
01.04.01	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Kalurahan/Pembahasan APB Kalurahan (Reguler)	39.906.000	25.038.000
01.04.02	Penyelenggaraan Musyawaran Kalurahan Lainnya (Musdus, Rembug Kalurahan Non Reguler)	69.382.000	35.806.046
01.04.03	Penyusunan Dokumen Perencanaan Kalurahan (RPJM Kalurahan/RKP Kalurahan dll)	28.890.000	20.590.000
01.04.04	Penyusunan Dokumen Keuangan Kalurahan (APB Kalurahan, APB Kalurahan Perubahan, LPJ dll)	47.445.000	38.265.000

Kode Rek-ening	Uraian	Tahun	
		Berjalan (2026) (Rp)	Proyeksi (n+1/2027) (Rp)
01.04.05	Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/Penilaian Aset Kalurahan	5.300.000	7.040.000
01.04.06	Penyusunan Kebijakan Kalurahan (Peraturan Kalurahan/Peraturan Lurah selain Perencanaan/Keuangan)	17.335.000	10.695.000
01.04.07	Penyusunan Laporan Lurah, LPP Kalurahan dan Informasi Kepada Masyarakat	8.110.000	5.205.000
01.04.08	Pengembangan Sistem Informasi Kalurahan	26.990.000	31.640.000
01.04.10	Dukungan Pelaksanaan & Sosialisasi Pemilihan Lurah, Penyaringan dan Penjaringan Pamong Kalurahan, dan Pemilihan Bamuskal (yang menjadi wewenang Kalurahan)	251.292.100	0
01.04.90	Dukungan dan Sosialisasi Pengisian Pamong dan Staf Honorer Kalurahan	65.234.500	59.860.000
01.04.95	Monitoring Kegiatan Yang Dilakukan Bamuskal	1.590.000	0
01.04.96	Biaya Operasional Padukuhan	40.000.000	0
01.05	**Pertanahan**	**210.105.000**	**193.619.000**
01.05.04	Mediasi Konflik Pertanahan	12.760.000	0
01.05.06	Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	99.280.000	115.000.000
01.05.07	Penentuan/Penegasan Batas/patok Tanah Kas Kalurahan	12.420.000	3.920.000
01.05.91	Pengelolaan Tanah Kas Kalurahan	85.645.000	74.699.000
02.00	**Pelaksanaan Pembangunan Kalurahan**	**1.788.999.048**	**996.367.200**
02.01	**Pendidikan**	**190.527.500**	**133.187.600**
02.01.01	Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Kalurahan (Honor, Pakaian dll)	71.923.000	64.423.000
02.01.03	Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat	4.800.000	3.934.500
02.01.05	Pemeliharaan Sarana Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Nonformal Milik Kalurahan	5.000.000	0
02.01.06	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga PAUD/ TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Nonformal	0	2.710.600
02.01.08	Pengelolaan Perpustakaan Milik Kalurahan (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca)	1.300.000	0
02.01.10	Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	107.504.500	62.119.500
02.02	**Kesehatan**	**796.323.100**	**653.725.000**
02.02.02	Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lansia, Insentif)	157.880.000	173.392.500
02.02.03	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	21.283.000	5.600.000
02.02.04	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	25.025.000	15.045.000
02.02.09	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **	20.850.000	34.887.300
02.2.91	Pengelolaan Rumah Kalurahan Sehat	20.645.000	17.765.000
02.2.92	Pembinaan Kampung KB	8.625.000	6.600.000
02.2.93	Pengelolaan Kalurahan Inklusif	309.671.600	307.059.600
02.2.94	Penanganan/Pemulihan Balita Gizi Buruk/Stunting	220.823.500	80.715.600
02.2.96	Gerakan Kebersihan dan Kesehatan Lingkungan (PSN, dll)	11.520.000	12.660.000

Kode Rek-ening	Uraian	Tahun	
		Berjalan	Proyeksi
		(2026) (Rp)	(n+1/2027) (Rp)
02.03	**Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**	**386.771.600**	**155.031.800**
02.03.10	Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Kalurahan	110.000.000	0
02.03.11	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman (Dipilih)	124.000.000	101.244.800
02.03.13	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	5.000.000	0
02.03.14	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	82.626.800	39.167.000
02.03.15	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan **)	26.194.000	14.620.000
02.04.15	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah (Dipilih)	26.194.000	0
02.03.20	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Monumen/Gapura/Batas Desa **)	12.756.800	
02.04	**Kawasan Permukiman**	**291.158.600**	**13.560.000**
02.04.01	Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	99.540.000	0
02.04.10	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumur Resapan (Dipilih)	83.130.000	0
02.04.15	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah (Dipilih)	13.988.600	13.560.000
02.04.93	Pembangunan/rehabilitasi/pemeliharaan Talut	94.500.000	
02.05	**Perhubungan, Komunikasi dan Informatika**	**40.990.000**	**0**
02.05.03	Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan/Penyadaran tentang LH dan Kehutanan (Dipilih)	25.650.000	0
02.05.91	Pelatihan Pengolahan / Pengelolaan Sampah	15.340.000	0
02.06	**Perhubungan, Komunikasi dan Informatika**	**79.163.248**	**39.062.800**
02.06.01	Pembuatan Rambu-rambu di Jalan Desa	7.000.000	10.104.000
02.06.02	Penyelenggaraan Informasi Publik Kalurahan (Poster, Baliho Dll)	5.000.000	0
02.06.05	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana & Prasarana Transportasi Kalurahan (dipilih)	67.163.248	28.958.800
02.08	**Pariwisata**	**4.065.000**	**1.800.000**
02.08.03	Pengembangan Pariwisata Tingkat Kalurahan	4.065.000	1.800.000
03.00	**Pembinaan Kemasyaraatan Kalurahan**	**503.954.300**	**278.121.500**
03.01	**Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat**	**89.785.000**	**46.355.500**
03.01.03	Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lokal Kalurahan	48.780.000	25.410.000,00
03.01.04	Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Kalurahan	35.190.000	17.945.500,00
03.01.07	Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masy. di Bid. Hukum & Pelindungan Masy.	5.815.000	3.000.000,00
03.02	**Kebudayaan dan Keagamaan**	**247.691.500**	**156.752.500**
03.02.01	Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Kalurahan	62.810.000	42.845.000
03.02.02	Pengiriman Kontingen Group Kesenian & Kebudayaan (Wakil Kalurahan tkt. Kec/Kab/Kot)	12.330.000	5.000.000
03.02.03	Penyelenggaran Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	86.399.000	8.400.000
03.02.90	Pembinaan Bidang Keagamaan	80.087.500	90.697.500
03.02.92	Fasilitasi Pelaksanakan MTQ/MHQ/PORSADIN	6.065.000	9.810.000

Kode Rek-ening	Uraian	Tahun	
		Berjalan	Proyeksi
		(2026) (Rp)	(n+1/2027) (Rp)
03.03	**Kepemudaan dan Olah Raga**	**82.599.800**	**61.738.000**
03.03.01	Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga Sebagai Wakil Kalurahan tkt Kec/Kab/Kota	8.370.000	6.090.000
03.03.02	Penyelenggaraan Pelatihan Kepemudaan Tingkat Kalurahan	7.920.000	7.920.000
03.03.03	Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Kalurahan	16.920.000	37.407.000
03.03.05	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga Milik Kalurahan	16.244.800	9.321.000
03.03.06	Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Kalurahan	33.145.000	1.000.000
03.04	**Kelembagaan Masyarakat**	**83.878.000**	**13.275.500**
03.04.02	Pembinaan LKM Kalurahan/LPM/LPM Kalurahan	17.500.000	2.942.500
03.04.03	Pembinaan PKK	60.078.000	10.333.000
03.04.04	Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	6.300.000	0
03.04.93	Program Kalurahan Ramah/Layak Anak	0	0
04.00	**Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan**	**580.827.500**	**165.681.400**
04.01	**Kelautan dan Perikanan**	**17.930.000**	**0**
04.01.05	Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dll)	8.530.000	0
04.01.90	Bimtek/Pelatihan/ Pengembangan Usaha Pengolahan Ikan	9.400.000	0
04.02	**Pertanian dan Peternakan**	**462.103.000**	**97.179.400**
04.02.01	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggilingan)	10.660.000	0
04.02.02	Peningkatan Produksi Peternakan (alat produksi/pengelolaan/kandang)	0	6.179.400
04.02.04	Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	59.860.000	51.840.000
04.02.05	Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Tekonologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan	4.900.000	800.000
04.02.06	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	101.953.000	0
04.02.90	Fasilitasi Kelompok Masyarakat di Bidang Pertanian (GAPOKTAN, P3A)/Peternakan	284.730.000	38.360.000
04.03	**Peningkatan Kapasitas Aparatur Kalurahan**	**24.909.500**	**0**
04.03.02	Peningkatan Kapasitas Pamong Kalurahan	22.954.500	0
04.03.03	Peningkatan Kapasitas Bamuskal	1.955.000	0
04.04	**Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga**	**19.020.000**	**28.937.000**
04.04.03	Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difable (Penyandang Disabilitas)	13.020.000	24.770.000
04.04.94	Pelatihan Kerja (Live Skill) bagi Ibu Rumah Tangga/Remaja Belum Bekerja/Keluarga (dipilih)	6.000.000	4.167.000
04.05	**Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)**	**7.440.000**	**23.540.000**
04.05.02	Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi	7.440.000	23.540.000
04.06	**Dukungan Penanaman Modal**	**3.560.000**	**2.010.000**
04.06.02	Pelatihan Pengelolaan BUM Kalurahan (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemerintah Kalurahan)	3.560.000	2.010.000
04.07	**Perdagangan dan Perindustrian**	**45.865.000**	**14.015.000**
04.07.02	Pembangunan/Rehab Pasar Kalurahan/Kios Milik Kalurahan	15.450.000	0

Kode Rek-ening	Uraian	Tahun	
		Berjalan (2026) (Rp)	Proyeksi (n+1/2027) (Rp)
04.07.04	Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif	30.415.000	14.015.000
05.00	**Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Bencana**	**231.000.000**	**184.585.000**
05.01	**Sub Bidang Penanggulangan Bencana**	**5.000.000**	**20.000.000**
05.01.00	Kegiatan Penanggulanan Bencana	5.000.000	20.000.000
05.02	**Sub Bidang Keadaan Darurat**	**5.000.000**	**10.000.000**
05.02.00	Penanganan Keadaan Darurat	5.000.000	10.000.000
05.03	**Sub Bidang Keadaan Mendesak**	**221.000.000**	**154.585.000**
05.03.00	Penanganan Keadaan Mendesak	5.000.000	10.000.000
05.03.01	Bantuan Langsung Tunai (BLT)	216.000.000	144.585.000
Jumlah Total		**6.989.743.048**	**4.906.734.138**

Penetapan rencana anggaran belanja pada masing-masing bidang dalam RKP Kalurahan Tahun Anggaran 2027 dilakukan melalui pembahasan dalam Musrenbangkal RKP Kalurahan dengan memperhatikan rekomendasi Tim Verifikasi, kemudian dilakukan pembahasan dan kesepakatan dengan Bamuskal, sehingga dapat dirinci sebagai berikut :

1. Belanja Penyelenggaraan Pemerintahan sebesar Rp.3.281.979.038,00 (66,89%).
2. Belanja Pembangunan Kalurahan sebesar Rp.996.367.200,00 (20,31%).
3. Belanja Pembinaan Kemasyarakatan Kalurahan sebesar Rp.278.121.500,00 (5,67%).
4. Belanja Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan sebesar Rp.165.681.400 (3,38%).
5. Belanja Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Kalurahan sebesar Rp.184.585.000,00 (3,76%).

Rencana Anggaran tersebut, sesuai dengan prioritas penggunaan Dana Desa tahun 2027. Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Kalurahan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kalurahan, meningkatan kualitas hidup manusia, dan menanggulangi kemiskinan. Optimalisasi penggunaan Dana Desa yang sesuai dengan prioritas sangat penting dilaksanakan oleh Pemerintah Kalurahan, Bamuskal, dan masyarakat secara efektif, efisien, serta akuntabel.

Berdasarkan Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2027, Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2027, yaitu :

1. Penanganan kemiskinan ekstrem dengan penggunaan dana desa untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) dengan mengutamakan keluarga miskin ekstrem. Identifikasi keluarga miskin ekstrem dilakukan melalui pemeringkatan berdasarkan aspek sosial dan ekonomi sesuai dengan Data Pemerintah sebagai acuan.

Tabel 4.3 Kegiatan Penanganan kemiskinan ekstrem

NO	KODE	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
1	02.01.10	Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	62.119.500
2	05.03.01	Bantuan Langsung Tunai (BLT)	144.585.000
Jumlah			206.704.500

Pemerintah Kalurahan Patalan menganggarkan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) yang rencana akan diberikan kepada 40 Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Kegiatan Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi untuk siswa miskin, yatim piatu dan terlantar serta bantuan beasiswa Pendidikan di Universitas Teknologi Digital Indonesia (UTDI).

2. Penguatan Desa Berketahanan Iklim dan Tangguh Bencana
Dalam melestarikan lingkungan hidup, mitigasi bencana, serta pencegahan dan penanganan dampak perubahan iklim yang terjadi, Kalurahan Patalan mengalokasi anggaran dalam kegiatan dibawah ini. Kalurahan bekerjasama dengan Linmas dan Forum Pengurangan Resiko Bencana (FPRB) Kalurahan.

Tabel 4.4 Kegiatan Penguatan Desa Berketahanan Iklim dan Tangguh Bencana

NO	KODE	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
1	03.01.03	Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lokal Desa	25.410.000
2	03.01.04	Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Kalurahan	17.945.500
Jumlah			43.355.500

3. Peningkatan Promosi Dan Penyediaan Layanan Dasar Kesehatan Skala Desa

Pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp.181.550.000,00 untuk prioritas ini dari pendapatan Dana Desa tahun 2027 dengan rincian dibawah ini :

Tabel 4.5 Peningkatan Promosi Dan Penyediaan Layanan Dasar Kesehatan Skala Desa

NO	KODE	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
1	02.02.02	Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lansia, Insentif)	122.530.000
2	02.02.04	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	15.045.000
3	02.02.91	Pengelolaan Rumah Kalurahan Sehat	13.965.000
4	02.02.92	Pembinaan Kampung KB	6.600.000
5	02.02.94	Penanganan/Pemulihan Balita Gizi Buruk/Stunting	10.750.000
6	02.02.96	Gerakan Kebersihan dan Kesehatan Lingkungan (PSN, dll)	12.660.000
Jumlah			181.550.000

4. Program Ketahanan Pangan atau Lumbung Pangan, Energi, dan Lembaga Ekonomi Desa lainnya

   Pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp.184.275.000,00 untuk prioritas ini dari pendapatan Dana Desa tahun 2027 dengan rincian dibawah ini :

Tabel 4.6 Kegiatan Program Ketahanan Pangan atau Lumbung Pangan, Energi, dan Lembaga Ekonomi Desa lainnya

NO	KODE	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
1	01.05.91	Pengelolaan Tanah Kas Kalurahan	30.950.000
2	04.02.04	Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	51.840.000
3	04.02.05	Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Tekonologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan	800.000
4	04.02.90	Fasilitasi Kelompok Masyarakat di Bidang Pertanian (GAPOKTAN, P3A)/Peternakan	38.360.000
5	04.04.03	Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difable (Penyandang Disabilitas)	24.770.000
6	04.05.02	Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi	3.540.000
7	04.07.04	Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif	14.015.000
Jumlah			184.275.000

5. Dukungan Implementasi Koperasi Desa Merah Putih

Fokus Penggunaan Dana Desa untuk dukungan implementasi Koperasi Desa Merah Putih dapat digunakan untuk pembayaran seluruh kewajiban yang timbul atas pelaksanaan kegiatan percepatan pembangunan fisik gerai, pergudangan, dan kelengkapan Koperasi Desa Merah Putih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai percepatan pembangunan fisik gerai, pergudangan, dan kelengkapan Koperasi Desa Merah Putih.

Tabel 4.7 Kegiatan Dukungan Implementasi Koperasi Desa Merah Putih

NO	KODE	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
1	04.05.02	Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Tekonologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan	800.000
Jumlah			800.000

6. Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur Desa melalui Program Padat Karya Tunai Desa

   Pembangunan berbasis Padat Karya Tunai (PKT) yang dikombinasikan dengan penggunaan bahan baku lokal merupakan strategi efektif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dari tingkat paling bawah. Pendekatan ini tidak hanya fokus pada pembangunan fisik, tetapi juga pada penguatan ekonomi masyarakat secara langsung.

Tabel 4.8 Kegiatan Padat Karya Tunai dan penggunaan bahan baku lokal

NO	KODE	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
1	01.02.02	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Kalurahan	10.000.000
Jumlah			10.000.000

7. Pembangunan Infrastruktur Digital dan Teknologi di Desa

   Teknologi informasi dapat membantu masyarakat kalurahan dalam mengakses informasi dan pelayanan publik dengan lebih mudah. Di era digitalisasi, teknologi dapat meningkatkan dan menunjang kualitas pendidikan perangkat kalurahan, karena dengan adanya teknologi maka perangkat kalurahan bisa melakukan pekerjaan administrasi kalurahan dengan mudah sehingga kebutuhan masyarakat dapat dilayani dengan cepat, mudah dan akurat. Berikut ini dianggarkan kegiatan untuk menunjang proritas ini :

Tabel 4.9 Kegiatan Pembangunan Infrastruktur Digital dan Teknologi di Desa

NO	KODE	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
1	01.03.01	Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	1.000.000
2	01.04.08	Pengembangan Sistem Informasi Kalurahan	30.640.000
Jumlah			31.640.000

Dengan komposisi perkiraan anggaran tersebut, diharapkan Visi dan Misi Kalurahan dalam upaya penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan sosial dasar masyarakat dapat segera terwujud. Secara lebih rinci perkiraan anggaran belanja dalam RKP Kal tahun 2027 tercantum dalam Peraturan Kalurahan ini.

3. Kebijakan Pembiayaan Kalurahan

Pembiayaan meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik dalam tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan Kalurahan dimaksud terdiri dari :

Tabel 4.10 Pembiayaan Kalurahan Patalan Tahun 2027

Kode Rekening	Uraian	Tahun	
		Berjalan	Proyeksi
		(2026) (Rp)	(n-1/2027) (Rp)
06.00	**Pembiayaan**		
06.01	**Penerimaan Pembiayaan**	**504.037.695,56**	**190.000.000,00**
06.01.01	SILPA Tahun Sebelumnya	504.037.695,56	190.000.000,00
06.01.1.01	SILPA Tahun Sebelumnya	504.037.695,56	190.000.000,00
	1. SILPA ADD	136.548.281,56	30.000.000,00
	2. SILPA DDS	88.331.008,00	30.000.000,00
	3. SILPA PAD	187.897.800,00	50.000.000,00
	4. SILPA PBH	65.821.156,00	50.000.000,00
	5. SILPA PBK	25.439.450,00	30.000.000,00
06.02	**Pengeluaran Pembiayaan**	**0,00**	**50.000.000,00**
06.02.01	Penyertaan Modal BUM Kalurahan	0,00	50.000.000,00
	1. Penambahan Modal BUMKAL	0,00	50.000.000,00
Jumlah Pembiayaan		**504.037.695,56**	**140.000.000,00**

BAB V
PENUTUP

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan ditingkat kalurahan pada dasarnya ditentukan oleh komitmen pemerintah dan masyarakat kalurahan dalam bekerja sama membangun kalurahan. Pembangunan yang dilakukan secara partisipatif mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai dengan pemeliharaan akan menjamin optimalisasi capaian pembangunan di kalurahan. Permasalahan yang ada dengan kepercayaan satu sama lain akan mudah diatasi manakala tersedia ruang komunikasi dan informasi bagi masyarakat yang memadai.

Diharapkan penyusunan RKP Kal yang benar-benar partisipatif dan sesuai kebutuhan riil masyarakat akan mendorong percepatan pembangunan skala kalurahan menuju kemandirian kalurahan. Dengan informasi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan yang dapat dengan mudah di akses masyarakat kalurahan, maka diharapkan dalam proses penyusunan APB Kal Tahun Anggaran 2027 seluruhnya bisa diselenggarakan secara proporsional.

Ditetapkan di Patalan
Pada tanggal 13 Oktober 2026
Lurah Patalan

Ttd.

S A Y U D I